BADAN POM





LAPKIN

LAPORAN KINERJA 2025

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU



JL. Indragiri No. 1, RT 001 / RW 007, Kel. Pematang Reba, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau - 29351

facebook.com/bpom.indragirihulu

https://twitter.com/bpominhu

instagram.com/bpom.indragirihulu

youtube.com/@bpomindragirihulu

KATA PENGANTAR



Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Indragiri Hulu kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan, peningkatan capaian kinerja, serta optimalisasi pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya.

Pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dilakukan melalui penguatan kelembagaan dalam lingkup tiga wilayah kerja, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pegawai Balai POM di Indragiri Hulu serta dukungan dan sinergi dari pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Kami juga terbuka terhadap masukan yang konstruktif sebagai bagian dari komitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

Semoga capaian yang tertuang dalam Laporan Tahunan Tahun 2025 ini menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta memperkuat perlindungan masyarakat di bidang Obat dan Makanan sesuai dengan visi dan misi Badan POM.

Pematang Reba, 27 Februari 2025
Kepala Balai POM di Indragiri Hulu,

Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai kewajiban menyusun LAKIP sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis periode 2025-2029, yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2025.

Sesuai dengan Rencana Kerja Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan yang harus dicapai oleh Balai POM di Indragiri Hulu, yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7. Layanan Publik UPT yang Prima
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada tahun 2025 terdapat perubahan Manual indikator dan perhitungan terhadap capaian kinerja. Perhitungan dilakukan berdasarkan Renstra tahun 2025-2029 yang telah diundangkan pada tanggal 7 Oktober 2025, dari 8 Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan, diperoleh capaian sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)					Efisiensi	
			Target 2025	%Capaian thd Target TW III	Kategori/ Keterangan	REALISASI s.d TW IV	Indeks Efisien (IE)	Capaian Efisiensi
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,50	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan	58.554.925	1,17	100% (efisien)

1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,00	106,26%	Sangat Baik	60.281.302	1,03	100% (efisien)
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00%	Baik	8.611.615	0,97	Tidak Efisien
1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	109,89%	Sangat Baik	8.611.615	1,06	100% (efisien)
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,00	126,95%	Tidak Dapat Disimpulkan	14.715.986	1,31	95% (efisien)
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00%	Baik	14.715.986	1,03	100% (efisien)
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan	14.715.986	1,16	100% (efisien)
1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	104,44%	Sangat Baik	84.025.641	1,06	100% (efisien)
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	109,68%	Sangat Baik	42.012.821	1,11	100% (efisien)
1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	109,28%	Sangat Baik	14.715.986	1,13	100% (efisien)
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	58.554.925	1,26	95% (efisien)

1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,60%	Sangat Baik	42.012.821	1,07	100% (efisien)
1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,00	188,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	93.696.350	1,89	88% (efisien)
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	85,81%	Cukup	8.611.615	0,83	Tidak Efisien
2-1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	510.000	2,00	88% (efisien)
4-1	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,19	101,23%	Sangat Baik	38.727.528	2,93	75% (tidak efisien)
4-2		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1,00	100,00%	Baik	11.923.000	6,55	75% (tidak efisien)
4-3		Jumlah desa pangan aman	1,00	100,00%	Baik	29.303.600	5,19	75% (tidak efisien)
4-4		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	100,00%	Baik	6.695.000	14,44	75% (tidak efisien)
5-1	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,00	100,00%	Baik	12.947.300	2,81	75% (tidak efisien)

6-1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,00	105,26%	Sangat Baik	92.695.935	1,24	95% (efisien)
7-1	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00	108,80%	Sangat Baik	8.807.664	11,00	75% (tidak efisien)
8-1	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	115,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	53.670.091	1,14	100% (efisien)
9-2	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	78,38	99,54%	Baik	165.071.770	1,04	100% (efisien)
9-3		Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	100,00%	Baik	165.071.770	1,05	100% (efisien)
9-4		Indeks Manajemen Risiko UPT	2,93	96,93%	Baik	141.490.089	1,01	100% (efisien)
9-5		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100,00	100,00%	Baik	2.244.716.793	6,28	75% (tidak efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan berdasarkan capaian per indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan Yang sudah dinormalisasikan menjadi 110%, yaitu:
    a. IKU 1-1 yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 115,96%
    b. IKU 1-6 yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan nilai 126,95%

c. IKU 1-8 yaitu Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 112,36%
d. IKU 1-12 yaitu Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan nilai 125,00%
e. IKU 1-14 yaitu Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan nilai 188,31%
f. IKU 2-1 yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 200,00%
g. IKU 8-1 yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT dengan nilai Indeks Pelayanan Publik UPT

2. Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kategori Sangat Baik (100% < x ≤ 110%), yaitu:
   a. IKU 1-3 yaitu Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 106,26%
   b. IKU 1-5 yaitu Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 109,89%
   c. IKU 1-9 yaitu Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 104,44%
   d. IKU 1-10 yaitu Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 109,68%
   e. IKU 1-11 yaitu Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 109,28%
   f. IKU 1-13 yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan nilai 105,60%
   g. IKU 4-1 yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan nilai 101,23%
   h. IKU 6-1 yaitu Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan nilai 105,26%
   i. IKU 7-1 yaitu Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan dengan nilai 108,80%

3. Indikator Kinerja memperoleh nilai dengan kategori Baik (= 100%), yaitu:
   a. IKU 1-4 yaitu Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan nilai 100,00%
   b. IKU 1-7 yaitu Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 100,00%

c. IKU 4-2 yaitu Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan nilai 100,00%
d. IKU 4-3 yaitu Jumlah desa pangan aman dengan nilai 100,00%
e. IKU 4-4 yaitu Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan nilai 100,00%
f. IKU 5-1 yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan nilai 100,00%
g. IKU 9-2 yaitu Nilai AKIP UPT dengan nilai 99,54%
h. IKU 9-3 yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan nilai 100,00%
i. IKU 9-4 yaitu Indeks Manajemen Risiko UPT dengan nilai 96,93%
j. IKU 9-5 yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT dengan nilai 100,00%

Pada Akhir tahun 2025 ini, BPOM di Indragiri Hulu memperoleh persentase capaian kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 93,76 % dengan Predikat **Baik.**

Pada tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu memperoleh anggaran sebesar Rp15.883.385.000 (SP DIPA- 063.01.2.690484/2025)/12 Desember 2025 / awal 15.462.600.000 SP DIPA- 063.01.2.690484/2025 untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang mencakup tiga Kabupaten/Kota di Riau. Namun, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025, dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional melalui mekanisme blokir dan efisiensi. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu mengalami revisi, di mana alokasi pembangunan gedung laboratorium direalokasikan sehingga pagu anggaran menjadi Rp2.462.226.000.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-24/M/SDK/KW/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Persetujuan Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi

Anggaran (Blokir) Badan POM TA 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dilakukan pembukaan blokir terhadap RO Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT, sehingga total pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu menjadi Rp3.511.214.000

Realisasi anggaran Balai POM di Indragiri Hulu hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp3.495.468.109 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam

Puluh Delapan Ribu, Seratus Sembilan Rupiah), atau sebesar 99,55% dari total pagu anggaran setelah revisi. Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1.243.426.121, belanja barang sebesar Rp1.869.329.527, dan belanja modal sebesar Rp382.712.461.

Secara garis besar, Balai POM di Indragiri Hulu telah berhasil mencapai target pada tahun 2025. Namun dalam pencapaian ini masih ditemukan kendala antara lain:

1. Kurangnya jumlah tenaga pengawas inspeksi dan sertifikasi dibandingkan dengan jumlah sarana yang menjadi target Balai POM di Indragiri Hulu.
2. Adanya kebocoran informasi dalam kegiatan penindakan tindak pidana Obat ilegal oleh oknum ekspedisi.
3. Penguasaan teknologi informasi pelaku usaha masih terbatas
4. Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tupoksi.
5. Pengelolaan kinerja anggaran yang belum optimal. Halaman III DIPA belum dilakukan perencanaan secara maksimal.
6. Pengambilan sampel yang belum sesuai dengan pedoman sampling dan terjadi beberapa kali kesalahan pengiriman sampel yang tidak sesuai dengan balai tujuan.

Balai POM di Indragiri Hulu berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir Tahun 2025. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan pengumpulan data kinerja, melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala melalui monitoring capaian kinerja, agar dapat mengantisipasi semua kendala dan hambatan dan menentukan langkah-langkah perbaikan;
2. Melakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran mengikuti adanya kebijakan efisiensi anggaran.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dan stakeholder terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Balai POM di Indragiri Hulu.

Oleh karena itu, Balai POM di Indragiri Hulu perlu meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi guna menjangkau masyarakat secara lebih luas serta membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pengawasan produk yang dikonsumsi. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat, lintas sektor, serta pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM

di Indragiri Hulu. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Indragiri Hulu. Hal ini akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi dan misi Balai POM di Indragiri Hulu. Balai POM di Indragiri Hulu berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya

HIGHLIGHT KINERJA

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU CANANGKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM



Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada Selasa, 30 September 2025, sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar-instansi penegak hukum dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi tersebut dihadiri oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu, Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H., dan Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Sahroni, S.H., M.H., dengan agenda pembahasan penguatan integritas kelembagaan, peningkatan transparansi pelayanan publik, serta optimalisasi kerjasama pengawasan obat dan makanan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi membahas peningkatan efektivitas koordinasi dan penerapan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta mendukung terciptanya pelayanan publik yang bersih dan profesional.

KOMITMEN BERSAMA BALAI POM DI INDRAGIRI HULU DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA



Balai POM di Indragiri Hulu melaksanakan koordinasi dengan Kodim 0302/Inhu pada Kamis, 27 November 2025, bertempat di Kodim 0302/Inhu. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Balai POM di Indragiri Hulu, Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H., dan diterima

langsung oleh Komandan Kodim 0302/Inhu, Letkol Arh Bangun Bara K.P., S.E., M.I.P. Dalam pertemuan tersebut, Balai POM memaparkan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi, serta membahas penguatan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dalam pelaksanaan event nasional.

Selain itu, Balai POM menyampaikan program strategis seperti Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sekolah Pangan Aman, serta pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR). Peran Balai POM dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari pembekalan penjamah pangan hingga penanganan potensi KLB Keracunan Pangan, juga menjadi pembahasan. Koordinasi ini diharapkan memperkuat kolaborasi kedua instansi dalam mewujudkan pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

LAYANAN PELAPORAN SELAMAT PAGI

Dalam upaya menciptakan kondisi bebas korupsi di Lingkungan Organisasi, Balai POM di Indragiri Hulu mengajak masyarakat untuk melaporkan temuan tindakan gratifikasi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Balai POM di Indragiri Hulu menyediakan link layanan pelaporan "SELAMAT PAGI" (SEmua bisa buat LAporan MAsyarakaT untuk PengendAlian GratifikasI) untuk melaporkan jika adanya temuan yang mengarah pada tindakan Gratifikasi bagi pegawai Balai POM di Indragiri Hulu.



"SI PALING" (SISTEM PENGHARGAAN LINGKUNGAN KERJA) PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN PENGENAAN SANKSI (PUNISHMENT)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Indragiri Hulu Nomor. HK.02.02.7C.04.25.28 tahun 2025 tentang Inovasi "Si Paling" (Sistem Penghargaan Lingkungan Kerja) Pemberian Penghargaan (Reward) dan Pengenaan



Sanksi (Punishment), Balai POM di Indragiri Hulu memberikan penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) atas predikat kinerja Aparatur Sipil Negara dan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga dan mengimplementasikan core value Aparatur Sipil Negara dan budaya kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tugas terkait pengawasan Obat dan Makanan.

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU RAIH PENGHARGAAN STAND FAVORIT PADA UMKM EXPO DAN PAMERAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2025



Balai POM di Indragiri Hulu berpartisipasi dalam UMKM EXPO dan Pameran Ekonomi Kreatif Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan masyarakat dan penguatan UMKM. Atas kontribusinya, stand Balai POM berhasil meraih Penghargaan Stand Favorit yang diserahkan langsung oleh Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, kepada Kepala Balai POM di Indragiri Hulu, Veramika Ginting, S.Si., Apt., M.H. Penghargaan ini diberikan atas penilaian bahwa stand Balai POM paling informatif, edukatif, dan komunikatif dalam menyampaikan pesan keamanan obat, makanan, dan kosmetik.

Melalui layanan konsultasi, penyuluhan interaktif, fasilitasi registrasi produk, serta pengaduan masyarakat yang dikemas dengan kegiatan edukatif dan games menarik, Balai POM mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan legalitas produk. Pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi dan edukasi, serta memperkuat komitmen dalam mendukung terwujudnya produk obat, makanan, dan kosmetik yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

TERBAIK I KATEGORI BALAI DENGAN PENGGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN


BADAN POM

SERTIFIKAT

KP.09.04.61.06.25.53

DIBERIKAN KEPADA

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU

SEBAGAI

BALAI TERBAIK 1

PADA KATEGORI PENGGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

DIBERIKAN PADA FORUM KOMUNIKASI PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

"PENGUATAN STRATEGI CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DALAM UPAYA MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT"

30 JUNI 2025

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM

Balai POM di Indragiri Hulu kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Balai Terbaik I pada Kategori Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan

Makanan. Penghargaan ini diberikan dalam Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan dengan tema “Penguatan Strategi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan dalam Upaya Melindungi Kesehatan Masyarakat” pada 30 Juni 2025. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Balai POM di Indragiri Hulu dalam membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna memperkuat upaya pencegahan kejahatan di bidang obat dan makanan.

Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi penggalangan pemangku kepentingan yang telah dilaksanakan, mulai dari koordinasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga berbagai elemen masyarakat. Melalui kolaborasi yang solid dan berkelanjutan, Balai POM di Indragiri Hulu terus memperkuat peran pengawasan serta mendorong terciptanya sistem pencegahan yang responsif dan terintegrasi. Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melindungi masyarakat dari risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

PERINGKAT III KATEGORI SATUAN KERJA LOKA POM ATAS KINERJA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan piagam penghargaan yang diterima, Loka POM di Indragiri Hulu meraih Peringkat III Kategori Satuan Kerja Loka POM atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 101,05. Penghargaan yang diberikan oleh Kepala Badan POM RI ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mencerminkan komitmen organisasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.


PIAGAM PENGHARGAAN

BADAN POM

Diberikan Kepada

Loka POM Indragiri Hulu

Peringkat III
Kategori: Satuan Kerja Loka POM

Atas Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2024
Dengan Nilai Kinerja Anggaran 101,05

Kepala Badan POM RI

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU TERIMA PENGHARGAAN DARI KPPN RENGAT


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 017/KPN.0403/PIAGAM/2025

diberikan kepada:

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (690484)

sebagai

PERINGKAT PERTAMA

KATEGORI CAPAIAN ATAS BELANJA DENGAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) TAHUN 2024

Rengat, 11 Juni 2025
Kepala KPPN Rengat

Ditandatangani secara elektronik
Nanang Heru Setyo Purdianto


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 006/KPN.0403/PIAGAM/2025

diberikan kepada:

LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU (690484)

sebagai

PERINGKAT PERTAMA

KATEGORI IKPA PAGU SEDANG 5-10 MILYAR DENGAN NILAI CAPAIAN SEBESAR 100

Rengat, 11 Juni 2025
Kepala KPPN Rengat

Ditandatangani secara elektronik
Nanang Heru Setyo Purdianto

Pada tanggal 11 Juni 2025 Balai POM di Indragiri Hulu menerima Penghargaan Treasury Award oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Rengat. Balai POM di Indragiri Hulu menerima 2 penghargaan yaitu Peringkat Pertama dengan kategori Pagu Sedang 5 – 10 Milyar dengan Nilai Capaian sebesar 100 dan Peringkat Pertama dengan kategori Capaian Atas Belanja dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2024. Penghargaan ini diharapkan menjadi peningkat motivasi untuk dapat melakukan pengelolaan penggunaan APBN dengan lebih baik dan efisien.

BALAI POM DI INDRAGIRI HULU TERIMA PENGHARGAAN DARI KPKNL PEKANBARU


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

Loka Pom Kabupaten Indragiri Hulu

SATUAN KERJA DENGAN BMN KURANG DARI 5000 NUP

sebagai

TERBAIK II

KATEGORI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pekanbaru, 7 Agustus 2025
Kepala KPKNL Pekanbaru

MAULINA PAHMILITA

Santun - Amanah - Unggul - Dinamis - Empati - Ramah

Pada tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sebagai Terbaik II Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara Tahun 2024. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen bahwa Balai POM di Indragiri Hulu dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang luas bagi pihak internal maupun pelanggan sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik khususnya di bidang Obat dan Makanan.

RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
BAB I **18**
PENDAHULUAN **18**
1.1 Latar Belakang 18
1.2 Gambaran Umum Organisasi 19
1.3 Struktur Organisasi 21
1.4 Isu Strategis 25
BAB II **26**
PERENCANAAN KINERJA **26**
2.1 Uraian Singkat Renstra 26
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 29
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 32
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Rapk) 36
2.5. Metode Pengukuran 40
BAB III **50**
AKUNTABILITAS KINERJA **50**
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 50
CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II 1
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu 1
3.1.5. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V 1
3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI 1
3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII 1
3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan selama Tahun 2025, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025–2029. Dalam menjalankan perannya, Balai POM di Indragiri Hulu menghadapi berbagai tantangan strategis, antara lain luasnya wilayah kerja yang mencakup tiga kabupaten, perkembangan distribusi produk secara daring, potensi peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Kondisi tersebut menuntut penguatan sistem pengawasan yang komprehensif, berbasis risiko, serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik guna menjamin perlindungan kesehatan masyarakat.

Keberadaan Balai POM di Indragiri Hulu menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan Kinerja ini disusun untuk menyajikan capaian sasaran strategis, analisis perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja, serta keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil yang diperoleh. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi dalam mengidentifikasi kesenjangan kinerja (performance gap) dan mendorong perbaikan berkelanjutan agar organisasi dapat beroperasi secara lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional serta/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT berperan sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai POM di Indragiri Hulu merupakan hasil perubahan nomenklatur dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada periode Juni 2018 hingga Oktober 2022, Loka POM tersebut berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja.

Selanjutnya, terjadi perubahan pertama sebagai dampak perpindahan lokasi kedudukan serta penambahan wilayah kerja menjadi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada periode November 2022 sampai dengan Desember 2024, Loka POM berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Perubahan kedua terjadi sebagai bagian dari penguatan kelembagaan melalui peningkatan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis menjadi Balai POM di Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sejak Januari 2025 hingga saat ini, Balai POM di Indragiri Hulu tetap berkedudukan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai unit kerja mandiri mulai dilaksanakan pada periode 2022–2024 saat berstatus sebagai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan pada periode sebelumnya unit kerja tersebut masih berada di bawah koordinasi Balai Besar POM di Pekanbaru.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan kedudukan, tugas, dan fungsi UPT BPOM diatur melalui Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM. Balai POM di Indragiri Hulu yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM,

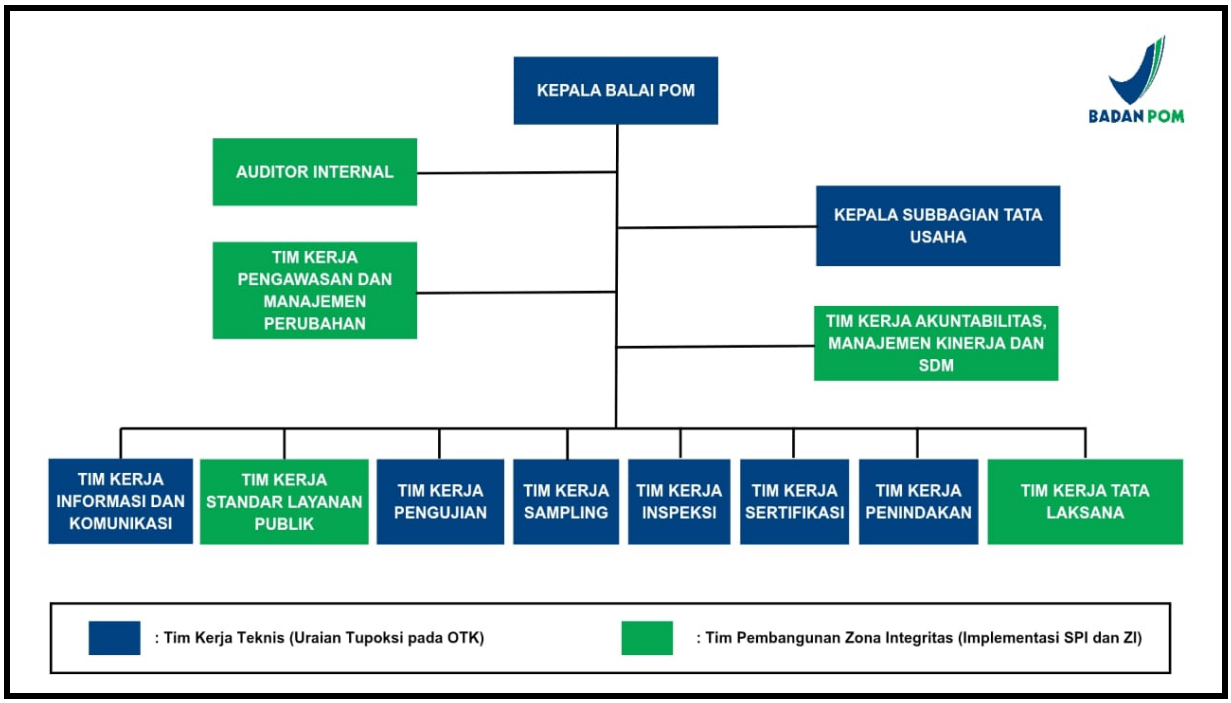
yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama, serta berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Koordinator UPT BPOM Tingkat Provinsi yaitu Balai Besar POM di Pekanbaru. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Indragiri Hulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi sediaan farmasi dan makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi dan makanan serta sertifikasi fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi sediaan farmasi dan makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) sediaan farmasi dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan sediaan farmasi dan makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin sediaan farmasi dan makanan.
8. Pelaksanaan pengujian sediaan farmasi dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran sediaan farmasi dan makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi Balai POM di Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

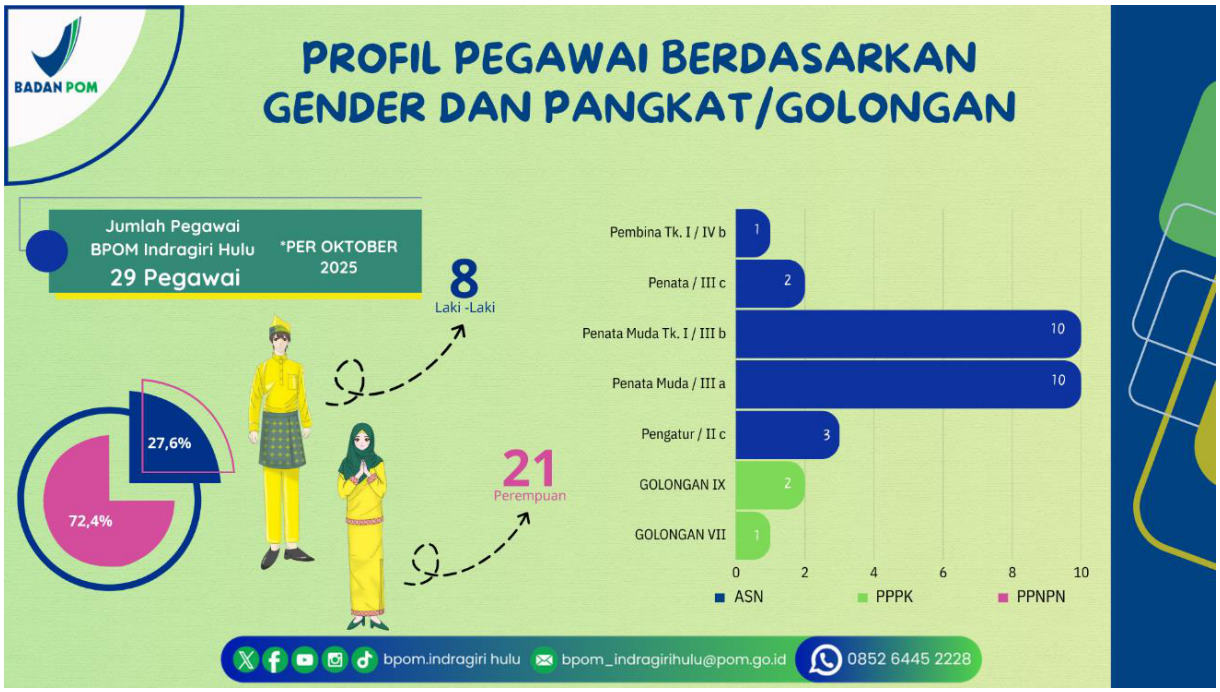
Struktur organisasi Balai POM di Indragiri Hulu dipimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Balai didukung oleh Auditor Internal yang berperan dalam pengawasan intern serta penguatan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), serta Tim Kerja Pengawasan dan Manajemen Perubahan yang mendukung implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola organisasi.

Di bawah koordinasi Kepala Balai terdapat Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran; pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; urusan kepegawaian; tata laksana; kearsipan; tata persuratan; kerumahtanggaan; serta administrasi penjaminan mutu. Subbagian Tata Usaha juga didukung oleh Tim Kerja Akuntabilitas, Manajemen Kinerja, dan SDM dalam rangka penguatan SAKIP, manajemen risiko, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pelaksanaan tugas teknis operasional pengawasan dilaksanakan melalui Tim Kerja Teknis, yang meliputi:

- Tim Kerja Informasi dan Komunikasi
- Tim Kerja Standar Layanan Publik

- Tim Kerja Pengujian
- Tim Kerja Sampling
- Tim Kerja Inspeksi
- Tim Kerja Sertifikasi
- Tim Kerja Penindakan
- Tim Kerja Tata Laksana

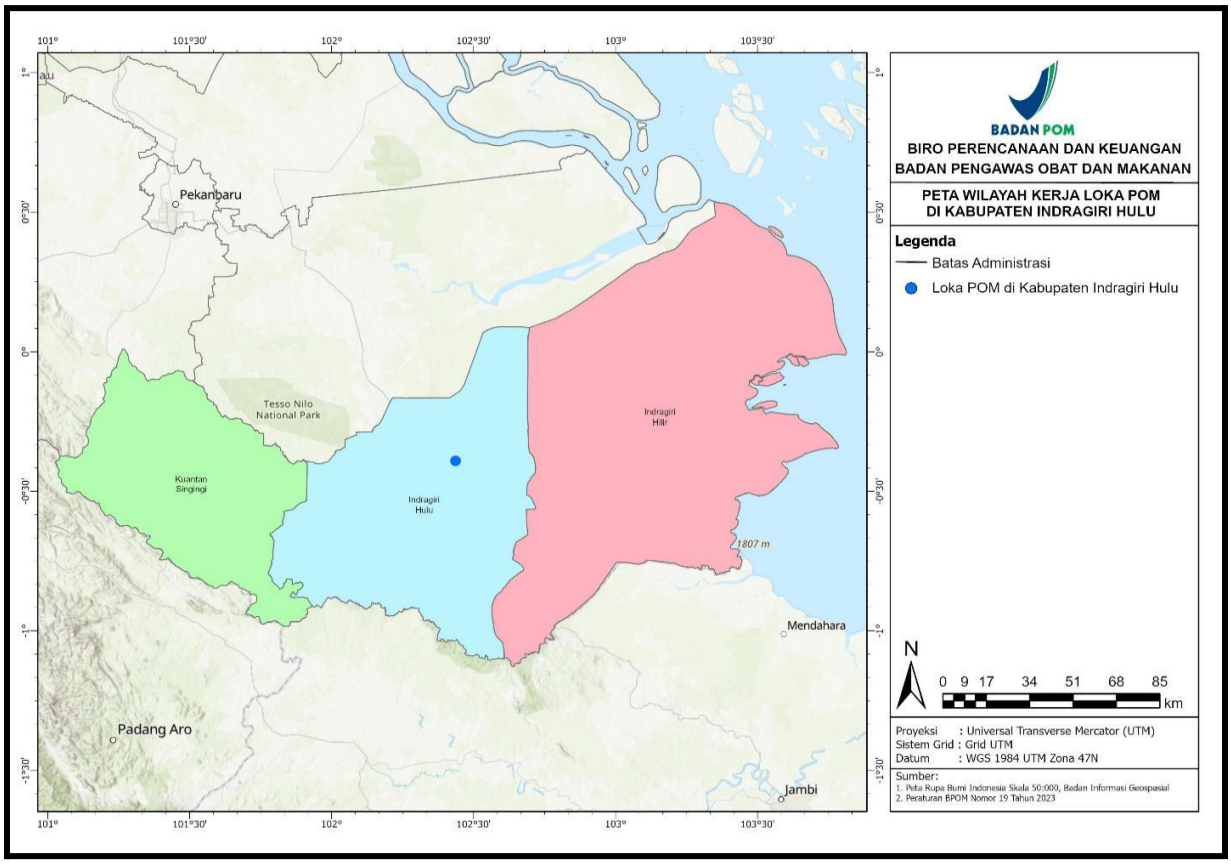




Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Balai POM di Indragiri Hulu

Tim kerja teknis tersebut melaksanakan fungsi pengawasan pre-market dan post-market, pelayanan publik, pengujian laboratorium, inspeksi sarana produksi dan distribusi, sertifikasi, penindakan pelanggaran, serta dukungan tata kelola operasional sesuai dengan ketentuan organisasi dan tata kerja yang berlaku.

Balai POM di Indragiri Hulu yang merupakan 1 dari 3 UPT BPOM di Provinsi Riau, memiliki wilayah kerja 3 dari 12 kabupaten/kota atau 25% wilayah yang ada di Provinsi Riau, terdiri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kondisi geografis berupa daratan dan perairan menjadi suatu tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu. Peta wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya tidak dapat dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, konsumen, media (penta helix). Balai POM di Indragiri Hulu berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM)

dengan melibatkan penta helix agar efektifnya memberikan perlindungan kesehatan sehingga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Selain itu, dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang berfokus pada implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penguatan budaya integritas di lingkungan Balai POM di Indragiri Hulu.

Secara keseluruhan, struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika tantangan di wilayah kerja.

1.4 Isu Strategis

1. **Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
   Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Obat dan Makanan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dan makanan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk dan sarana yang tidak berizin.
2. **Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline**
   Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik online maupun offline.
3. **Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM**
   BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat dan makanan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

4. **Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
   Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.
5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
   BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.
6. **Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan,dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
   BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. **Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
   BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Balai POM di Indragiri Hulu menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan perdagangan di wilayah kerjanya yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Karakteristik wilayah yang luas, terdiri dari daerah perkotaan, perdesaan, serta kawasan perkebunan dan perairan, menuntut strategi pengawasan yang adaptif dan berbasis risiko. Selain itu, perkembangan distribusi produk melalui perdagangan elektronik (e-commerce) turut meningkatkan potensi peredaran obat dan makanan ilegal atau tidak memenuhi ketentuan, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan yang terintegrasi dan responsif.

Ke depan, Balai POM di Indragiri Hulu juga dihadapkan pada pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan olahan serta meningkatnya peredaran produk pangan lokal dan olahan rumah tangga. Kondisi ini membawa peluang peningkatan ekonomi daerah, namun sekaligus meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan legalitas produk. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, pembinaan yang berkelanjutan, serta sinergi lintas sektor guna memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi, melindungi kesehatan masyarakat, dan mendukung daya saing produk lokal di wilayah Indragiri Hulu dan sekitarnya.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis dalam merespons tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin kompleks di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Renstra ini tidak hanya disusun untuk menjawab permasalahan aktual, tetapi juga sebagai instrumen antisipatif terhadap dinamika perkembangan sektor sediaan farmasi dan pangan olahan yang terus berkembang, termasuk peningkatan distribusi melalui platform digital serta pertumbuhan pelaku usaha lokal. Melalui perencanaan yang terarah, terukur, dan berbasis risiko, Balai POM di Indragiri Hulu berkomitmen untuk memperkuat efektivitas pengawasan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

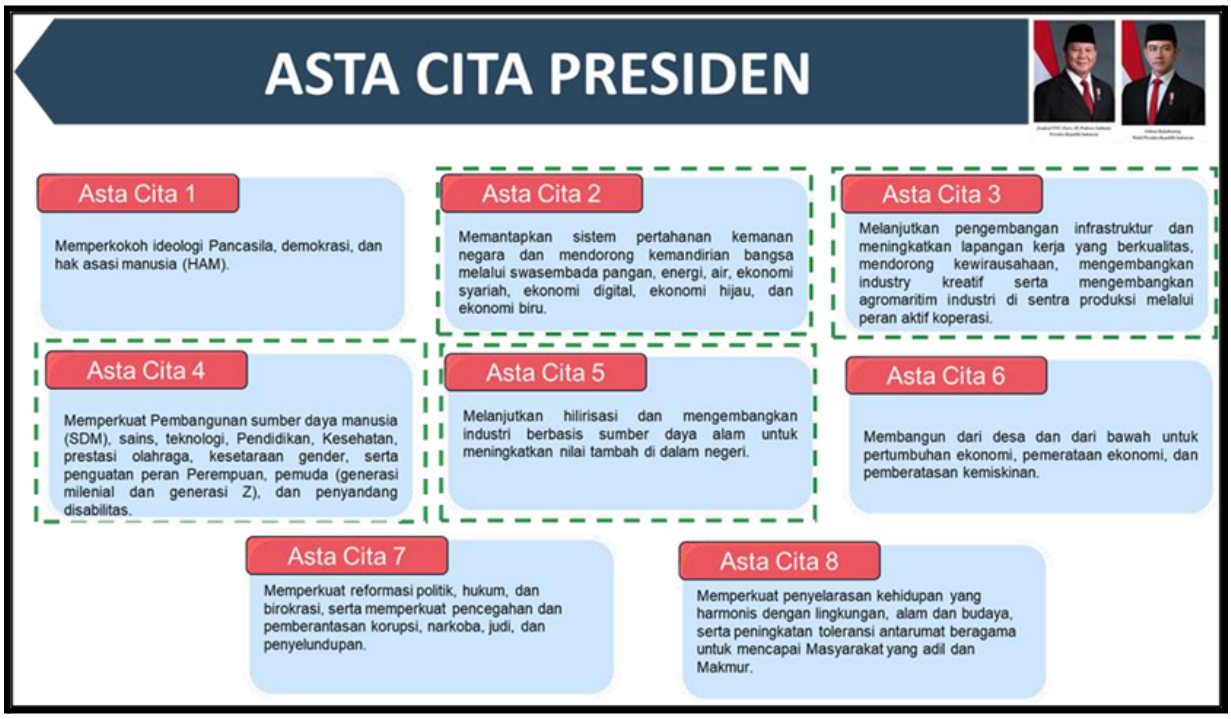
Dengan implementasi strategi yang komprehensif dan inovatif, Balai POM di Indragiri Hulu optimis dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan secara adaptif dan profesional. Upaya ini diarahkan untuk memastikan masyarakat di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan. Selain itu, Renstra ini menjadi landasan dalam memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan

gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Indragiri Hulu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Indragiri Hulu. Sasaran strategis Balai POM di Indragiri Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
4. Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Layanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif

2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Balai POM di Indragiri Hulu untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan operasional kegiatan tahunan. RKT meliputi sasaran strategis, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai POM di Indragiri Hulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu HK.02.02.7C.09.24.47 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu Tahun 2025. RKT 2025 merupakan penjabaran dari target Renstra 2022-2024. RKT disusun dengan tujuan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan bagi Balai POM di Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

RKT 2025 disusun sebelum penyusunan target Renstra 2025-2029, sehingga terdapat Sasaran Kegiatan dan IKU pada RKT 2025 yang tidak sesuai dengan PK/RAPK 2025 karena adanya.

Pada Oktober 2025 terdapat perubahan PK/RAPK untuk penyesuaian Renstra 2025-2029. Sehingga terdapat beberapa Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang mengalami perubahan.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	kerja UPT	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.3

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	1
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
		Nilai AKIP UPT BPOM	78.88
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.63
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 2.1 RKT Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan, antara lain:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada Tahun berjalan, terjadi pergantian pejabat penandatangan Perjanjian Kinerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu sebagai dampak mutasi jabatan Kepala Balai. Pergantian pejabat tersebut efektif terhitung mulai **1 Oktober 2025** sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Pergantian pejabat ini tidak mengubah substansi, target, indikator, maupun komitmen kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan rencana dan menjadi tanggung jawab pejabat Kepala Balai POM di Indragiri Hulu yang baru. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran, indikator, dan target kinerja yang tetap mengacu pada perencanaan kinerja Tahun berjalan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
			PK AWAL	PERUBAHAN PERTAMA	PERUBAHAN KEDUA

1	Meningkatnya efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	82%	85.5%
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	84%
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	100%	100%
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	91%
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti stakeholder	75%	75%	75%
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85%	85%	89%
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75%	92.75%	95.75%
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	85%	85%	91%
		11 - Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8%	88.8%	91.4%

		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar			80%
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			100%
		14 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			13 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman			33.33%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50%	50%	50%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11	11	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.19%	86.19%	86.19%
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah
		02 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa	1 Desa	1 Desa
		03 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar
5	Meningkatnya pendampingan UMKM	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	91%	91%	10%

	dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan			
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95%	95%	95%
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan standar	90%	90%	90%
8	Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05 Indeks	4.05 Indeks	4.05 Indeks
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78.38	78.38	78.38
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Skala	5 Skala	5 Skala
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.93 Indeks	2.93 Indeks	2.93 Indeks
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT (Loka)	100%	100%	100%

Tabel 2.2 PK awal, PK Perubahan Pertama dan Pk Perubahan Kedua Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 awal ditetapkan sebagai komitmen kinerja antara Kepala Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kepala Badan POM RI yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan anggaran untuk Tahun 2025. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan pengukuran kinerja organisasi. Pada tahap awal, struktur sasaran

kegiatan, indikator kinerja, serta pagu anggaran ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Kerja dan mengacu pada Renstra periode 2025–2029.

Perubahan Pertama PK Tahun 2025 dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kebijakan dan penyesuaian organisasi. Substansi perubahan meliputi penyesuaian nomenklatur satuan kerja dari Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu menjadi Balai POM di Indragiri Hulu, penyesuaian redaksional dan/atau penyempurnaan indikator kinerja, serta penyesuaian target pada beberapa indikator agar lebih selaras dengan arah kebijakan dan kondisi pelaksanaan kegiatan. Selain itu, terdapat penyesuaian alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi dan penataan kembali prioritas program, sehingga mempengaruhi distribusi dukungan anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan.

Selanjutnya, Perubahan Kedua Perjanjian Kinerja terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berdasarkan Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Rapk)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) merupakan alat ukur untuk pemantauan perjanjian kinerja tiap triwulan tahun berjalan. RAPK memuat target kinerja per bulan atau triwulan dengan anggaran per indikator kinerja.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW I	TW II	TW III	TW IV	ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82	82	85	85	Rp48,205,500
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	84	84	Rp86,160,900
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	Rp12,308,700

		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	91	91	Rp12,308,700
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	75	75	75	75	Rp20,175,000
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			100	100	Rp20,175,000
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	89	89	Rp20,175,000
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.75	92.75	95.75	95.75	Rp61,330,500
		Persentase Sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91	91	Rp122,661,000
		Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8	88.8	91.4	91.4	Rp20,175,000
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar			80	80	Rp48,205,500

		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				100	Rp61,330,500
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.4	9.6	12	13	Rp76,180,000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				33.33	Rp12,308,700
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	50	50	Rp640,000
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektifitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.19	86.19	86.19	86.19	Rp107,916,000
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		0.25	75	1	Rp78,726,000
		Jumlah Desa Pangan Aman		0.25	50	1	Rp152,589,000
		Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		0.5	1	1	Rp100,386,000
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	10	70	95	10	Rp31,500,00

6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan dibidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		85	95	95	Rp107,821,000
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar	50	50	50	90	Rp89,559,000
8	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				4.05	Rp48,671,000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM				78.38	Rp171,066,350
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	Rp171,066,350
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.93	Rp146,628,300

Tabel 2.3 RAPK Perubahan Ketiga Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

Terjadi Perubahan RAPK Terhadap Target dan penambahan 3 IKU yaitu Persentase pemenuhan target pengendalian AMR, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman berdasarkan Nota Dinas No : PR.07.2.08.25.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 Tanggal : 14 Agustus 2025. Perubahan RAPK terbaru terlampir pada lampiran 2.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit

kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu:

1. Syarat Pengukuran Kinerja:
    a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
    b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
    c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
    d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja meliputi :
        1) Nama Indikator Kinerja;
        2) Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan;
        3) Satuan Pengukuran;
        4) Metode cascading;
        5) Penanggung Jawab Data;
        6) Polaritas/Klasifikasi (maximize, minimize, stabilize);
        7) Definisi Indikator Kinerja;
        8) Sumber data, termasuk didalamnya proses memperoleh data, misalnya diunduh langsung dari aplikasi atau direkap secara manual, dilakukan cleansing data atau tidak, dll;
        9) Formula/cara perhitungan;
        10) Frekuensi Pengukuran
    e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
    f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
    g. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
    h. Dukungan sistem informasi

2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja
    a. Pemilik data melakukan pengumpulan data sesuai dengan jenis data.
    b. Penanggung jawab data mengumpulkan data kinerja dan melakukan verifikasi data kinerja. Verifikasi data kinerja dapat dilakukan pada saat rapat evaluasi internal atau dengan mekanisme lain yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala unit kerja. Apabila berdasarkan hasil verifikasi terjadi kesalahan penggunaan data, cara perhitungan dan hasil capaian kinerja maka penanggung jawab data mengembalikan data kepada pemilik data.
    c. Penanggung jawab data melaporkan data kinerja sesuai dengan pedoman.
    d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada Penanggung Jawab Data. Mekanisme perbaikan data kinerja agar ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.

3. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

4. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada TRIWULAN III tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut

1) **Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (Raw Data) dengan tertib**

Data mentah realisasi merupakan sekumpulan data perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran indikator kinerja, yang dapat berasal dari aplikasi internal BPOM dan formula perhitungan berdasarkan manual indikator kinerja. Data tersebut

diolah untuk memperoleh data realisasi Indikator Kinerja sesuai formula dalam manual indikator kinerja.

2) **Menghitung Realisasi Indikator Kinerja**

Realisasi indikator kinerja merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual indikator kinerja. Penghitungan realisasi indikator kinerja harus memperhatikan:

a) Periode perhitungan indikator kinerja (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan).

b) Apabila periode pelaporan indikator kinerja belum jatuh tempo atau data realisasinya belum tersedia pada periode tersebut, maka realisasi indikator kinerja dianggap tidak tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Dalam pelaporan, hal ini harus disertai dengan penjelasan.

3) **Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu ePerformance**

Penginputan data realisasi indikator kinerja dilakukan oleh penanggung jawab data masing-masing unit kerja (sesuai SK penanggung jawab data) paling lambat tanggal 10 tiap bulannya. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.

4) **Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:**

a) valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;

b) reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan

c) obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan.

5) **Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS.**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

1) **Jenis Nilai Kinerja Organisasi**

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai

Contoh perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1					186,52%	110%
2					194,82%	110%
3					83,33%	83,33%
4					N/A	-
5					105,08%	105,08%
6					112,01%	110%
Total Capaian PK (4)						518,41%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)						=(518,41%/5) =103,68%
Predikat NKO (6)						Istimewa

b) NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

(1) Capaian Perjanjian Kinerja

Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

(2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian

PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah

Matriks perhitungan NKO tahunan adalah sebagai berikut:

Matriks NKO

No	Sasaran	Indiktor Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Keterangan:

(a) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin 2. Capaian Indikator Kinerja

(b) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.



Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut.

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(3) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja

Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 1) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 2), dikalikan 100.

Nilai Akhir: {(1)x[(100%-(2)]x100)

(4) Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 3) pada setiap indikator kinerja.

(5) Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).

2) Predikat NKO

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Adapun metode pengukuran terhadap analisis akuntabilitas kinerja yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan anggaran (input) yang lebih sedikit dalam menghasilkan capaian kinerja (output) yang sama atau lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input, sesuai rumus:

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ Capaian Output}{\%\ \mathbf{Capaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{\mathbf{100\ \%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Sedangkan untuk mengetahui Standar Efisiensi (SE) yang dapat digunakan sebagai angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi, dapat diperoleh dengan membandingkan persentase rencana capaian output terhadap persentase rencana capaian input dengan nilai SE = 1 yang diperoleh dengan rumus :

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ capaian\ output}{\%\ Rencana\ capaian\ input} x\ 100\ \% = \frac{100}{100}\ x\ 100\% = 1$$

Untuk mengetahui efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), mengikuti formula logika:

Jika IE ≥ SE : kegiatan efisien

Apabila IE < SE : kegiatan tidak efisien

Selanjutnya masing-masing kegiatan diukur Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan dengan menggunakan rumus berikut :

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

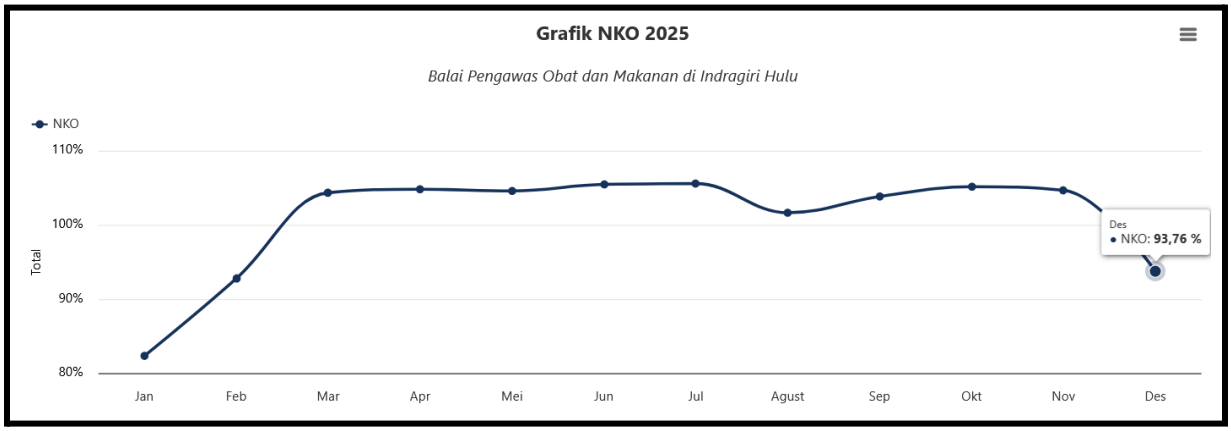
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahunan terdiri atas dua komponen utama, yaitu capaian Perjanjian Kinerja (PK) yang mencerminkan hasil pengukuran kinerja unit kerja setiap tahun, serta hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB maupun evaluator internal.

Pada Tahun 2025, terdapat 27 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu memperoleh predikat "BB", sehingga harus dilakukan koreksi normalisasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja sebesar 10%. Perhitungan NKO Tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu disajikan pada tabel berikut.

No.	Sasaran Strategis	Capaian tahun 2025 (%)	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	105,78%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	110,00%	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,31%	Sangat Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00%	Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	105,26%	Sangat Baik
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	108,80%	Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang prima	110,00%	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	99,12%	Baik

Tabel 3.1 Capaian per Sasaran Strategis Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025



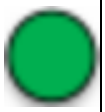
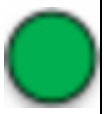
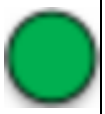
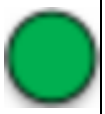
Gambar 3.1 Grafik NKO Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

Balai POM di Indragiri Hulu memiliki 8 Sasaran Strategis yang diukur capaiannya pada akhir tahun 2025. Dari kedelapan sasaran tersebut, 6 Sasaran Strategis mencapai kategori SANGAT BAIK, 2 Sasaran Strategis mencapai kategori BAIK, dan tidak terdapat sasaran dengan kategori lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai NKO (Nilai Kinerja Organisasi) Balai POM di Indragiri Hulu diperoleh sebesar 93,76% dengan kategori BAIK. Adapun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 8 sasaran strategis dan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Bersangkutan

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)					Kategori Terhadap Target			
			Target 2027	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	%Capaian	Kategori/Keterangan	Notifikasi	Kategori	Notifikasi
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,80	85,50	99,15	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,00	84,00	89,26	106,26%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	

1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79,00	75,00	95,21	126,95%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92,00	89,00	100,00	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,25	95,75	100,00	104,44%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,00	91,00	99,81	109,68%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	93,80	91,40	99,88	109,28%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	82,00	80,00	100,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	100,00	105,60	105,60%	Sangat Baik		Akan Tercapai	

1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9,00	13,00	24,48	188,31%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	33,33	28,60	85,81%	Cukup		Akan Tercapai	
2-1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	50,00	100,00	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
4-1	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	97,92	86,19	87,25	101,23%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
4-2		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	3,00	1,00	1,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	
4-3		Jumlah desa pangan aman	2,00	1,00	1,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	
4-4		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	1,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	
5-1	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	36,67	10,00	10,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	

6-1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	97,00	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
7-1	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	92,00	90,00	97,92	108,80%	Sangat Baik		Akan Tercapai	
8-1	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,25	4,05	4,67	115,31%	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/ Melampaui	
9-2	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	79,37	78,38	78,02	99,54%	Baik		Akan Tercapai	
9-3		Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	5,00	5,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	
9-4		Indeks Manajemen Risiko UPT	2,98	2,93	2,84	96,93%	Baik		Akan Tercapai	
9-5		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	-	100,00	100,00	100,00%	Baik		Akan Tercapai	

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator terhadap Target Tahun 2025 dan dengan Target Renstra Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu dengan Cluster 3 UPT POM Pembanding

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)					Kategori Terhadap Target	
			UPT	Target 2025	Realisasi TW IV	%Capaian thd Target TW III	Kategori/Keterangan	Notifikasi
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	85,50	99,15	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	82,50	95,64	115,93%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	82,00	95,33	116,26	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Bau-Bau	82,75	99,88	120,70%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	84,00	89,26	106,26%	Sangat Baik	
			Dumai	85,00	98,86	116,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	75,00	92,96	123,95	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Bau-Bau	75,00	95,54	127,39%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00%	Baik	
			Dumai	100,00	100,00	100,00%	Baik	
			Ende	100,00	100,00	100	Baik	
			Bau-Bau	100,00	0,00	0,00%	Kurang	
1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	91,00	100,00	109,89%	Sangat Baik	
			Dumai	85,00	80,00	94,12%	Baik	
			Ende	85,00	98,57	115,96	Tidak Dapat Disimpulkan	

			Bau-Bau	85,00	98,33	115,68%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Indragiri Hulu	75,00	95,21	126,95%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	94,06	100,00	106,32%	Sangat Baik	
			Ende	83,00	83,61	100,73	Sangat Baik	
			Bau-Bau	93,80	97,86	104,33%	Sangat Baik	
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00%	Baik	
			Dumai	90,00	100,00	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	95,00	100,00	105,26	Sangat Baik	
			Bau-Bau	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik	
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	89,00	100,00	112,36%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	90,00	100,00	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	90,00	100,00	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Bau-Bau	85,00	100,00	117,65%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	95,75	100,00	104,44%	Sangat Baik	
			Dumai	93,38	98,91	105,92%	Sangat Baik	
			Ende	92,25	99,59	107,96	Sangat Baik	
			Bau-Bau	91,25	100,00	109,59%	Sangat Baik	
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	91,00	99,81	109,68%	Sangat Baik	
			Dumai	85,00	99,53	117,09%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	75,00	100,00	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	

			Bau-Bau	75,00	100,00	133,33%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	91,40	99,88	109,28%	Sangat Baik	
			Dumai	88,82	99,79	112,35%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	75,00	100,00	133,33	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Bau-Bau	90,80	99,93	110,06%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Indragiri Hulu	80,00	100,00	125,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	90,00	98,21	109,12%	Sangat Baik	
			Ende	80,00	85,10	106,38	Sangat Baik	
			Bau-Bau	91,00	114,29	125,59%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Indragiri Hulu	100,00	105,60	105,60%	Sangat Baik	
			Dumai	100,00	106,57	106,57%	Sangat Baik	
			Ende	100,00	105,88	105,88	Sangat Baik	
			Bau-Bau	100,00	106,25	106,25%	Sangat Baik	
1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Indragiri Hulu	13,00	24,48	188,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	13,40	14,28	106,57%	Sangat Baik	
			Ende	58,00	61,84	106,62	Sangat Baik	
			Bau-Bau	12,00	13,67	113,92%	Tidak Dapat Disimpulkan	
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Indragiri Hulu	33,33	28,60	85,81%	Cukup	
			Dumai	33,33	33,33	100,00%	Baik	
			Ende	33,33	33,33	100,00%	Baik	

			Bau-Bau	16,67	16,67	100,00%	Baik	
2-1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Indragiri Hulu	50,00	100,00	200,00%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	60,00	60,00	100,00%	Baik	
			Ende	100,00	100,00	100,00%	Baik	
			Bau-Bau	75,00	75,00	100,00%	Baik	
4-1	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indragiri Hulu	86,19	87,25	101,23%	Sangat Baik	
			Dumai	85,83	86,04	100,24%	Sangat Baik	
			Ende	86,10	87,03	101,08	Sangat Baik	
			Bau-Bau	88,45	92,12	104,15%	Sangat Baik	
4-2		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Indragiri Hulu	1,00	1,00	100,00%	Baik	
			Dumai	2,00	2,00	100,00%	Baik	
			Ende	2,00	1,00	50	Kurang	
			Bau-Bau	2,00	1,00	50,00%	Kurang	
4-3		Jumlah desa pangan aman	Indragiri Hulu	1,00	1,00	100,00%	Baik	
			Dumai	1,00	1,00	100,00%	Baik	
			Ende	1,00	1,00	100,00%	Baik	
			Bau-Bau	1,00	1,00	100,00%	Baik	
4-4		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Indragiri Hulu	1,00	1,00	100,00%	Baik	
			Dumai	1,00	1,00	100,00%	Baik	
			Ende	1,00	1,00	100,00%	Baik	

			Bau-Bau	1,00	1,00	100,00%	Baik	
5-1	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Indragiri Hulu	10,00	10,00	100,00%	Baik	
			Dumai	8,00	8,00	100,00%	Baik	
			Ende	16,00	16,00	100,00%	Baik	
			Bau-Bau	13,33	30,00	225,06%	Tidak Dapat Disimpulkan	
6-1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indragiri Hulu	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik	
			Dumai	95,00	100,00	105,26%	Sangat Baik	
			Ende	93,00	100,00	107,53	Sangat Baik	
			Bau-Bau	93,00	100,00	107,53%	Sangat Baik	
7-1	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	Indragiri Hulu	90,00	97,92	108,80%	Sangat Baik	
			Dumai	90,00	100,00	111,11%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	90,00	100,00	111,11	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Bau-Bau	90,00	97,22	108,02%	Sangat Baik	
8-1	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Indragiri Hulu	4,05	4,67	115,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Dumai	3,75	4,54	121,07%	Tidak Dapat Disimpulkan	
			Ende	4,40	4,76	108,18	Sangat Baik	
			Bau-Bau	4,51	4,6	102,00%	Sangat Baik	
9-2	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	Indragiri Hulu	78,38	78,02	99,54%	Baik	
			Dumai	78,00	77,26	99,05%	Baik	

			Ende	78,30	77,57	99,07	Baik	
			Bau-Bau	78,75	75,40	95,75%	Baik	
9-3		Nilai Kinerja Anggaran UPT	Indragiri Hulu	5,00	5,00	100,00%	Baik	
			Dumai	5,00	5,00	100,00%	Baik	
			Ende	5,00	4,00	80	Cukup	
			Bau-Bau	5,00	5,00	100,00%	Baik	
9-4		Indeks Manajemen Risiko UPT	Indragiri Hulu	2,93	2,84	96,93%	Baik	
			Dumai	2,70	2,66	98,37%	Baik	
			Ende	2,85	2,87	100,7	Sangat Baik	
			Bau-Bau	3,00	2,75	91,67%	Baik	
9-5		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	Indragiri Hulu	100,00	100,00	100,00%	Baik	
			Dumai	100	100	100,00%	Baik	
			Ende	100	100	100,00%	Baik	
			Bau-Bau	100	100	100,00%	Baik	

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 antara 4 Loka POM yang sudah ditentukan

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS SASARAN STRATEGIS 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT,

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Capaian ini didukung dari 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari capaian pada Sasaran Strategis (SS) 1 terhadap target tahun 2025 diperoleh hasil rata-rata 106,58 mendapat kriteria "Tercapai/Melampaui" Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)				Kategori Terhadap Target			
			Target 2025	Realisasi TW IV	%Capaian thd Target TW III	Kategori/Keterangan	Notifikasi	Kategori	Notifikasi
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,50	99,15	115,96 %	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/Melampaui	
1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,00	89,26	106,26 %	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00 %	Baik		Akan Tercapai	
1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89 %	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,00	95,21	126,95 %	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/Melampaui	
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 %	Baik		Akan Tercapai	
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	100,00	112,36 %	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/Melampaui	

1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100,00	104,44 %	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,81	109,68 %	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,88	109,28 %	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	100,00	125,00 %	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/Melampaui	
1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,60	105,60 %	Sangat Baik		Akan Tercapai	
1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,00	24,48	188,31 %	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/Melampaui	
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	28,60	85,81%	Cukup		Akan Tercapai	
	NILAI CAPAIAN SASARAN				114,25 %	Tidak Dapat Disimpulkan		Tercapai/Melampaui	

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

IKU 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sampling sediaan farmasi dilakukan terhadap Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling tahun 2025. Adapun

cara perhitungan persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait. Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

  Cara Perhitungan dan Formula :

  Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
  = (A + B + C + D)/ 4

  A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d
     1. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%)
     2. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %). 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)
     3. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%). 20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).
     4. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %) 20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).
     5. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

  B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2
   Keterangan:
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
   = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/di sampling dan diuji) × 100%
c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5
   a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2
      Keterangan:
      a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
      a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
   b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
      = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%
   c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%
   d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan (a1 + a2) /2
   Keterangan:
   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%
   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%
b. Kesesuaian pelaksanaan sampling (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%
d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,50	99,15	115,96%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 86,36%

bila dibandingkan dengan target 85,50%, maka capaian yang diperoleh adalah 101,60% dan mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dengan rincian 219 target sampel sediaan farmasi yang terdiri atas 59 sampel obat, 51 sampel obat bahan alam dan kuasi, 14 sampel suplemen kesehatan, 95 sampel kosmetik dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
219	85.50	100,00	98,04	98,57	100,00	99,15

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Akhir Renstra	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90,50	99,15	109,56%	Tercapai/Melampaui

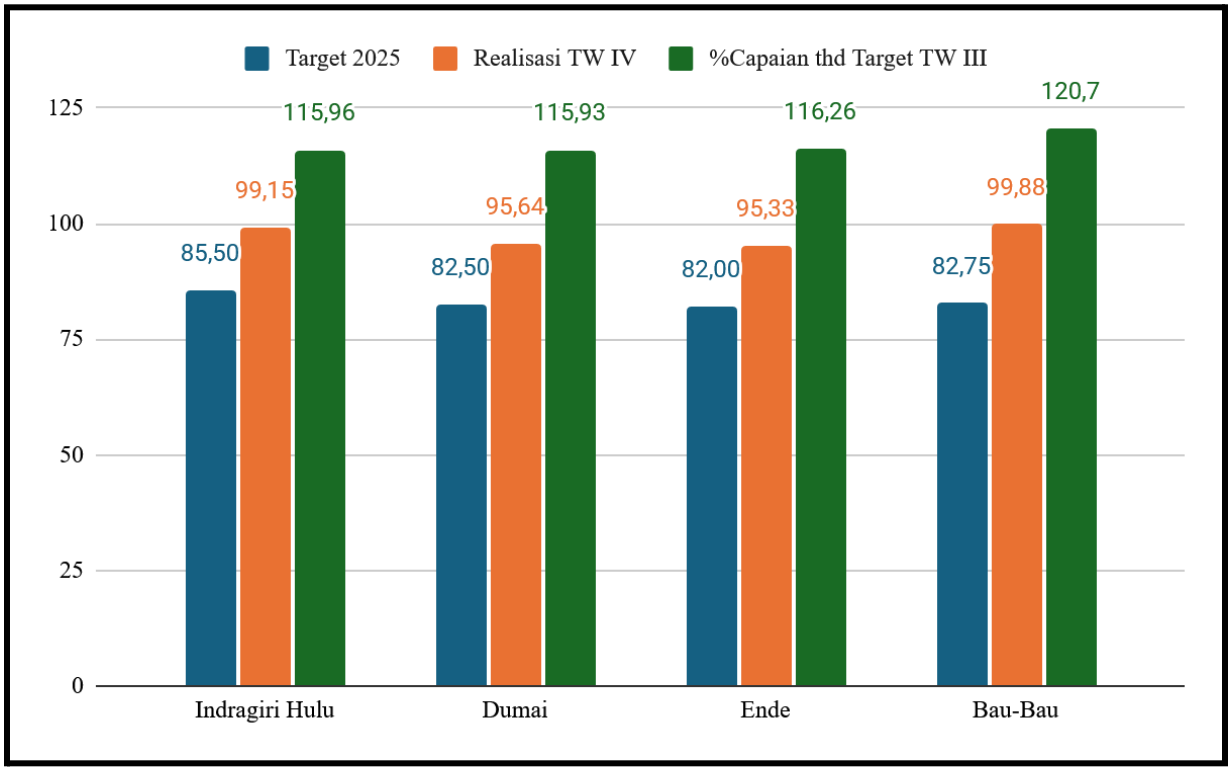
Tabel 3.6 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 99,15% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 90,50% maka capaian

yang diperoleh yaitu 109,56%. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu sampai dengan Tahun 2025 termasuk kategori akan tercapai/Melampaui.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Gambar 3.7 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan Balai Sejenis

Realisasi dan Capaian kinerja Indikator tertinggi oleh Balai POM Bau-Bau dengan Nilai 99.88. Kemudian diikuti oleh Balai POM di Indragiri Hulu dengan nilai 99,16%, Balai POM Payakumbuh dengan nilai 95,64% dan terendah Balai POM Ende yaitu 95,33%. Secara keseluruhan kriteria capaian sudah mendapatkan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian 'Tidak Dapat Disimpulkan" sampai dengan Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

A. Adanya perbedaan cara perhitungan realisasi dan capaian kinerja antara tahun ini dengan tahun sebelumnya dimana penetapan target dilakukan berdasarkan baseline tahun sebelumnya

B. Pada TW I terjadi efisiensi anggaran sehingga berdampak pada target output kegiatan di TW I. setelah itu terjadi kebijakan relaksasi anggaran pada pertengahan bulan April (masuk di TW II) dan terjadi normalisasi target output namun terdapat peningkatan target output yang signifikan dikarenakan percepatan sampling dan pengujian

C. Untuk realisasi Persentase Sampel Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdapat ketidaksesuaian pada Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan dikarenakan SIPT sampel masih berada di Balai Penguji (belum selesai uji/tidak sesuai timeline pelaporan).

D. Untuk Sampel Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan terdapat perubahan Target dan Kategori Sampling OBASK Tahun 2025 dikarenakan terdapat beberapa kategori yang tidak dapat di sampling karena keterbatasan jumlah kategori yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri	Kesulitan mencari sampel obat sesuai dengan kebutuhan rapid test	Melihat data e-was dan Koordinasi dengan APJ sarana untuk mencari item sampel obat sesuai dengan kebutuhan rapid test	Melihat data e-was dan Koordinasi dengan APJ sarana untuk mencari item sampel obat sesuai dengan kebutuhan rapid test	Sudah terlaksana	Y	O-01	Kesulitan mencari sampel obat sesuai dengan kebutuhan rapid test

	Hulu dengan Balai Sejeni							

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

BPOM di Indragiri Hulu selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan .

a. Pelaksanaan Sampling sesuai dengan perencanaan target tahunan namun terdapat beberapa revisi target dengan mempertimbangkan kapasitas pengujian pasca relaksasi anggaran
b. Pelaksanaan pengujian sesuai dengan parameter pengujian pada pedoman sampling tahun 2025
c. Adanya penyesuaian target pasca efisiensi di TW II sehingga dilakukan percepatan sampling dan pengujian.
d. Dilakukan koordinasi dengan balai regional terkait sampling, parameter pengujian dan hasil pengujian (kesimpulan akhir hasil pengujian dikembalikan ke Balai POM Indragiri Hulu sebagai Balai Penyampling)
e. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pemenuhan nilai indikator kinerja seperti kesesuaian pelaksanaan sampling, pemilihan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling, waktu pelaksanaan sampling, pengujian, dan pelaporan, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian dan penilaian penandaan, pelaporan hasil sampling dan pengujian pada SIPT hingga terkirim ke operator pusat, serta tindak lanjut hasil pengawasan sediaan farmasi sesuai dengan ketentuan.

IKU 1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
    1. kesesuaian target sampel UPT;
    2. kesesuaian parameter uji;

3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
    1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
    2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
    3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
    4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
    5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan dan Formula :

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

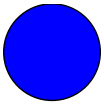
((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

% B3 =

$$\frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \text{ x } 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	84,00	89,26	106,26	Sangat Baik 

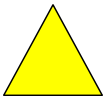
Tabel 3.8 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 89,26% bila dibandingkan dengan target 84,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 106,26% dan mendapatkan kriteria **Sangat Baik** dengan rincian 122 target sampel pangan olahan dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Reali sasi (%)
122	84,00	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	9,26%	20,00%	89,26%

Tabel 3.9 Tabel Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Akhir Renstra	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,00	89,26	97,02%	Akan tercapai 

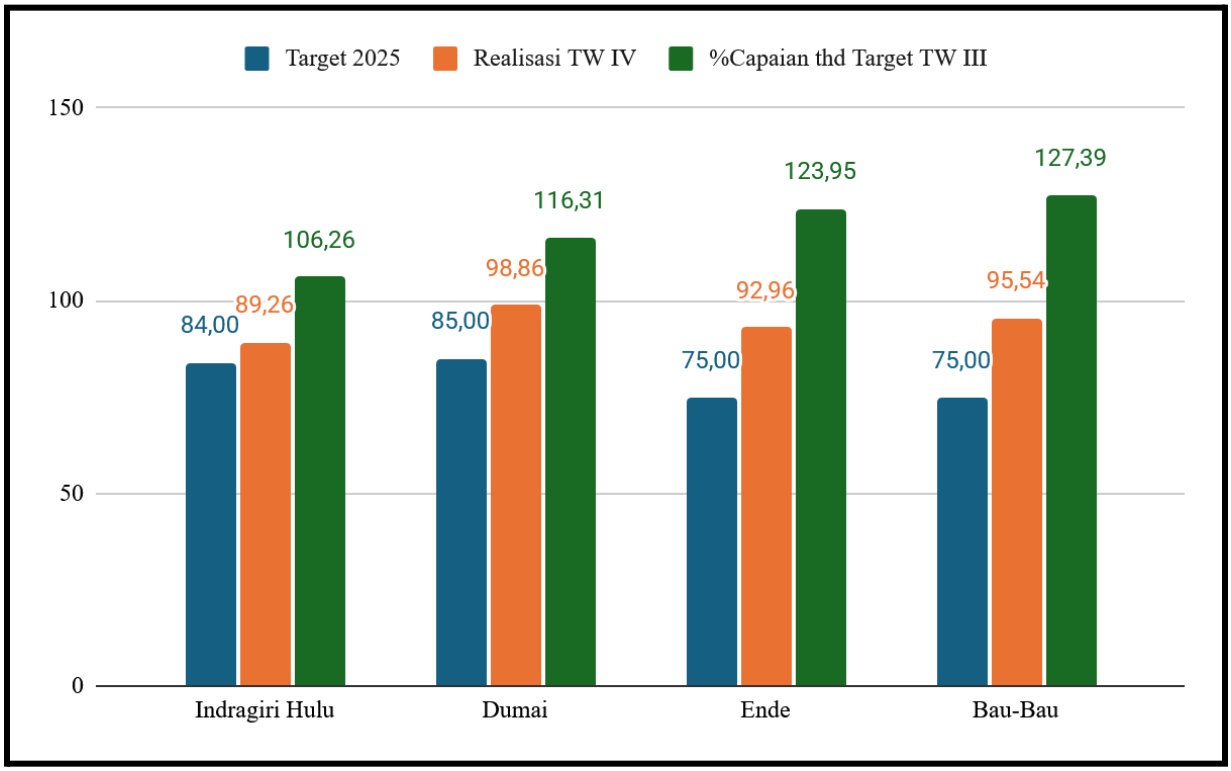
Tabel 3.10 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 terhadap Target Akhir Renstra

Realisasi kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 89,26% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 92,00% maka capaian yang diperoleh yaitu 97,02%. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu sampai dengan Tahun 2025 termasuk kategori akan tercapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Gambar 3.8 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan Balai Sejenis

Realisasi dan Capaian kinerja Indikator tertinggi oleh Balai POM Dumai dengan Nilai 98,86. Kemudian diikuti oleh Balai POM Bau-Bau dengan nilai 95,54 , Balai POM Ende dengan nilai 92,86 dan terendah Balai POM Indragiri Hulu yaitu 89,26. Secara keseluruhan kriteria capaian sudah mendapatkan kriteria “Baik”

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.**

   Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian 'Sangat Baik" sampai dengan Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

   1. Terdapat kendala dalam pelaksanaan sampling dan pengujian Pangan Olahan karena adanya kebijakan efisiensi khususnya pada komponen pengukuran Kesesuaian Target Sampel (A1) karena menggunakan target awal, sehingga terdapat perbedaan realisasi dengan target terhadap komponen tersebut
   2. Pengukuran Jumlah Sampel yang Diuji oleh Balai POM di Indragiri Hulu (A2) belum dilakukan dan penghitungannya dikecualikan, namun seharusnya penghitungannya tidak dikecualikan sesuai Manual IKU yg disampaikan oleh DitWasDarPO dan Rorenkeu pada saat desk penyusunan target Renstra pada akhir Juni 2025
   3. Terdapat 4 dari 19 sampel Juli yang diperiksa belum selesai diuji oleh Balai Penguji

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Obat dan Makanan tidak dapat disampling sesuai perencanaan	Mencari item sampel pada sarana lain hingga item tercukupi	Mencari item sampel pada sarana lain hingga item tercukupi	Sudah terlaksana	Y	O-02	Obat dan Makanan tidak dapat disampling sesuai perencanaan

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:**

   BPOM di Indragiri Hulu selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

   a. Pelaksanaan sampling dan pengujian secara konsisten meskipun terdapat kebijakan relaksasi anggaran, dengan melakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan (renlak) sejak awal tahun.

b. Koordinasi intensif dengan Balai Penguji untuk mengejar ketertinggalan realisasi kumulatif terhadap target awal serta memastikan penyelesaian pengujian sesuai Service Level Agreement (SLA).
c. Penyesuaian pengukuran indikator A2 (Jumlah Sampel yang Diuji) setelah Manual IKU diformalkan dalam Renstra UPT BPOM, sehingga definisi operasional indikator lebih selaras dengan pelaksanaan di lapangan.
d. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pemenuhan nilai indikator kinerja seperti kesesuaian pelaksanaan sampling, pemilihan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling, waktu pelaksanaan sampling, pengujian, dan pelaporan, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian dan penilaian penandaan, pelaporan hasil sampling dan pengujian pada SIPT hingga terkirim ke operator pusat, serta tindak lanjut hasil pengawasan pangan olahan sesuai dengan ketentuan.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

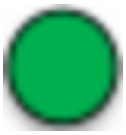
C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan :

Ada kejadian KLB KP MBG di Kabupaten Indragiri Hilir, BPOM di Indragiri Hulu sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan melakukan pemeriksaan dapur MBG. Kejadian tersebut juga sudah dilaporkan melalui SPIMKER. Rencana tindak lanjut adalah terus melakukan pemantauan terjadinya KLB Pangan, berkoordinasi dengan lintas sektor agar penanganan KLB KP lebih efektif, serta Terlibat dalam kegiatan lintas sektor dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, serta pemeriksaan fasilitas produksi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kasus KLB-KP bulan September untuk menerapkan Keamanan Pangan dalam seluruh aktivitas produksi MBG.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100%	Baik 

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2025

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian yang diperoleh adalah 100,00% dan mendapatkan kriteria Baik dengan rincian 1 kasus KLB dapat dilihat pada grafik dibawah ini;

Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian sampel dengan memperhatikan informasi penelusuran/laporan sementara/surat pengantar permintaan pengujian (Bobot 30%)	Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM (Bobot 35%)	Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP (Bobot 35%)	Realisasi (%)
1	100	30%	35%	35%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

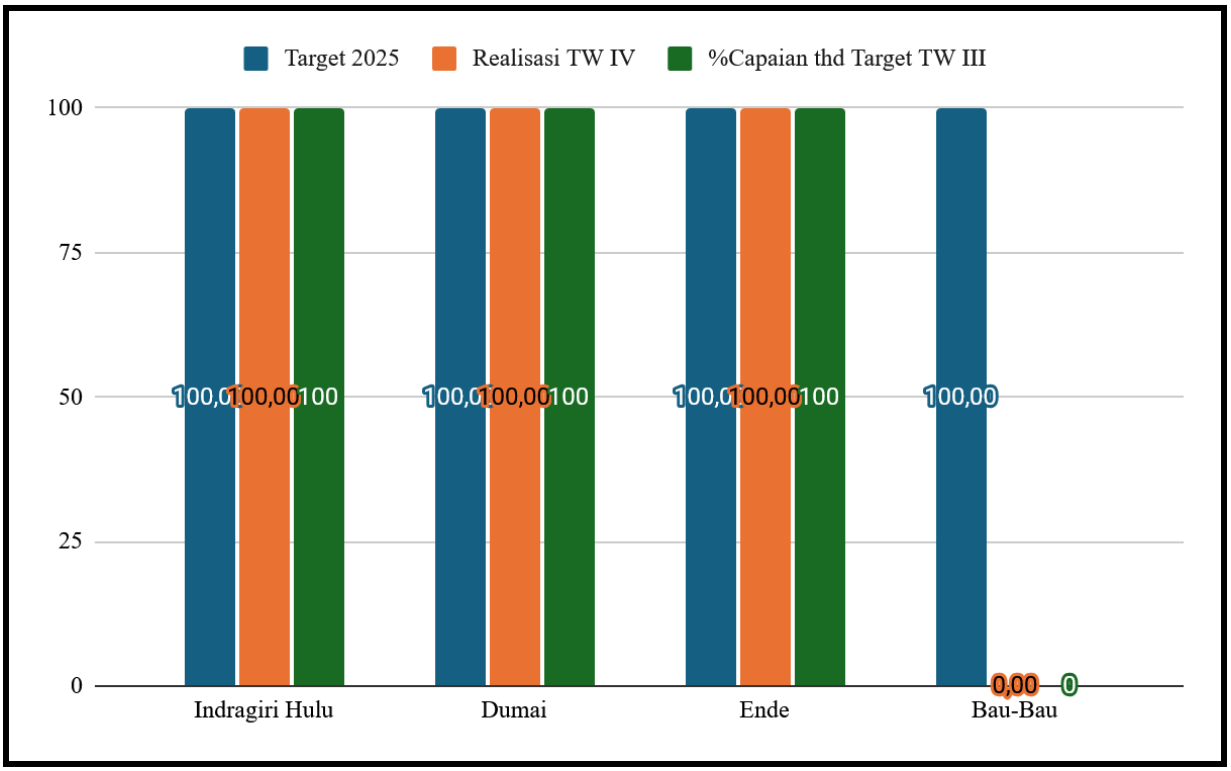
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Akhir Renstra	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI

1	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100	100	100%	Tercapai

Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 94% maka capaian yang diperoleh yaitu 100%. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu sampai dengan Tahun 2025 termasuk kategori tercapai.

Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan Capaian kinerja Indikator Untuk 3 Balai yaitu Indragiri Hulu, Dumai dan Ende sama sama 100 namun Bau-Bau tidak ada KLB di selama tahun 2025 jadi tidak ada realisasi. Secara keseluruhan kriteria capaian sudah mendapatkan kriteria “Baik”

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian ‘Baik” sampai dengan Tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan. Kegiatan monev ini rutin dilakukan oleh katim setiap akhir bulan.
2. Ikut terlibat dalam kegiatan lintas sektor dalam Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, serta pemeriksaan fasilitas produksi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang memproduksi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kasus KLB-KP bulan September untuk menerapkan Keamanan Pangan dalam seluruh aktivitas produksi MBG.
3. Aktif Berkoordinasi dengan MT Pengujian pangan di Balai Penguji untuk memastikan pengujian terhadap beberapa parameter uji kimia dapat segera dilakukan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

  Cara Perhitungan dan Formula :

  Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel PIRT
Cara Perhitungan :
(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel sesuai /Total Sampel PIRT) x 100%

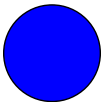
C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel diambil di TW 1 / Total Sampel PIRT) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F. Tindak Lanjut Sampel PIRT
Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.
Cara Perhitungan :
(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik 

Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100,00% bila dibandingkan dengan target 91%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,89% dan mendapatkan kriteria **sangat baik** dengan rincian 11 target sampel PIRT . Rincian capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
91	20,00%	20,00%	20,00%	10%	10%	20%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

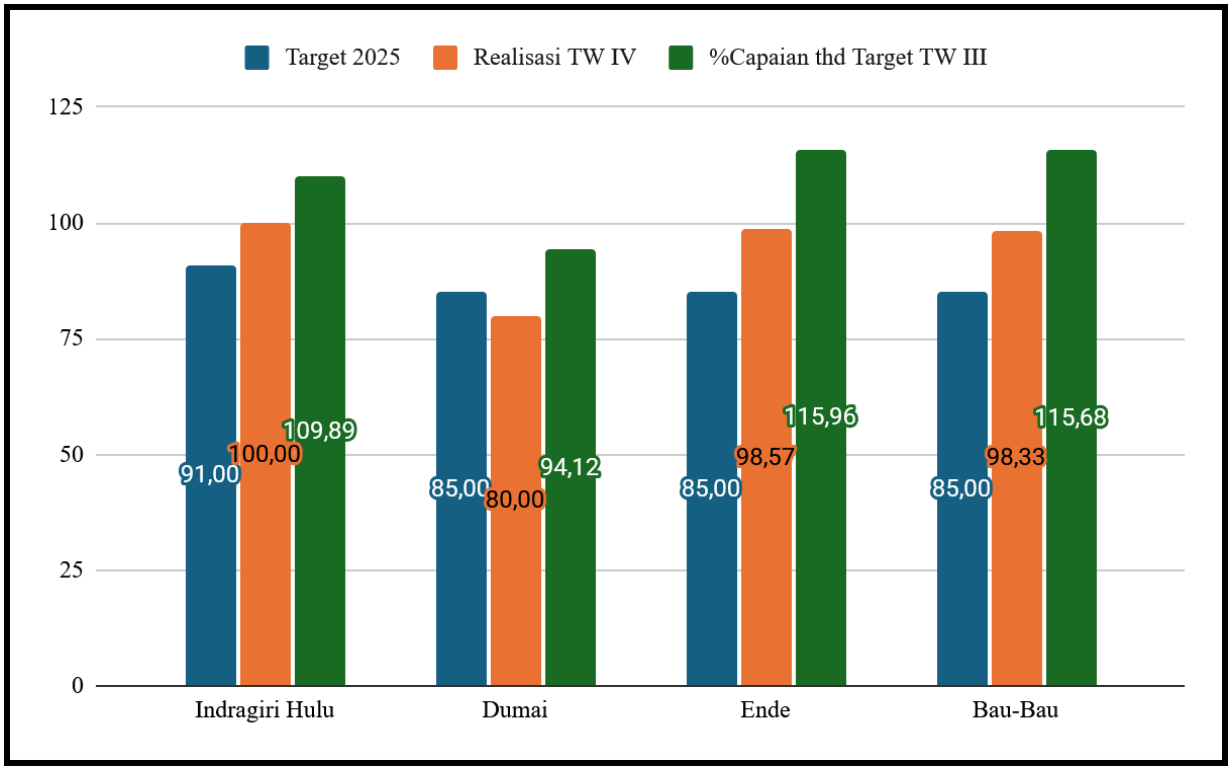
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Akhir Renstra	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	95	100	105,26%	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 95% maka capaian yang diperoleh sama yaitu 105,26%.

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu sampai dengan Tahun 2025 termasuk kategori akan tercapai.

Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Mamuju, Balai POM di Sofifi, dan Balai POM di Surakarta dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Ende dengan persentase capaian sebesar 115,96%, diikuti oleh UPT Bau-Bau sebesar 115,68%, dan UPT Indragiri Hulu sebesar 109,89%. Sementara itu, UPT Dumai memperoleh capaian sebesar 94,12%. Secara keseluruhan, mayoritas UPT telah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2025, dan berdasarkan persentase capaian tersebut kinerja indikator ini termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”, dengan tetap mendorong peningkatan pada UPT yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target optimal.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian 'Sangat Baik" sampai dengan Tahun 2025. Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dari kesesuaian target sampel yang disampling, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut sampel PIRT. Keberhasilan persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak terlepas dari perencanaan pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian tahun 2025.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak adanya dokumentasi atau laporan formal terkait penarikan hasil uji sampel PIRT yang TMS dari pelaku usaha	Membuat surat kepada pelaku usaha untuk melakukan penarikan produk dilengkapi dengan lampiran format laporan penarikan produk	Melakukan dokumentasi atau laporan formal terkait penarikan hasil uji sampel PIRT yang TMS dari pelaku usaha	Sudah terlaksana	Y	O-03	Tidak adanya dokumentasi atau laporan formal terkait penarikan hasil uji sampel PIRT yang TMS dari pelaku usaha

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

BPOM di Indragiri Hulu selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

a. Dilakukan koordinasi dengan balai regional terkait sampling, parameter pengujian dan hasil pengujian (kesimpulan akhir hasil pengujian dikembalikan ke Balai POM Indragiri Hulu sebagai Balai Penyampling)
b. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pemenuhan nilai indikator kinerja seperti kesesuaian pelaksanaan sampling, pemilihan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling, waktu pelaksanaan sampling, pengujian, dan pelaporan, ketepatan pengambilan kesimpulan hasil pengujian dan penilaian penandaan,

pelaporan hasil sampling dan pengujian pada SIPT hingga terkirim ke operator pusat, serta tindak lanjut hasil pengawasan sampel PIRT sesuai dengan ketentuan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*:

Realisasi = (A+B) / 2

A = Jml Rekomendasi yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha X 100 %
Jml Rekomendasi yang Dikirimkan ke Pelaku Usaha

B = Jml Rekomendasi yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor X 100 %
Jml Rekomendasi yang Dikirimkan ke Lintas Sektor

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada

media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

- Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	75,00	95,21	126,94	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 95,21 bila dibandingkan dengan target 75,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 126,94% dan mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dengan rincian terdapat 146 surat rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha pada tahun 2025, 132 pelaku usaha memberikan tindak lanjut berupa perbaikan, 7 surat rekomendasi tindak lanjut Kepada lintas sektor dan 7 surat rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor pada tahun 2025.

1. **Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

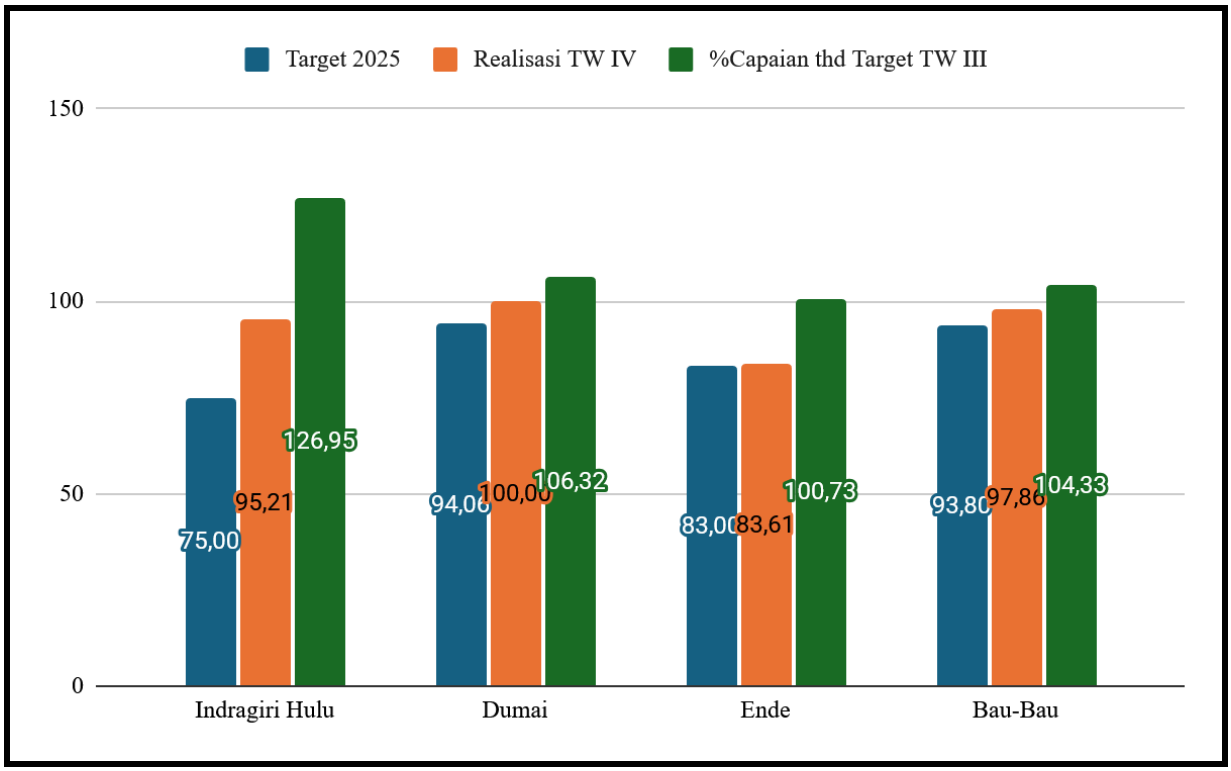
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN

1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	82,00	95,21	116,11%	Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase keputusan /rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 95,21 dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 82,00 maka capaian yang diperoleh yaitu 116,11%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 telah melampaui target akhir renstra.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Indragiri Hulu dengan persentase sebesar 126,95%, diikuti oleh UPT Dumai sebesar 106,32%, UPT Bau-Bau sebesar 104,33%, dan UPT Ende sebesar 100,73%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Dumai, Bau-Bau, dan Ende berada pada rentang 100–110 sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu, capaian UPT Indragiri Hulu yang melebihi 110% masuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” sesuai pedoman penilaian yang berlaku. Secara umum, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang optimal karena seluruh UPT mencapai realisasi di atas 100%, dengan mayoritas berada dalam kategori “Sangat Baik”.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	Petugas tidak melakukan kewajiban dalam mengawal tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan kepada pelaku usaha	Kertas kerja monitoring waktu hasil evaluasi CAPA	Membuat Kertas kerja monitoring waktu hasil evaluasi CAPA	Sudah terlaksana	Y	O-04	Petugas tidak melakukan kewajiban dalam mengawal tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan kepada pelaku usaha

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* pada Tahun 2025 dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” hal ini dikarenakan:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rekomendasi yang diberikan. Kegiatan monev ini rutin dilakukan oleh katim setiap akhir bulan.
b. Percepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi dengan pembinaan ditempat pada saat pemeriksaan sarana dengan meminta komitmen terhadap rencana tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) kepada pelaku usaha dan melakukan Desk CAPA apabila dibutuhkan.
c. Aktif berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, terkait hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Membuat link bersama terkait hasil pengawasan sarana distribusi yang bisa diakses oleh Dinas Kesehatan setempat.
e. Realisasi rekomendasi yang diberikan oleh lintas sektor yang mencapai 100% dan dibantu dari gap yang cukup kecil dari komoditi sediaan farmasi (obat, OBASK, dan Kosmetik).
f. Adanya tindak lanjut yang carry over dari pemeriksaan bulan Desember 2024 sebanyak 5 sarana.

4. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu ke depan untuk meningkatkan realisasi dan capaian Indikator Kinerja ini dengan:

- Melakukan follow up secara terjadwal terhadap stakeholder untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yg diterbitkan UPT
- Mengevaluasi setiap tindak lanjut yg disampaikan stakeholder terhadap pemenuhan setiap rekomendasi yg disampaikan UPT terhadap hasil pengawasan

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

% = = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Keterangan:

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

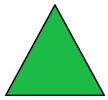
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Baik	

Realisasi Persentase fasilitas produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100,00 bila dibandingkan dengan target 100,00, maka capaian yang diperoleh adalah 100,00% dan mendapatkan kriteria **Baik**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

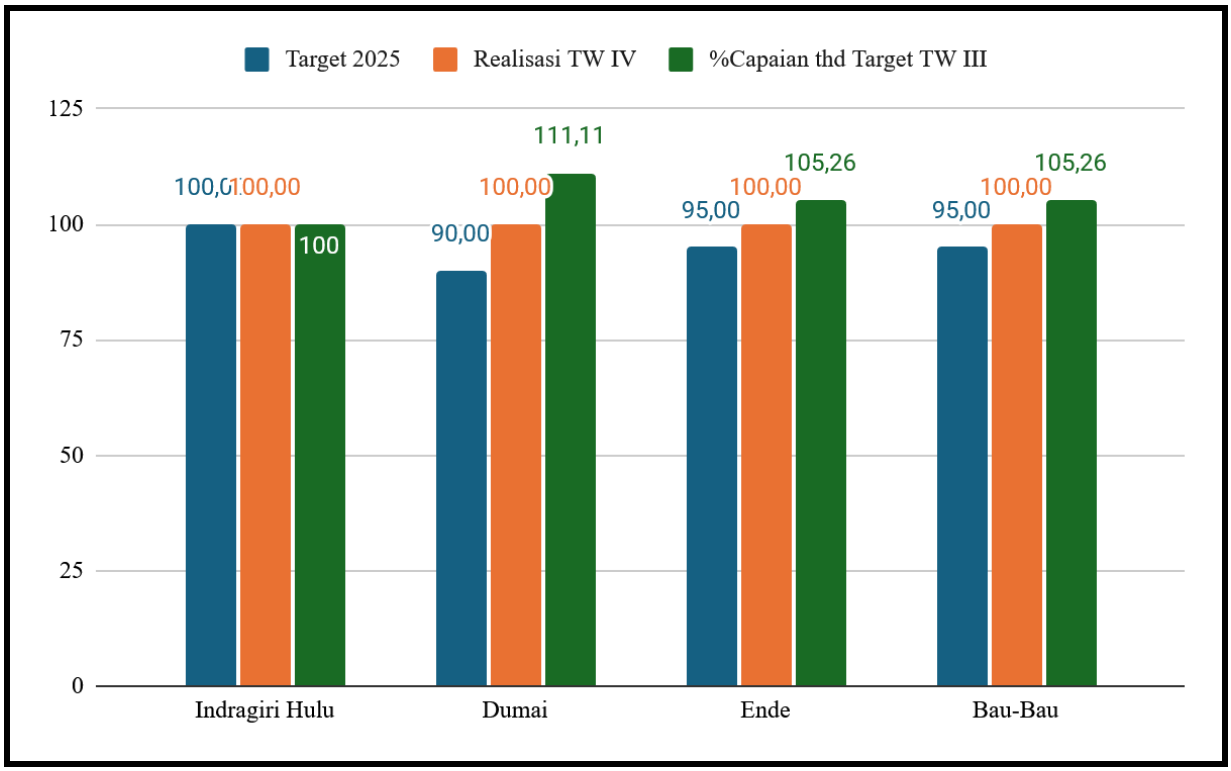
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KRITERIA CAPAIAN

				(%)	
1	Persentase fasilitas produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00%	Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase fasilitas Produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 100,00 dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 100,00 maka capaian yang diperoleh yaitu 100,00%. Persentase fasilitas Produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 sudah **Tercapai** akhir renstra.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh UPT telah mencapai realisasi sebesar 100%. Berdasarkan persentase capaian terhadap target, UPT Dumai memperoleh capaian tertinggi sebesar 111,11%, diikuti oleh UPT Ende dan UPT Bau-Bau masing-masing sebesar 105,26%, serta UPT Indragiri Hulu sebesar 100%.

Sesuai dengan ketentuan penilaian, capaian UPT Ende dan Bau-Bau yang berada pada rentang 100–110 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, sedangkan capaian UPT Indragiri Hulu sebesar 100% termasuk dalam kategori “Baik”. Untuk UPT Dumai, capaian yang melebihi 110% termasuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” sesuai pedoman penilaian yang berlaku. Secara umum, kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang optimal karena seluruh UPT telah memenuhi target yang ditetapkan dan mayoritas berada pada kategori “Sangat Baik”.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi belum merata	Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan inspektur OMKA	Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan inspektur OMKA	Sudah terlaksana	Y	SDM-02	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi belum merata

Capaian indikator kinerja ini diperoleh adalah Baik" Tahun 2025 dengan realisasi 100,00. Hal ini dapat disebabkan oleh :

a. Penyampaian laporan SIPT yang dilakukan tepat waktu oleh masing-masing petugas serta ketepatan petugas dalam menentukan kesimpulan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
b. Supervisor independen dalam mengoreksi laporan SIPT dan surat tindak lanjut oleh petugas, Sehingga bisa meminimalisir ketidaksesuaian dalam pengambilan kesimpulan serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pada link yang telah disediakan.
c. Adanya Monitoring dan Evaluasi (Monev) berkala oleh supervisor independen di akhir bulan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan inspektur OMKA

- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses pro justitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- Aktif berkomunikasi dengan pelaku usaha, terutama penanggung jawab sarana terkait timeline perbaikan yang telah disepakati.
- Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan sarana distribusi obat dan makanan.
- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait Keamanan Produk Obat, OBA, SK, Kuasi dan Kosmetik dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa.

Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

$$\% = \frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
  a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
  b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
     Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
  c. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
     a. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
     b. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan

c. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%) CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN	
1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	100,00	112,36	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi Persentase fasilitas produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100,00 bila dibandingkan dengan target 89,00, maka capaian yang diperoleh adalah 112,36% dan mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dengan rincian 24 target sarana produksi pangan olahan tahun 2025, 24 sarana yang diperiksa, 24 sarana yang dilaporkan tepat waktu, 24 sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan 29 sarana yang diberikan grading dengan tepat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

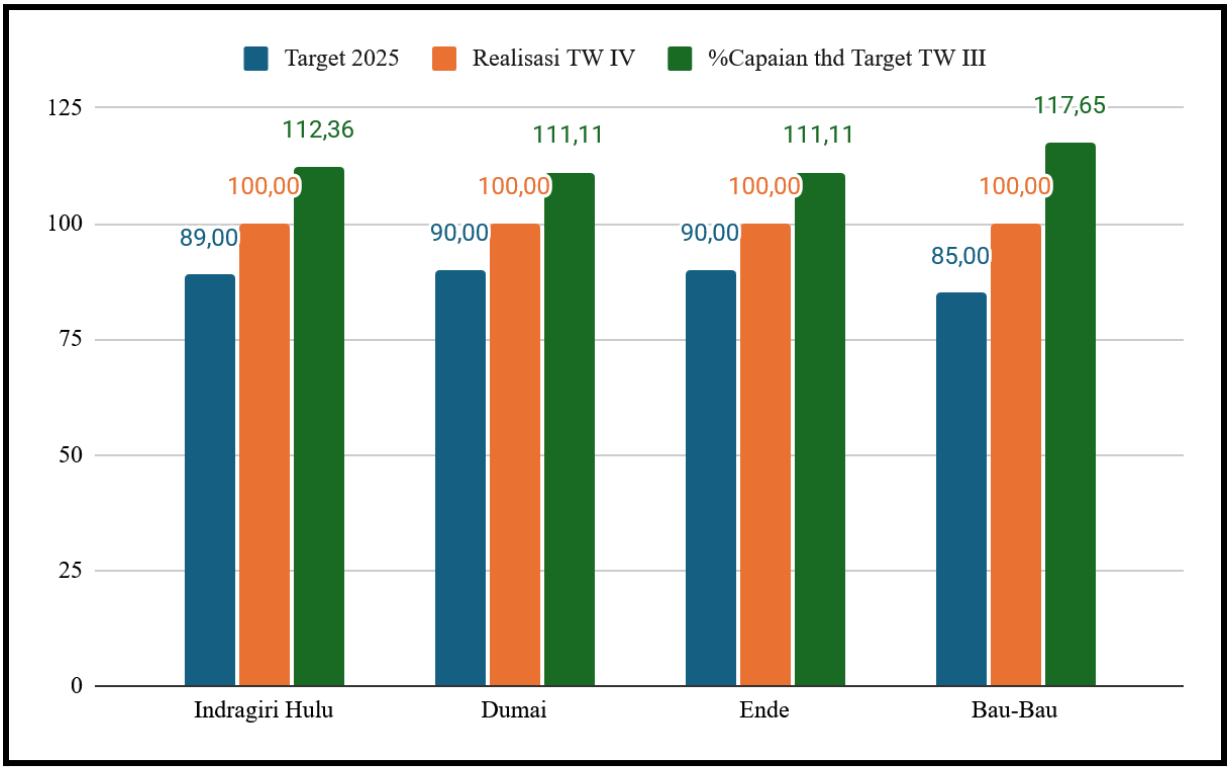
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN

1	Persentase fasilitas produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100,00	105,26%	Melampaui target

Realisasi kinerja Persentase fasilitas produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 sebesar 100,00% dibandingkan dengan target akhir renstra sebesar 95% maka capaian yang diperoleh yaitu 105,26%. Persentase fasilitas produksi pangan olahan yang periksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 sudah **melampaui target** akhir renstra.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase fasilitas produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh UPT mencapai realisasi sebesar 100%. Berdasarkan persentase capaian terhadap target, UPT Bau-Bau memperoleh capaian tertinggi sebesar 117,65%, diikuti oleh UPT Indragiri Hulu sebesar 112,36%, serta UPT Dumai dan UPT Ende masing-masing sebesar 111,11%.

Sesuai ketentuan penilaian, capaian yang melebihi 110% termasuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”, sehingga seluruh UPT pada indikator ini berada dalam kategori tersebut. Meskipun demikian, secara substantif seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana produksi Pangan Olahan telah dilaksanakan secara optimal sepanjang Tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa sesuai ketentuan	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan belum merata	Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan food inspectur dasar di IDEAS	Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan food inspectur dasar di IDEAS	Sudah terlaksana	Y	SDM-03	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan belum merata

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian 'Tidak Dapat Disimpulkan" tahun 2025. Hal ini dapat disebabkan oleh :

a. Kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat di setiap bulannya.
b. Petugas mengambil keputusan hasil pemeriksaan sarana distribusi dan menyusun surat tindak lanjut berdasarkan Pedoman Tindak lanjut Pangan Olahan.
c. Ketua tim aktif dalam memonitoring dan evaluasi terhadap pelaporan sarana melalui SIPT maupun bitl.ly internal serta surat tindak lanjut.
d. Adanya hasil evaluasi pelaporan SIPT yang dikirim pusat setiap triwulan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai POM di Indragiri Hulu, seperti Food Inspector Dasar/Muda/Madya, Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan pelatihan lain terkait pangan olahan.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses pro justitia maupun administrative) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terkait Cara Ritel Pangan Olahan yang Baik dan Keamanan Pangan.
- Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Masyarakat terkait keamanan pangan dan Cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa..

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

$$\% = (A+B+C+D)/4$$

Keterangan:

A. Persentase Fasilitas Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (*timeline*), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh *independent supervisor* melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa,

ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

C. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

D. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

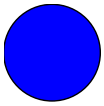
a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100,00	104,44	Sangat Baik 

Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100,00% bila dibandingkan dengan target 95,75%, maka capaian yang diperoleh adalah 104,44 % dan mendapatkan kriteria **sangat baik.**

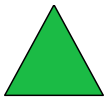
Kesesuaian tindak lanjut pada sarana distribusi obat sebesar 100,00% dari 56 sarana distribusi yang diperiksa. Kesesuaian tindak lanjut pada sarana distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik sama-sama berada pada angka 100%

berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan pada 8 sarana distribusi obat bahan alam, 3 sarana distribusi suplemen kesehatan dan 25 sarana distribusi kosmetik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Indikator kinerja ini baru ditetapkan untuk tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

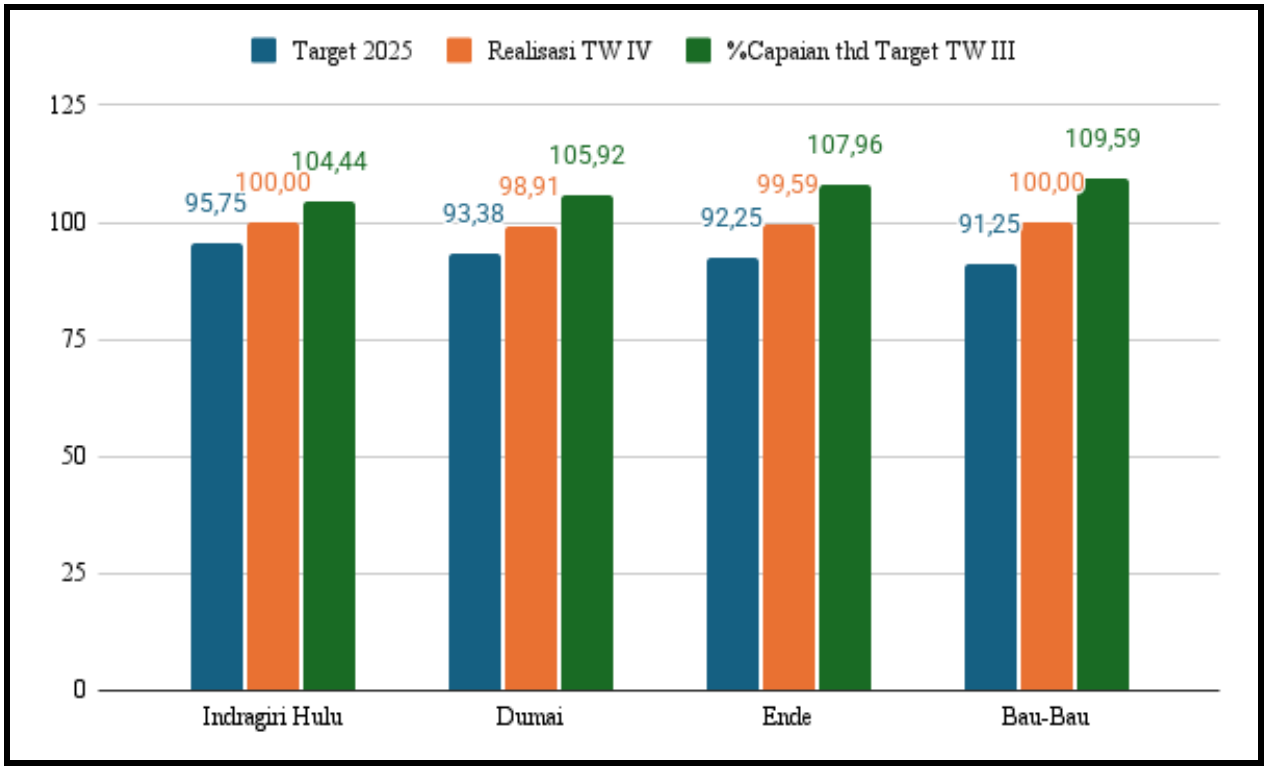
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KRITERIA CAPAIAN
1	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,00	100,00	102,04%	Melampaui 

Realisasi kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai 100,00% dengan capaian terhadap target akhir renstra 98,00% sehingga capaiannya sudah berada dalam kategori melampaui.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Indragiri Hulu dengan Balai lain yang sejenis dapat digambarkan dalam grafik berikut:



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Bau-Bau dengan persentase sebesar 109,59%, diikuti oleh UPT Ende sebesar 107,96%, UPT Dumai sebesar 105,92%, dan UPT Indragiri Hulu sebesar 104,44%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, seluruh capaian berada pada rentang 100–110 sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UPT tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampaui target secara terukur dan masih dalam batas pengendalian kinerja yang wajar. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi Sediaan Farmasi yang optimal sepanjang Tahun 2025.

5. Analisis penyebab keberhasilan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

1.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target pemeriksaan sarana tidak dapat terlaksana	Mengganti target prioritas pengawasan	Mengganti target prioritas pengawasan	Sudah terlaksana	Y	O-05	Target pemeriksaan sarana tidak dapat terlaksana

Capaian indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 sudah termasuk dalam kategori **sangat baik.** Hal ini dapat disebabkan karena kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan target atau perencanaan yang telah ditetapkan dan pembagian tim sudah dilakukan secara proporsional.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

BPOM di Indragiri Hulu selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan *follow up* pelaporan yang sudah dikirim oleh petugas melalui SIPT. Selain itu, tim kerja pemeriksaan juga mengadakan kegiatan "Forum Diskusi Penyamaan Persepsi Petugas dalam Pengawasan Peredaran Pangan Olahan" melalui zoom meeting dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM RI. Pembahasan dalam kegiatan tersebut meliputi pengisian form 33 yang digunakan pada saat pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dan materi lain terkait Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) serta diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab.

Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

$$\% \text{ Sarana} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa}} \times 100\ \%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$$A = 20\,\% \times \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa} \times 100\,\%}{\text{Target Sarana}} \right)$$

$$B = 70\,\% \times \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \times 100\,\%}{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa}} \right)$$

$$C = 70\,\% \times \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} \times 100\,\%}{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa}} \right)$$

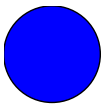
Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat didefinisikan :

a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.
b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
    1) Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
    2) Ketepatan waktu pelaporan
    3) Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP	KATEGORI

				TARGET (%)	
1	Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,81	109,68	Sangat Baik 

Realisasi Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 99,81% bila dibandingkan dengan target 91%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,68% dan mendapatkan kriteria **sangat baik.** Terdapat 52 target sarana distribusi pangan olahan selama tahun 2025 dengan rincian 52 sarana yang diperiksa, 52 sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan 51 sarana yang dilaporkan tepat waktu.

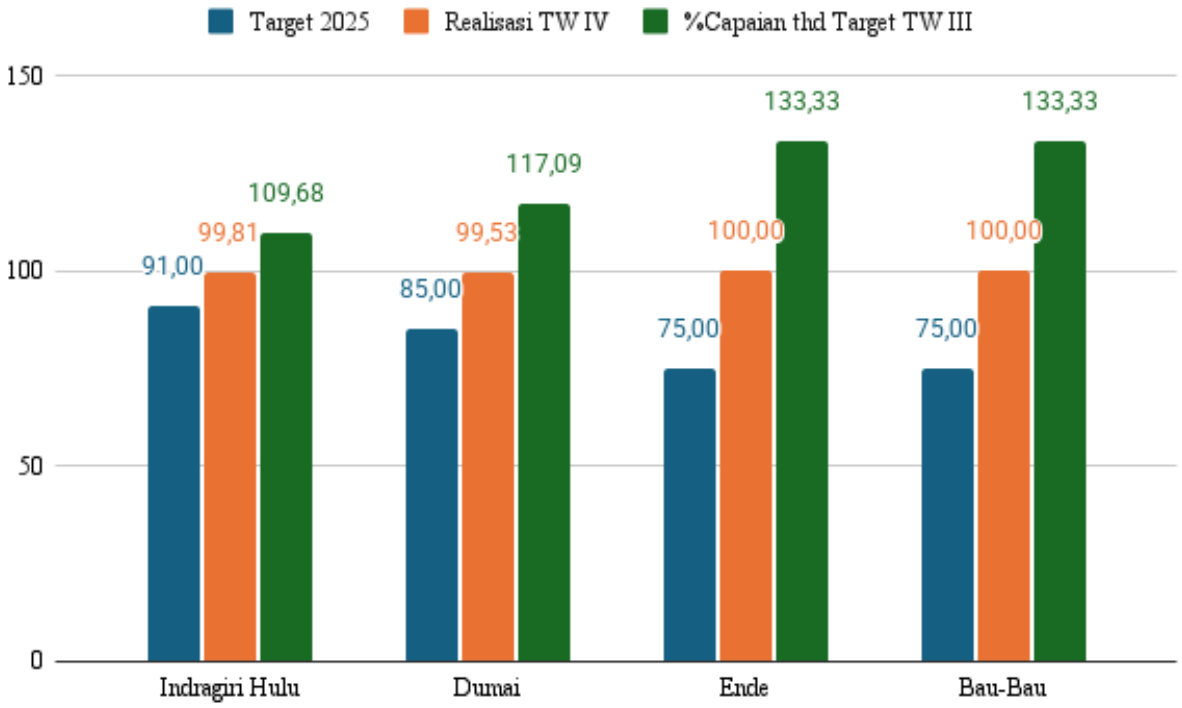
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KRITERIA CAPAIAN
1	Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,81	105,26	Melampaui 

Realisasi kinerja persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai 100% dengan capaian terhadap target akhir renstra 105,26% sehingga capaiannya sudah berada dalam kategori **tercapai/melampaui**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Indragiri Hulu dengan Balai lain yang sejenis dapat digambarkan dalam grafik berikut:



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Ende dan UPT Bau-Bau dengan persentase masing-masing sebesar 133,33%, diikuti oleh UPT Dumai sebesar 117,09%, dan UPT Indragiri Hulu sebesar 109,68%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Indragiri Hulu yang berada pada rentang 100–110 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu, capaian UPT Dumai, Ende, dan Bau-Bau yang melebihi 110% termasuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Secara umum, seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut sarana distribusi Pangan Olahan pada Tahun 2025 telah berjalan secara optimal dan efektif.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada persamaan persepsi mengenai pengisian form pemeriksaan sarana	Melakukan sharing dan diskusi internal pembahasan form inspeksi yang dipimpin oleh inspektur masing-masing komoditi	Melakukan sharing dan diskusi internal pembahasan form inspeksi yang dipimpin oleh inspektur masing-masing komoditi	Sudah terlakasana	Y	O-06	Belum ada persamaan persepsi mengenai pengisian form pemeriksaan sarana

Capaian indikator kinerja persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 sudah termasuk dalam kategori **sangat baik.** Hal ini dapat disebabkan karena kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai dengan target atau perencanaan yang telah ditetapkan dan pembagian tim sudah dilakukan secara proporsional.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

BPOM di Indragiri Hulu selalu berupaya untuk meningkatkan realisasi target kinerja persentase fasilitas distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan *follow up* pelaporan yang sudah dikirim oleh petugas melalui SIPT.

Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator kinerja Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menggunakan rumus :

$$\% = (A+B+C+D+E)/5$$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b)/2

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \textbf{ x 100\%}$$

b. **Ketepatan waktu pelaporan**

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \textbf{ x 100\%}$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

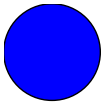
a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Indikator Kinerja ini didefinisikan sebagai Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,88	109,27	Sangat baik 

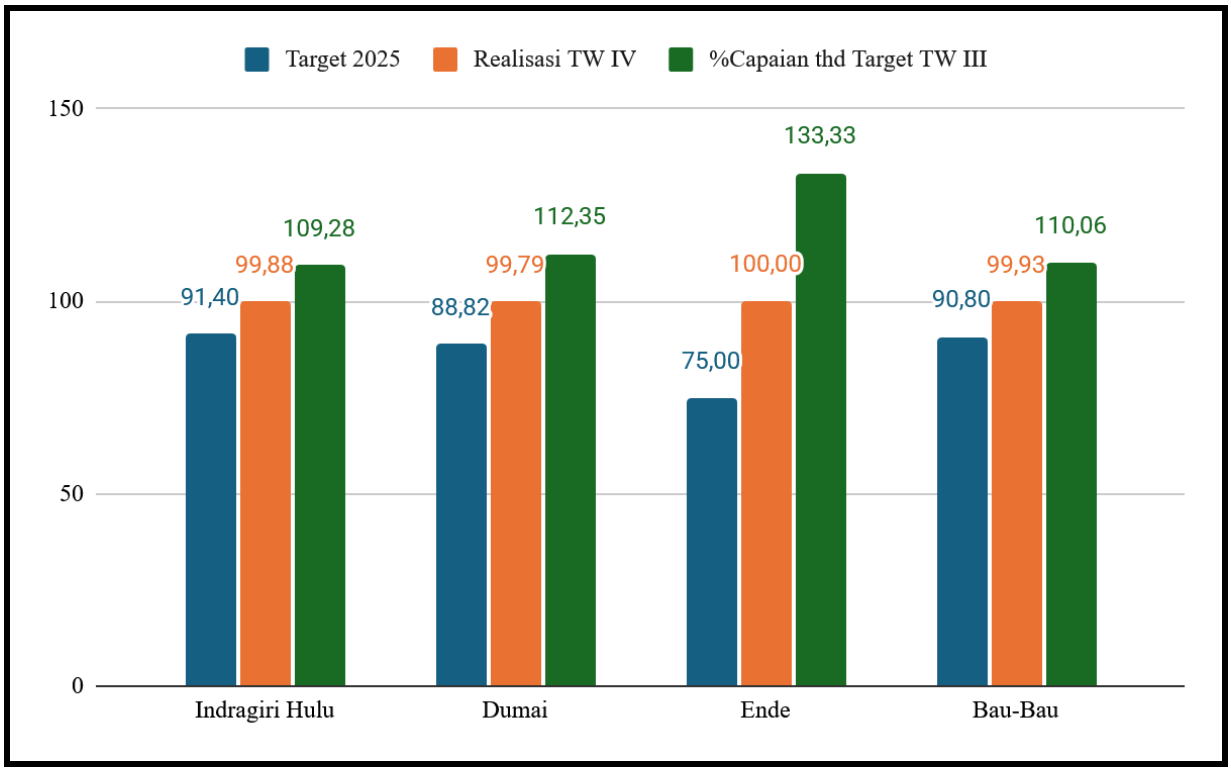
Realisasi Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 99,88% bila dibandingkan dengan target 91,40%, maka capaian yang diperoleh adalah 109,27 % dan mendapatkan kriteria **sangat baik** dengan rincian 53 Iklan Obat dengan realisasi 100%, 120 iklan kosmetik dengan realisasi 100%, 52 iklan obat bahan alam dengan realisasi 100,00%, 15 iklan suplemen kesehatan dengan realisasi 100%, dan 81 iklan pangan olahan dengan realisasi 100% dapat dilihat melalui grafik dibawah ini

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KRITERIA CAPAIAN
1	Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,20	99,88	103,83%	Melampaui

Realisasi kinerja persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan yaitu 99,88% dengan capaian terhadap target akhir renstra 97,20%, sehingga capaiannya sudah berada dalam kategori melampaui.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan" Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Ende dengan persentase sebesar 133,33%, diikuti oleh UPT Dumai sebesar 112,35%, UPT Bau-Bau sebesar 110,06%, dan UPT Indragiri Hulu sebesar 109,28%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Indragiri Hulu yang berada pada rentang 100–110 termasuk dalam kategori "Sangat Baik". Sementara itu, capaian UPT Dumai, Ende, dan Bau-Bau yang melebihi 110% termasuk dalam kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Secara umum, seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan efektif.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.**

   Realisasi capaian indikator kinerja ini berada pada kategori **Melampaui**. Hal ini disebabkan karena telah dilakukannya pengawasan iklan, monitoring, evaluasi secara rutin serta penyesuaian media yang diawasi sesuai target atau perencanaan yang sudah ditetapkan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	tidak semua target media iklan yang ditetapkan dapat diawasi	Koordinasi dengan pusat untuk mengganti target media iklan	Koordinasi dengan pusat untuk mengganti target media iklan	Sudah dilaksanakan	Y	O-07	tidak semua target media iklan yang ditetapkan dapat diawasi

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang realisasi dan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Balai POM di Indragiri Hulu adalah dengan melakukan pemantauan capaian secara berkala dan follow up pelaporan yang sudah dikirim oleh petugas melalui SIPT. Petugas pengawas iklan juga berkesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dengan mengikuti webinar yang diadakan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dengan judul "Cerdas Memahami Label dan Iklan Pangan, Tema: Mengurai Perbedaan Persepsi dalam Pengawasan Iklan". Hal inilah yang menjadi salah satu penunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator pengawasan iklan.

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar =

Realisasi = (A+B) / 2

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Persentase label produk	80,00	100	125,00	Tidak Dapat

tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar				Disimpulkan 

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100% bila dibandingkan dengan target 80%, maka capaian yang diperoleh adalah 125,00% dan mendapatkan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** dengan rincian 14 target label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Target label produk tembakau	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
14	80,00	100.00	100.00	100.00

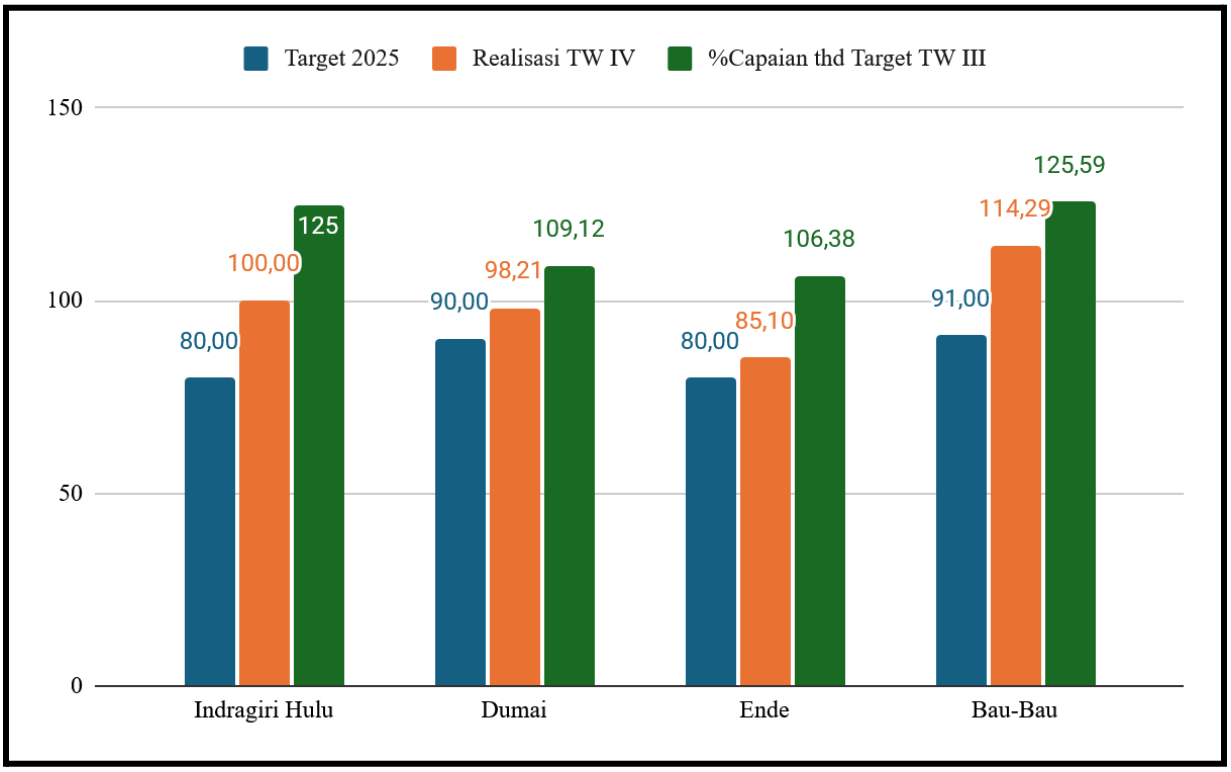
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR Akhir Renstra	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET (%)	KATEGORI
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	84	100	119,05%	Melampaui target 

Realisasi kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 84% maka capaian yang diperoleh sama yaitu 119,05%. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu sampai dengan Tahun 2025 sudah **melampaui target Akhir Renstra**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Bau-Bau sebesar 125,59%, diikuti oleh UPT Indragiri Hulu sebesar 125%, UPT Dumai sebesar 109,12%, dan UPT Ende sebesar 106,38%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Dumai dan UPT Ende yang berada pada rentang 100–110 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu, capaian UPT Indragiri Hulu dan UPT Bau-Bau yang melebihi 110% termasuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Secara umum, seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik pada Tahun 2025 telah dilaksanakan secara optimal dan konsisten sesuai standar yang berlaku.

4. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan.**

   Nilai persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada tahun 2025 adalah 100,00% dengan capaian kinerja terhadap terget 2025 sebesar 80,00% dengan kategori capaian ”Tidak Dapat Disimpulkan”. Petugas diharapkan dapat melakukan pengawasan label tembakau sesuai dengan pedoman/juknis yang telah ditetapkan BPOM dengan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Adanya PIC baru yang melakukan pengawasan label produk tembakau	Meningkatkan kompetensi petugas terkait pengawasan label produk tembakau	Meningkatkan kompetensi petugas terkait pengawasan label produk tembakau	Sudah Dilaksanakan	Ya	SDM-04	Adanya PIC baru yang melakukan pengawasan label produk tembakau

5. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja:**

   Keberhasilan atau Kegagalan pencapaian kinerja dapat ditentukan oleh hal berikut :

   a. Label yang diawasi adalah produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang harus diawasi sesuai juknis yang sudah ditetapkan.

b. Jumlah label dan Ketepatan waktu pelaporan label tembakau dan/atau rokok elektronik juga menjadi penilaian, sehingga petugas yang ditugaskan diwajibkan melaporkan penandaan label tembakau dan elektronik sesuai dengan target yang diberikan dan dilaporkan dengan tepat waktu.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT)" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR
2) Pelaksanaan Bimtek
3) Pelaksanaan Advokasi
4) Pelaksanaan Publikasi

Perhitungan capaian untuk indikator kinerja "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Keterangan:
A : Penggunaan Tools Pengawasan AMR
B : Pelaksanaan Bimtek
C : Pelaksanaan Advokasi
D : Pelaksanaan Publikasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai	100	105,60	105,60%	Sangat Baik	

POM di Indragiri Hulu					

Perbandingan Target Indikator Kinerja Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 adalah 100% (Seratus Persen) dengan realisasi sebesar 105,60% (Seratus Lima Koma Enam Puluh Tiga Persen), sehingga capaian Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Indragiri Hulu adalah 105,60% (Seratus Lima Koma Enam Puluh Tiga Persen) dengan kriteria capaian sangat baik.

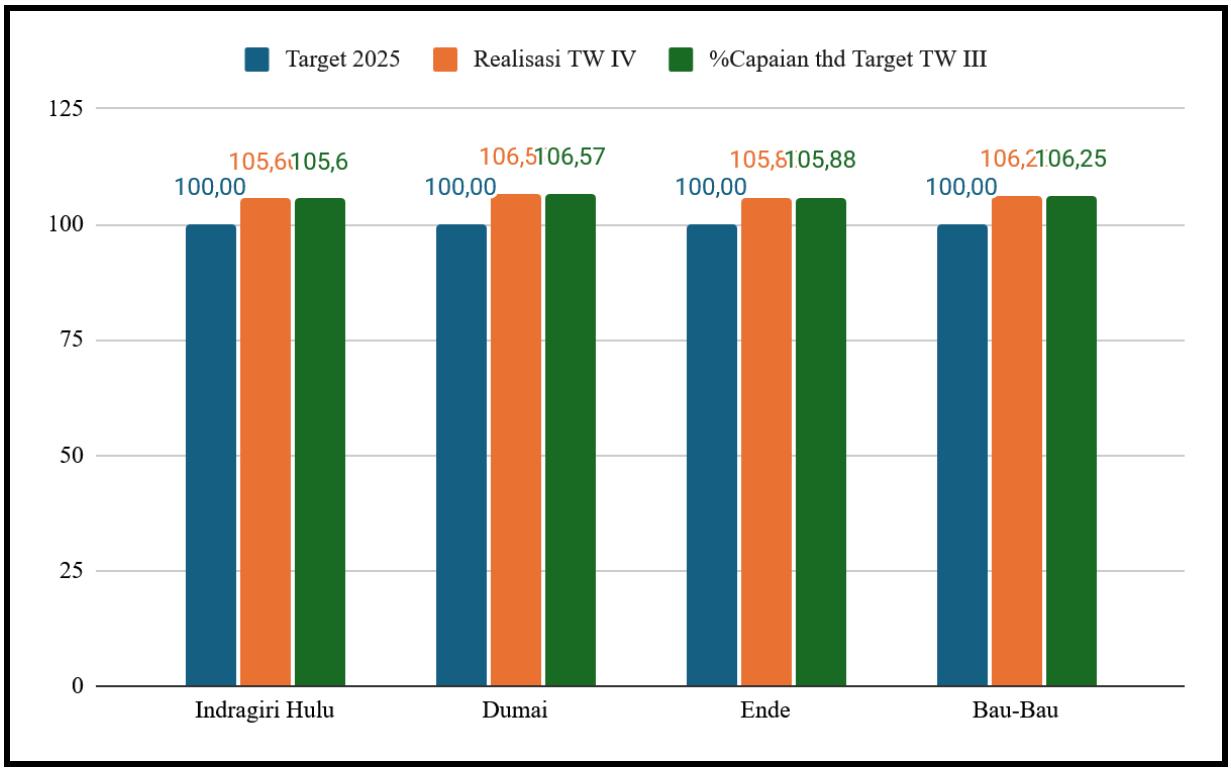
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	105,60	105,60%	Tercapai/Melampaui

Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 105,60% (Seratus Lima Koma Enam Puluh Tiga Persen) bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100% (Seratus Persen), maka capaian yang diperoleh yaitu 105,60% (Seratus Lima Koma Enam Puluh Tiga Persen) dan termasuk kategori akan Tercapai/Melampau.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Dumai sebesar 106,57%, diikuti oleh UPT Bau-Bau sebesar 106,25%, UPT Ende sebesar 105,88%, dan UPT Indragiri Hulu sebesar 105,60%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, seluruh capaian berada pada rentang 100–110 sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh UPT tidak hanya memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 100%, tetapi juga mampu melampaui target secara terukur dan tetap dalam batas pengendalian kinerja yang wajar. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan pelaksanaan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) yang optimal dan konsisten di seluruh wilayah UPT pada Tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT disebabkan oleh beberapa faktor :

a) Adanya komitmen dari pemerintah daerah (Kepala Daerah) terkait dengan pengendalian resistensi antimikroba.

b) Kekonsistenan petugas dalam penggunaan tools AMR dalam pengawasan apotek serta pelaporan melalui SIPT.

c) Komitmen dari Pengurus IAI dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek dalam pengendalian resistensi antibiotika.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Pimpinan daerah tidak bersedia mengeluarkan surat kesepakatan komitmen pengendalian resistensi antimikroba	Melakukan audiensi ke pemerintah daerah	Melakukan audiensi ke pemerintah daerah	Sudah terlaksana	Y	S-01	Pimpinan daerah tidak bersedia mengeluarkan surat kesepakatan komitmen pengendalian resistensi antimikroba

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan Pengendalian Resistensi AMR :

a) Komitmen dari lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dalam melakukan monitoring penyerahan antibiotika tanpa resep di sarana pelayanan kefarmasian.

b) Komitmen dari pelaku usaha (pemilik sarana apotek dan penanggung jawab apoteker) untuk tidak menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter.

c) Komitmen dari Masyarakat untuk tidak mengkonsumsi antibiotika secara bebas.

d) Adanya monitoring dan evaluasi dari BPOM Pusat terkait pelaksanaan rangkaian kegiatan pengendalian resistensi antimikroba

Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah kerja UPT diwujudkan dalam beberapa indikator kinerja

utama salah satunya yaitu Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan hasil capaian indikator sebesar 107,34 %. Standar Kemampuan Laboratorium meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi Laboratorium.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,00	24,48	188,28	Tidak Dapat Disimpulkan 

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

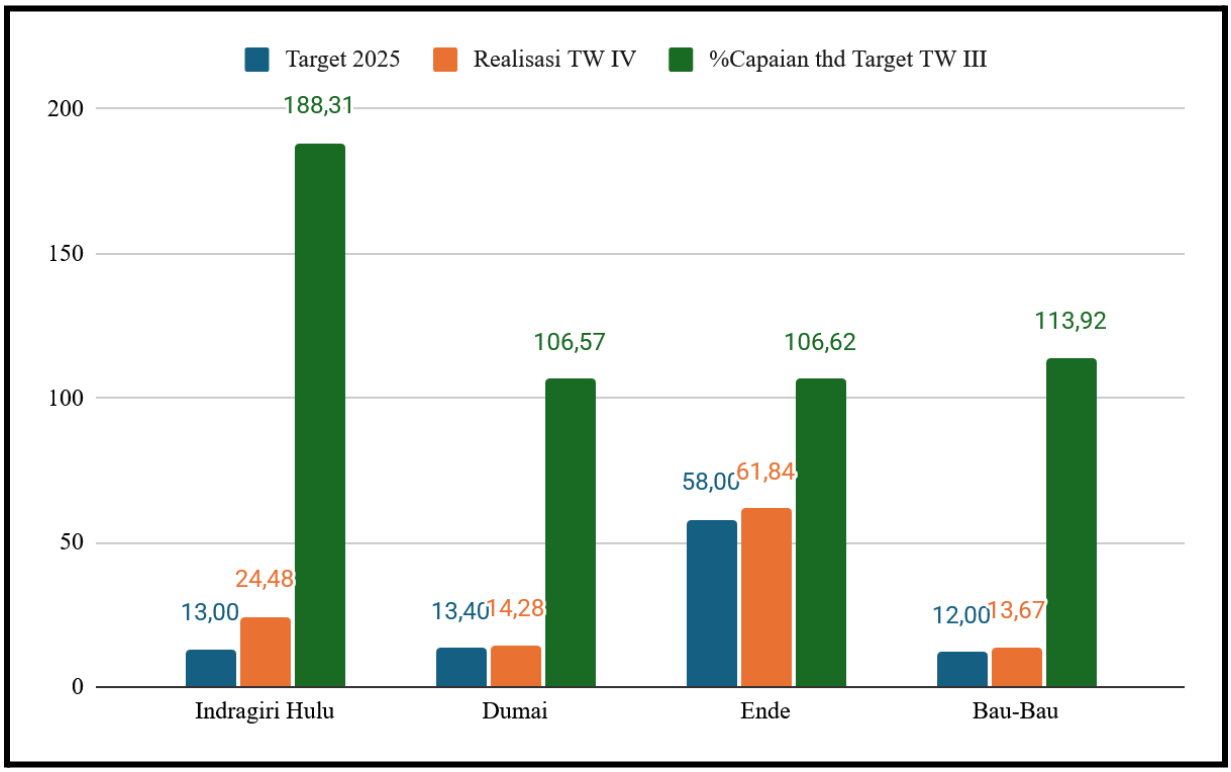
Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)	Kriteria Capaian
Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,00	24,48	188,31%	Melampaui Target 

Dari data pada tabel di atas,Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 24,48 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 13,00, maka capaian yang diperoleh yaitu 188,31% dan termasuk kategori Melampaui Target, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang untuk dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di

Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian tertinggi diraih oleh UPT Indragiri Hulu dengan persentase sebesar 188,31%, diikuti oleh UPT Bau-Bau sebesar 113,92%, UPT Ende sebesar 106,62%, dan UPT Dumai sebesar 106,57%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Dumai dan UPT Ende yang berada pada rentang 100–110 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Sementara itu, capaian UPT Bau-Bau dan UPT Indragiri Hulu yang melebihi 110% termasuk dalam kategori “Tidak Dapat Disimpulkan” sesuai pedoman evaluasi yang berlaku. Secara umum, seluruh UPT telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan standar kemampuan laboratorium pengujian pada Tahun 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Capaian kinerja sebesar 188,28 (tidak dapat disimpulkan (>110%) akibat terdapat pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Kompetensi pada Laboratorium Tingkat 1 sehubungan dengan pelaksanaan In House Training Bimbingan Teknis Pengembangan Kemampuan Pengujian Kimia Kosmetik dan Obat Bahan Alam secara rapid test melalui verifikasi Metode Analisis OBA sebanyak 4 laporan dan Kosmetik sebanyak 2 laporan, serta pelaksanaan Food Security VVIP (Wakil Presiden) pada National Event Pacu Jalur tahun 2025 dengan penambahan 3 parameter uji menggunakan test kit. Selain itu beberapa pelaksanaan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Kompetensi tahun 2025 dengan Laboratorium Tingkat 1, juga menjadi baseline pada pemenuhan Standar Ruang Lingkup dan Standar Kompetensi tahun 2026 dengan Laboratorium Tingkat 2, sehingga target yang telah ditetapkan sebelumnya pada Agustus 2025 juga perlu dilakukan penyesuaian dengan realisasi pada akhir tahun 2025.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Rotasi dan penambahan SDM Penguji	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan penguji terkait pedoman pelaksanaan pengujian	Meningkatkan kompetensi dan keterampilan penguji terkait pedoman pelaksanaan pengujian	Sudah terlaksana	Y	SDM-05	Rotasi dan penambahan SDM Penguji
2		Kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian	Menyediakan APD yang memadai dan sesuai kebutuhan, memasang himbauan penggunaan APD sebelum melaksanakan pengujian dan pentingnya K3 di laboratorium, dan mendokumentasikan CoA/MSDS terkait reagensia yang digunakan	Mengikuti pelatihan Pedoman Cara Berlaboratorium yang Baik (Good Laboratory Practices) dan K3 dan menginformasikan kepada penguji maupun non-penguji ketentuan memasuki dan menjalankan aktivitas di laboratorium	Sudah terlaksana	Y	K3-02	Kecelakaan kerja dalam pelaksanaan pengujian

3		Alat ukur/instrumentasi tidak memberikan hasil pengukuran kondisi yang sebenarnya	Menyusun jadwal pemeliharaan/kalibrasi secara terjadwal dan IK peralatan	Menginformasikan kepada penguji untuk mendokumentasi setiap pemakaian peralatan dan menggunakan peralatan sesuai instruksi kerja (IK)/manual peralatan	Sudah terlaksana	Y	O-08	Rotasi dan penambahan SDM Penguji
4		Peralatan utama dan pendukung tidak sesuai dengan standar/belum memadai	Menyusun rencana kebutuhan peralatan sesuai standar peralatan dan anggaran yang tersedia	Menyediakan penganggaran yang fleksibel untuk pemenuhan peralatan yang mendukung pengujian sesuai skala prioritas	Sudah terlaksana	Y	0-09	Peralatan utama dan pendukung tidak sesuai dengan standar/belum memadai
5		Pengelolaan persediaan dan sampel/retain sample belum memiliki/tidak dilakukan sesuai prosedur	SOP pengelolaan persediaan dan sampel/retain sample	Menyediakan prosedur pengelolaan persediaan dan sampel/retain sample dan melakukan stock opname persediaan secara terjadwal bersama Tim BMN	Sudah terlaksana	Y	F-01	Pengelolaan persediaan dan sampel/retain sample belum memiliki/tidak dilakukan sesuai prosedur
6		Pembangunan gedung laboratorium Balai POM di Indragiri Hulu tidak selesai tepat waktu	SK penunjukkan tim UKPBJ	Meminta pendampingan kepada UKPBJ Biro UMUM BPOM RI dalam penentuan pemenang dalam tender pembangunan gedung laboratorium	Sudah terlaksana	Y	F-02	Pengelolaan persediaan dan sampel/retain sample belum memiliki/tidak dilakukan sesuai prosedur

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pemenuhan SKL ini dengan melakukan

- Pemetaan dan perencanaan setiap bulan, triwulan, hingga tahunan agar tergambarkan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai target IKU ini

- Melakukan monitoring secara berkala dan perbaikan berkelanjutan
- Melakukan pengadaan reagen, test kit dan alat gelas yang sesuai kebutuhan agar rencana kegiatan dapat dilaksanakan

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

1) advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
2) mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
3) mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

1) Kabupaten/Kota yang mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
2) Kabupaten/Kota yang mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Perhitungan capaian untuk indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian UPT} = \frac{\textit{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\textit{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \; x\ 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	28,60	85,80%	Cukup	

Perbandingan Target Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 adalah 33,33 % dengan realisasi sebesar 28,60 %, sehingga capaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah 85,80% dengan kriteria capaian Cukup.

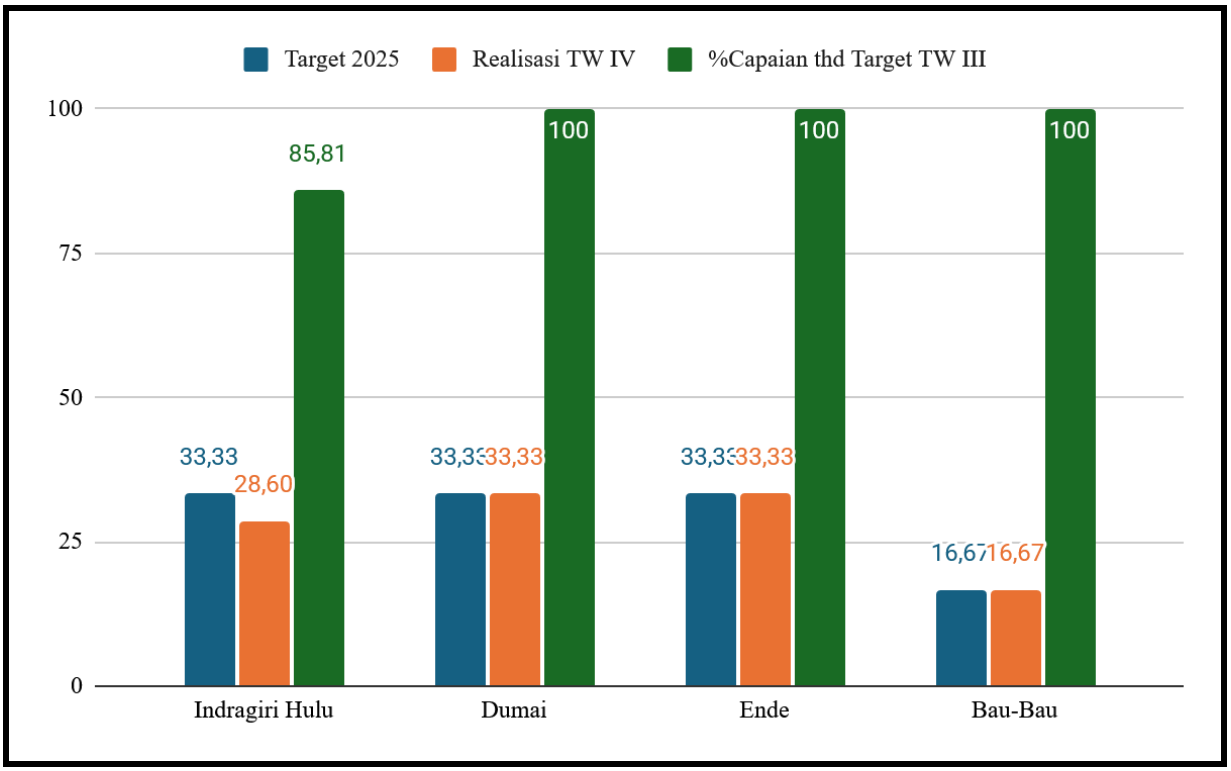
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Persentase pemenuhan target Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	28,60	28,60%	Perlu Upaya Keras 

Realisasi Persentase pemenuhan target Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 adalah 28,60% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100,00%, maka capaian yang diperoleh yaitu 28,60% dan termasuk kategori Perlu Upaya Keras, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang untuk dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Indragiri Hulu memperoleh capaian sebesar 85,81%, yang merupakan capaian terendah dibandingkan UPT Dumai, UPT Ende, dan UPT Bau-Bau. Sementara itu, UPT Dumai, UPT Ende, dan UPT Bau-Bau masing-masing mencapai 100%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Indragiri Hulu yang berada pada rentang 80–89% termasuk dalam kategori "Cukup", sedangkan capaian UPT Dumai, UPT Ende, dan UPT Bau-Bau yang berada pada rentang 90–100% termasuk dalam kategori "Baik". Secara umum, sebagian besar UPT telah mencapai target yang ditetapkan, meskipun UPT Indragiri Hulu masih memerlukan penguatan strategi pendampingan agar capaian dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Nilai penilaian mandiri kabupaten yaitu Kab. Kuantan Singingi yang didampingi sebesar 51 (< 60 (target)). Yg belum dilaksanakan yaitu: sampling produk IRTP dan evaluasi label, tidak ada inovasi. Pada OPD lain, juga hal yg sama kendalanya karena efisiensi anggaran. Waktu pelaksanaannya juga terbatas, karena ditetapkan sebagai IKU baru pada bulan Juni, sedangkan evaluasi dilakukan pada bulan Juli-Agustus

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan AmanT	Pengisian tools penilaian mandiri kabupaten / pangan kota aman tidak lengkap	Membuat Lembar komitmen	Melakukan pendampingan intensif secara langsung dan melakukan intervensi melalui lembar komitmen pimpinan daerah	Sudah terlaksana	Y	O-10	Pengisian tools penilaian mandiri kabupaten / pangan kota aman tidak lengkap

Capaian indikator kinerja ini Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu tahun 2025 dapat dikategorikan “Cukup”. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Pemilihan Kabupaten/Kota yang akan didampingi sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang ada di Balai POM di Indragiri Hulu untuk menunjang pencapaian kinerja tersebut.
b. Koordinasi yang baik antara Balai POM di Indragiri Hulu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memenuhi data dukung yang diperlukan dalam penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
c. Pendampingan oleh Balai POM di Indragiri Hulu dilakukan secara jemput bola ke kantor dinas terkait yang mengampu kriteria penilaian dalam tools penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dalam pemenuhan pengisian tools dan penyediaan data dukung yang sesuai kriteria.

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisa Penyebab Keberhasilan program Kabupaten/Kota Pangan aman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Advokasi kepada lintas sektor

   Advokasi dilakukan secara aktif kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait guna membangun komitmen, menyamakan persepsi, serta memperkuat dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan program Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Melalui koordinasi lintas sektor yang intensif, setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

b. Program jemput bola kepada UPTD serta pengumpulan data dukung
   Loka POM di Kabupaten Bungo menerapkan pendekatan proaktif melalui program jemput bola kepada UPTD terkait program yang dilaksanakan. Dalam kegiatan ini, petugas tidak hanya melakukan pendampingan teknis tetapi juga memantau dan membantu pengumpulan data dukung secara langsung. Strategi ini memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian eviden dengan indikator penilaian sehingga meminimalkan kekurangan pada saat evaluasi.
c. Monitoring dan evaluasi melalui tools pelaporan secara rutin
   Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan memanfaatkan tools pelaporan yang tersedia. Pemantauan rutin ini memungkinkan identifikasi kendala sejak dini, percepatan tindak lanjut, serta pengendalian capaian agar tetap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, progres pendampingan dapat terukur dan terdokumentasi dengan baik.
d. Pembinaan dan sosialisasi sejak awal tahun berjalan
   Pembinaan dan sosialisasi telah dilaksanakan sejak awal tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah dapat merencanakan dan menetapkan program serta laporan yang relevan untuk dimasukkan dalam penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman pada tahun berjalan. Pendekatan ini memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan kesiapan daerah dalam memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan.

Analisa Kegagalan atau penurunan kinerja dari program kabupaten/ kota pangan aman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya partisipasi UPTD dan pemerintah daerah
   Keinginan UPTD dan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam program Kabupaten/Kota Pangan Aman masih relatif rendah. Hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme reward and punishment yang jelas bagi pemerintah daerah, baik dalam bentuk apresiasi atas keikutsertaan maupun konsekuensi atas ketidakterlibatan. Kondisi tersebut menyebabkan program belum menjadi prioritas utama dalam agenda kerja daerah.
b. Persepsi bahwa program bukan kebutuhan daerah
   Sebagian pemerintah daerah masih memandang bahwa program Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan semata, sehingga belum dianggap sebagai kebutuhan strategis daerah. Persepsi ini

berdampak pada rendahnya komitmen anggaran, dukungan kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk mendukung pemenuhan indikator penilaian.

c. Tidak adanya arahan langsung dari pimpinan daerah
Ketiadaan arahan atau instruksi langsung dari pimpinan daerah dalam forum resmi seperti rapat koordinasi menyebabkan perangkat daerah di tingkat pelaksana kurang memiliki dorongan dan motivasi untuk menginput serta melengkapi data dukung penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dukungan kepemimpinan yang kurang kuat berdampak pada lemahnya pergerakan organisasi di tingkat bawah.

d. Kurangnya pemahaman UPTD terhadap ruang lingkup tugas dalam penilaian KKP
Pemahaman UPTD mengenai program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penilaian KKPA masih belum merata. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam mengidentifikasi kegiatan yang relevan serta dalam mengumpulkan dokumen pendukung yang sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan.

CAPAIAN SASARAN KEGIATAN II

Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan realisasi dan capaian pada tahun 2025 adalah 100 % dengan kategori baik. Penjelasan terhadap capaian Indikator SASARAN KINERJA II sebagai berikut :

A. Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan menggunakan formula:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\ \%$$

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng

sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI	
Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	100,00	200,00	Tidak Dapat Disimpulkan	

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 adalah 100 % bila dibandingkan dengan target 50,00%, maka capaian yang diperoleh adalah 200 % dan mendapatkan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Pada tahun 2025 Balai POM di Indragiri Hulu mendapatkan target pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebanyak 2 sarana dan telah dilakukan pada triwulan II sebanyak 2.

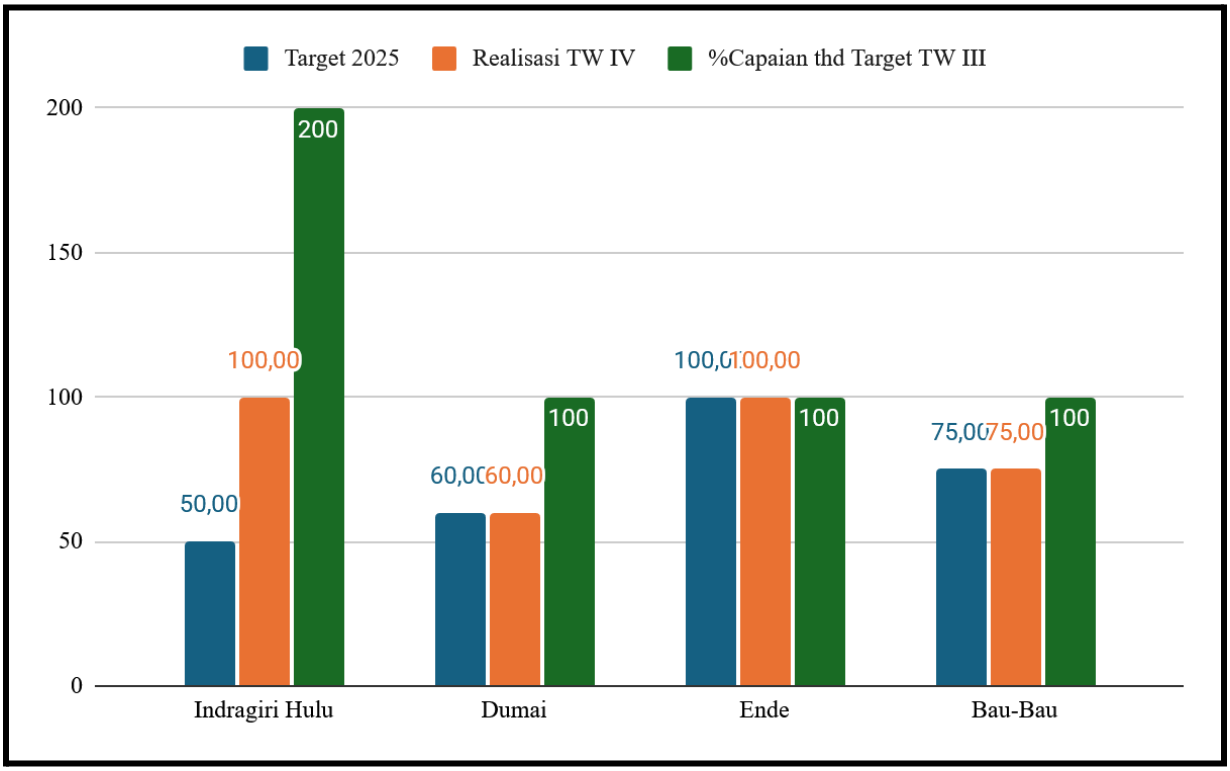
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)	Kriteria Capaian
Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	Tercapai 

Realisasi Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 adalah 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100,00%, maka capaian yang diperoleh yaitu 100,00% dan termasuk kategori Tercapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan” Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Indragiri Hulu memperoleh capaian sebesar 200%, yang merupakan capaian tertinggi dibandingkan UPT Dumai, UPT Ende, dan UPT Bau-Bau. Sementara itu, UPT Dumai, UPT Ende, dan UPT Bau-Bau masing-masing mencapai 100%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian UPT Dumai, UPT Ende, dan UPT Bau-Bau yang berada pada rentang 90–100% termasuk dalam kategori “Baik”. Adapun capaian UPT Indragiri Hulu yang melebihi 110% tidak dapat disimpulkan dalam kategori

penilaian sesuai ketentuan yang berlaku, namun secara substansi menunjukkan bahwa realisasi pemeriksaan dan tindak lanjut telah melampaui target yang ditetapkan. Secara umum, pelaksanaan indikator ini di seluruh UPT telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung pengawasan pangan fortifikasi sesuai ketentuan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Persentase cakupan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi fortifikasi tidak merata	Absensi mengikuti diseminasi	Melakukan diseminasi terkait pengawasan dan pengujian sederhana pangan fortifikasi	Sudah terlaksana	Y	SDM-06	Kompetensi yang dimiliki petugas dalam menjalankan tugas pemeriksaan sarana produksi fortifikasi tidak merata

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan, yaitu :

a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data dukung
Kemampuan UPTD dalam menggunakan teknologi informasi menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan program. Pengumpulan data penilaian dapat dilakukan secara digital melalui platform daring, sehingga tidak harus menunggu rapat tatap muka maupun membawa dokumen dalam bentuk hard copy. Hal ini membuat proses lebih efisien, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.

b. Koordinasi rutin secara daring dan luring
Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala membantu menyamakan persepsi antar perangkat daerah serta memantau progres pengumpulan data dukung. Forum ini juga menjadi sarana penyelesaian kendala teknis secara langsung dan terarah.

c. Pendampingan teknis langsung kepada UPTD

Kegiatan pendampingan lapangan atau kunjungan langsung memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai indikator penilaian dan jenis dokumen yang dapat diakui sebagai data dukung. Pendekatan ini meningkatkan ketepatan dan kualitas eviden yang dikumpulkan.

d. Monitoring dan evaluasi berkala

Monitoring yang dilakukan secara periodik memungkinkan identifikasi kendala sejak dini serta percepatan tindak lanjut. Dengan demikian, risiko keterlambatan atau kekurangan data dukung dapat diminimalkan.

e. Pembinaan kelengkapan administrasi

Pembinaan terkait penyusunan dokumen administrasi seperti Surat Tugas (ST), Laporan Perjalanan Dinas (LPD/LPH), daftar hadir, dan laporan kegiatan resmi membantu memastikan bahwa setiap kegiatan terdokumentasi secara sah dan dapat diverifikasi dalam penilaian.

f. Komunikasi aktif melalui media koordinasi

Pemanfaatan grup komunikasi atau media koordinasi lainnya mempermudah penyampaian informasi, pengingat tenggat waktu, serta klarifikasi dokumen secara cepat dan responsif, sehingga proses pengumpulan data berjalan lebih lancar.

2. 3.1.3. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu diukur dengan indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	KRITERIA CAPAIAN	
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,19	87,25	101,23%	Sangat Baik	

2.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	1,00	1,00	100%	Baik	
3.	Jumlah desa pangan aman	1	1	100%	Baik	
4.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100%	Baik	

3.1.3.1 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	86,19	87,25	101,23	Sangat Baik	

Target Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2025 adalah 86,19 dengan realisasi sebesar 87,25, sehingga perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 atau persentase capaian kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 101,23 % dengan kriteria capaian sangat baik.

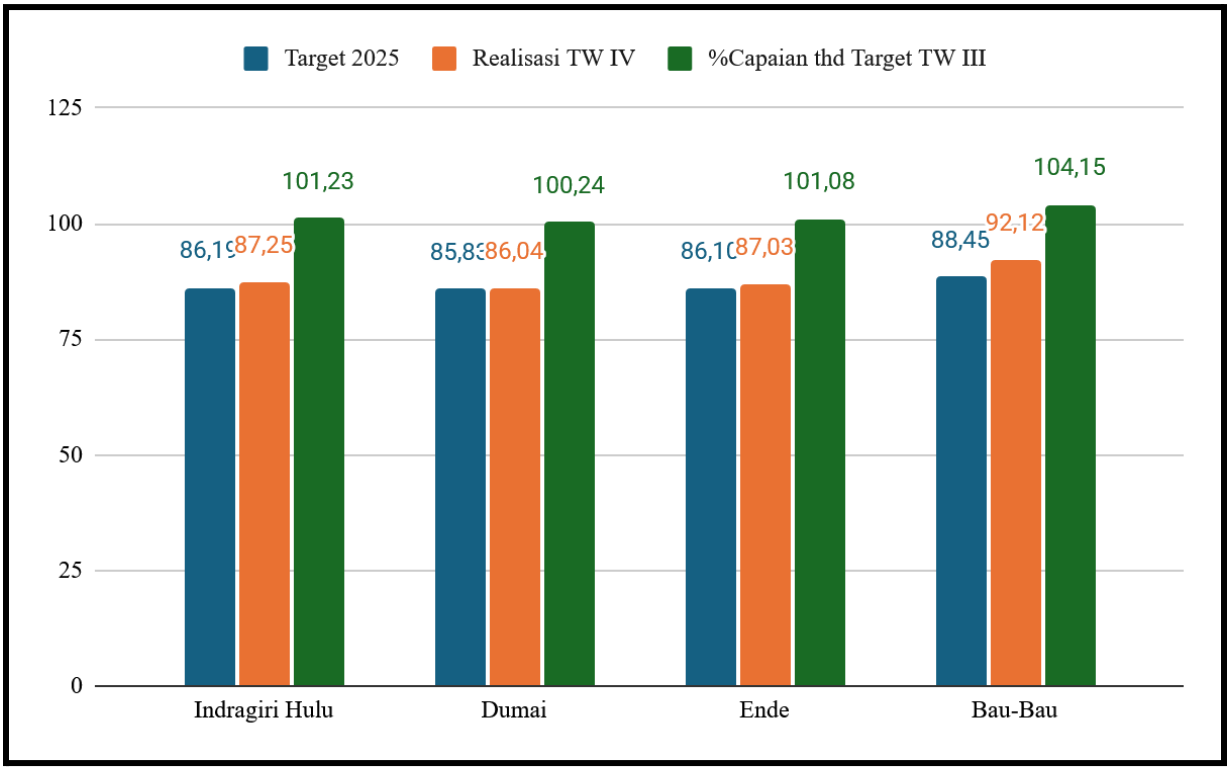
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	89,64	87,25	97,33%	Akan Tercapai

Realisasi target kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2025 adalah 87,25 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 89,64, maka capaian yang diperoleh yaitu 97,33% dan termasuk kategori akan tercapai, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang untuk dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Bau-Bau memperoleh capaian tertinggi sebesar 104,15%, diikuti oleh UPT Indragiri Hulu sebesar 101,23%, UPT Ende sebesar 101,08%, dan UPT Dumai sebesar 100,24%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, seluruh capaian yang berada pada rentang 100–110% termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, kinerja seluruh UPT pada indikator ini telah menunjukkan efektivitas pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang optimal dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Responden belum memahami melakukan survei efektifitas KIE	Membuat Tools survei	Melakukan pendampingan kepada responden saat pengisian survei	Sudah terlaksana	Y	0-11	Responden belum memahami melakukan survei efektifitas KIE
2		Peserta KIE yang tidak hadir pada kegiatan KIE	Menyiapkan KAK kegiatan KIE, kontak person peserta KIE	Memastikan kehadiran peserta dan menentukan peserta pengganti	Sudah terlaksana	Y	0-12	Peserta KIE yang tidak hadir pada kegiatan KIE
3		Pemberian informasi secara langsung kepada beberapa masyarakat ditolak	Membuat Desain materi KIE	Melakukan KIE melalui media lain seperti iklan, medsos, podcast, radio,dll	Sudah terlaksana	Y	0-13	Peserta KIE yang tidak hadir pada kegiatan KIE

5. **Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**
   a. Adanya Planning Of Action (PoA) pada KIE Tatap Muka dan KIE Media dan dievaluasi setiap triwulan.
   b. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan Produk Pangan Olahan Terkemas untuk UMK secara Zoom Meeting
   c. Memanfaatkan alat peraga berupa Leaflet, brosur, banner, poster serta contoh produk yang mengandung bahan berbahaya atau tanpa izin edar dan video keamanan obat dan makanan untuk membantu penyampaian informasi lebih mudah dipahami masyarakat.
   d. Membuat konten KIE Media Sosial dan Media Elektronik.
   e. Melaksanakan kegiatan KIE "Pentingnya Gizi Seimbang dan Keamanan Pangan untuk Pencegahan Stunting" pada Daerah Lokus Stunting

Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu mendapatkan target Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman sebanyak 1 (empat) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Indragiri Hulu.

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman	1,00	1,00	100%	Baik	

Target Indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 dengan realisasi sebesar 1, sehingga perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 atau persentase capaian kinerja Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman adalah 100 % dengan kriteria capaian baik.

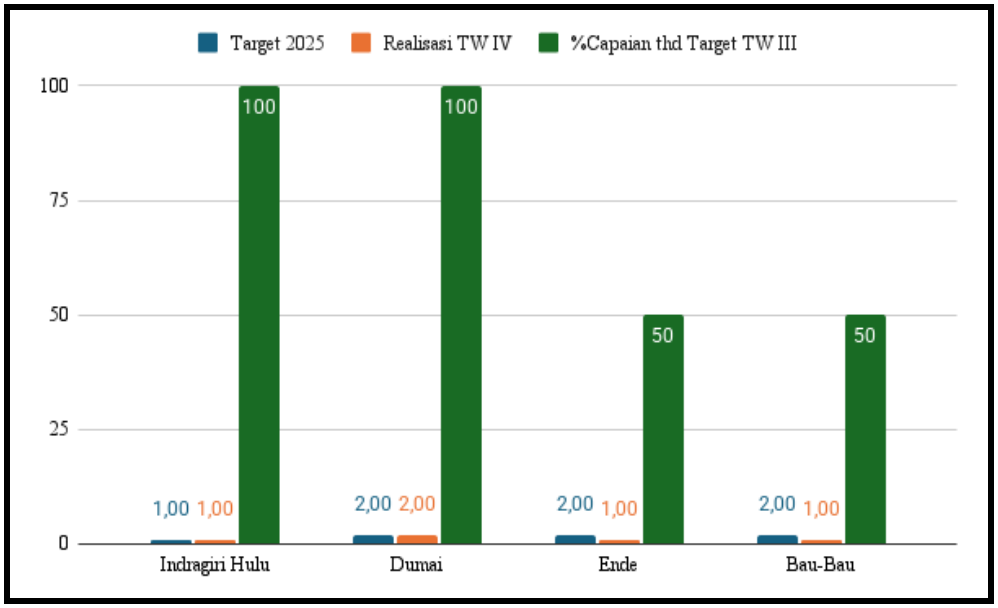
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman	5	1	20,00%	Perlu Upaya Keras 

Realisasi target kinerja Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 lembaga bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 5 lembaga, maka capaian yang diperoleh yaitu 20,00% dan termasuk kategori Perlu Upaya Keras, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang untuk dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Indragiri Hulu dan UPT Dumai masing-masing mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, UPT Ende dan UPT Bau-Bau masing-masing memperoleh capaian sebesar 50% dari target.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian sebesar 100% termasuk dalam kategori "Baik", sedangkan capaian 50% berada di bawah kriteria "Cukup". Dengan demikian, kinerja Indragiri Hulu dan Dumai pada indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan, sementara Ende dan Bau-Bau masih perlu melakukan upaya optimalisasi agar pembudayaan keamanan pangan di sekolah dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Jumlah Sekolah Yang Melaksanak	Sekolah perluasan tidak bersedia	Komitmen Kader	Memberikan informasi dan	Sudah terlaksana	Y	0-14	Sekolah perluasan tidak bersedia

	an Pembudaya an Pangan Aman	melakukan replikasi program pangan aman		motivasi terkait perlombaa n program sekolah pangan aman				melakukan replikasi program pangan aman

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Komitmen dan Dukungan Pemangku Kepentingan : Keberhasilan kegiatan didukung oleh komitmen kuat dari pihak sekolah (kepala sekolah, guru UKS/kantin) serta dukungan lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Puskesmas setempat dalam implementasi pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolah.

b. Perencanaan dan Koordinasi yang Baik

Perencanaan kegiatan yang sistematis, termasuk penentuan sasaran sekolah, jadwal sosialisasi, serta pembagian peran tim pelaksana, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi internal Balai POM berjalan efektif sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana.

c. Materi Edukasi yang Relevan dan Mudah Dipahami

Materi pembudayaan pangan aman disusun secara kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah, sehingga meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif warga sekolah.

d. Pendekatan Partisipatif

Pelibatan aktif guru, siswa, pengelola kantin, dan kader sekolah dalam kegiatan edukasi, simulasi, serta monitoring mendorong terbentuknya kebiasaan positif terkait keamanan pangan di sekolah.

e. Monitoring dan Evaluasi yang Konsisten

Pelaksanaan monitoring dan pendampingan secara berkala membantu memastikan tindak lanjut hasil pembinaan, sehingga sekolah lebih konsisten dalam menerapkan prinsip pembudayaan pangan aman.

Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa

yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan Indeks Desa Membangun IDM > 0,707 dan ≤0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Pada Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu mendapatkan target Jumlah Desa Pangan Aman sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Indragiri Hulu.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Jumlah Desa Pangan Aman	1	1	100%	Baik	

Target Indikator Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 dengan realisasi sebesar 1, sehingga perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 atau persentase capaian kinerja Jumlah Desa Pangan Aman adalah 100 % dengan kriteria capaian baik.

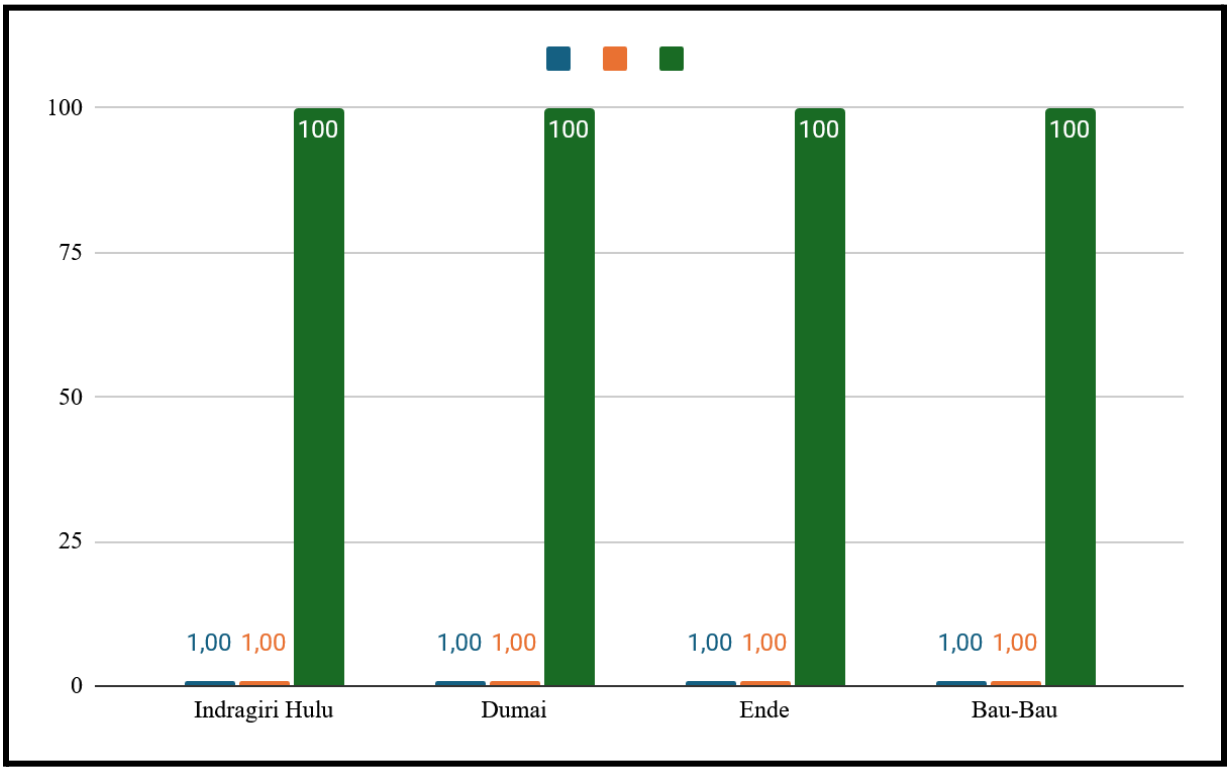
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Jumlah Desa Pangan Aman	3	1	33,33%	Perlu Upaya Keras 

Realisasi target kinerja Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025 adalah 1 lembaga bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3 lembaga, maka capaian yang diperoleh yaitu 33,33% dan termasuk kategori Perlu Upaya Keras, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategis, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang untuk dapat mencapai target akhir renstra pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah Desa Pangan Aman” Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh UPT, yaitu Indragiri Hulu, Dumai, Ende, dan Bau-Bau, masing-masing telah merealisasikan 1 (satu) desa dari target 1 (satu) desa yang ditetapkan, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian pada rentang 90–100% termasuk dalam kategori “Baik”. Dengan demikian, kinerja seluruh UPT pada indikator ini telah memenuhi target yang direncanakan dan berada pada kategori “Baik”, tanpa terdapat perbedaan

tingkat capaian antar UPT karena seluruhnya mencapai realisasi yang sama sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Jumlah Desa Pangan Aman	Desa yang diintervensi tidak melaksanakan program secara berkelanjutan	Komitmen Kader	Melakukan pengawalan desa yang sudah diintervensi untuk berkomitmen tetap melaksanakan program pada tahun selanjutnya, dan melakukan kerjasama dengan PKK untuk memasukan program pangan aman dalam kegiatan rutin yang berkelanjutan	Sudah terlaksana	Y	0-15	Desa yang diintervensi tidak melaksanakan program secara berkelanjutan

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

a. Kegiatan Koordinasi yang solid antara Balai POM di Indragiri Hulu dengan pemerintah daerah kab/kota dan kelurahan yang diintervensi
b. Monitoring dan evaluasi melalui grup *WhatsApp* dan rapat langsung dengan tim keamanan pangan dan kader keamanan pangan kelurahan yang diintervensi
c. Kerjasama program dengan puskesmas, dinas kesehatan, dinas ketahanan pangan dan dinas terkait lainnya yang dapat menunjang keamanan pangan di Kab/Kota yang diintervensi

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari

sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Indragiri Hulu.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	Baik	

Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 adalah 1 lembaga dengan realisasi 1 lembaga, sehingga perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 atau persentase capaian kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 100 % dengan kriteria capaian baik.

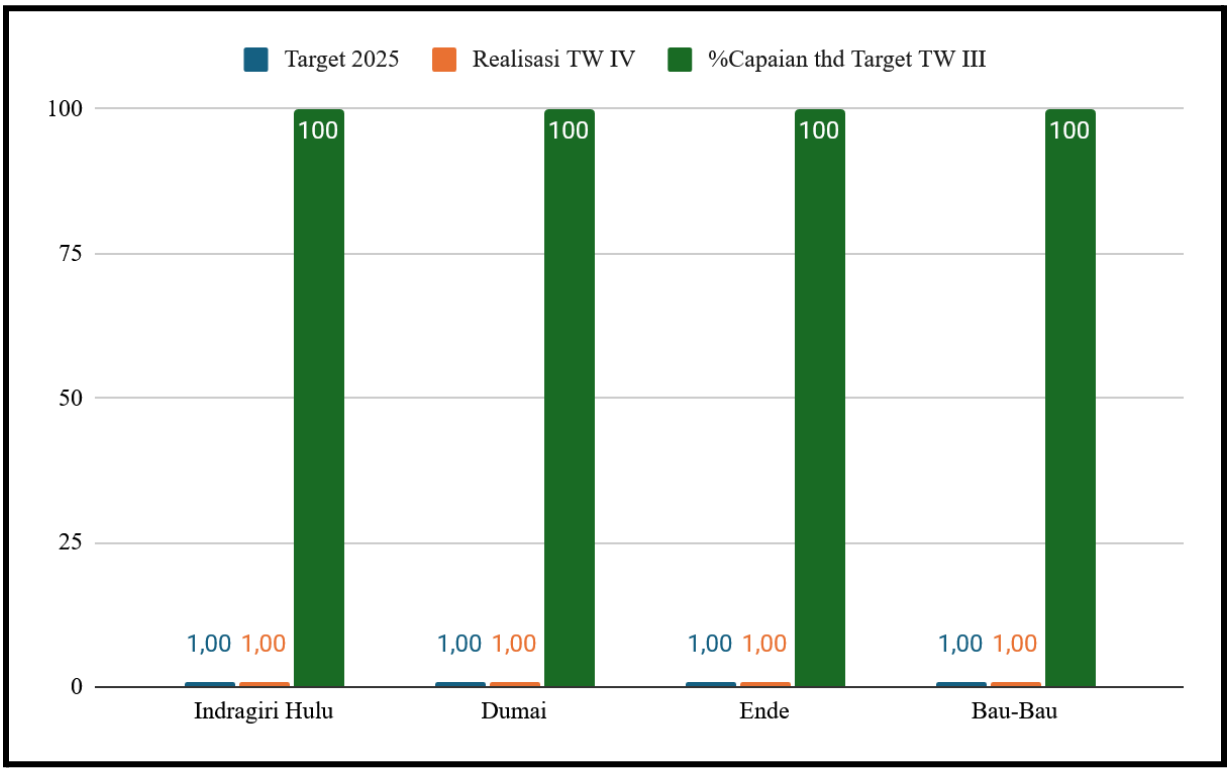
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1	100%	Tercapai 

Realisasi target kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025 adalah 1 lembaga bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1 lembaga, maka capaian yang diperoleh yaitu 100% dan termasuk kategori Tercapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas” Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh UPT, yaitu Indragiri Hulu, Dumai, Ende, dan Bau-Bau, masing-masing telah merealisasikan 1 (satu) pasar dari target 1 (satu) pasar yang ditetapkan, sehingga memperoleh capaian sebesar 100%.

Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian pada rentang 90–100% termasuk dalam kategori “Baik”. Dengan demikian, kinerja seluruh UPT pada indikator ini telah memenuhi target yang direncanakan dan berada dalam kategori “Baik”, tanpa terdapat perbedaan tingkat capaian antar UPT karena seluruhnya mencapai realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kader pasar aman tidak melaksanakan tugas dengan baik	Membuat Materi bimbingan teknis	Melakukan bimbingan teknis ulang kepada kader	Sudah terlaksana	Y	0-16	Kader pasar aman tidak melaksanakan tugas dengan baik

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

a. Dilaksanakannya koordinasi dan kerjasama yang baik khususnya untuk program-program dari lintas sektor yang bisa diintegrasikan dengan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
b. Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan dan Pengawalan Program Pasar Aman berbasis Komunitas di lokus intervensi tahun sebelumnya.
c. Monitoring dan mengevaluasi kegiatan Kader Keamanan Pangan Pasar yang telah dibentuk secara berkala dan mendorong kreatifitas kader dalam memunculkan inovasi tentang keamanan pangan di pasar.

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan

Peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan merupakan salah satu prioritas utama Badan POM untuk meningkatkan daya saing UMKM baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Sejalan dengan itu, Balai POM di Indragiri Hulu secara aktif melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM terutama produk pangan olahan, kosmetik dan Obat Bahan Alam. Bentuk pendampingan yang dilakukan antara lain pelaksanaan KIE terkait Keamanan Pangan bagi pelaku usaha pangan olahan, dilakukannya

Bimtek IPCPPOB/CPKB/CPOTB bagi pelaku usaha UMKM Pangan Olahan, Kosmetik, dan Obat Bahan Alam (OBA), serta melakukan Fasilitasi pendampingan dalam proses Sertifikasi/Registrasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha skala UMKM dan dapat memberikan bukti nyata dukungan bagi UMKM sehingga secara tidak langsung juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di era pemulihan ekonomi sekarang ini.

Sasaran strategis Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu diukur dengan indikator kinerja utama adalah Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Bahan Alam (OBA), Kosmetik yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Ruang Lingkup UMKM yang didampingi adalah:

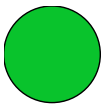
a. UMKM Pangan Olahan yang mencakup Usaha Mikro dan Kecil
b. UMKM Kosmetik yaitu Industri Kosmetik Golongan A dan Industri Kosmetik Golongan B
c. UMKM OBA mencakup UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional) dan UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional)

Cara perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat

cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB

Persentase UMKM yang didampingi = (% UMKM Pangan Olahan yang didampingi + %UMKM Kosmetik yang didampingi + %UMKM OBA yang didampingi) / Jumlah UMKM yang didampingi tahun 2025

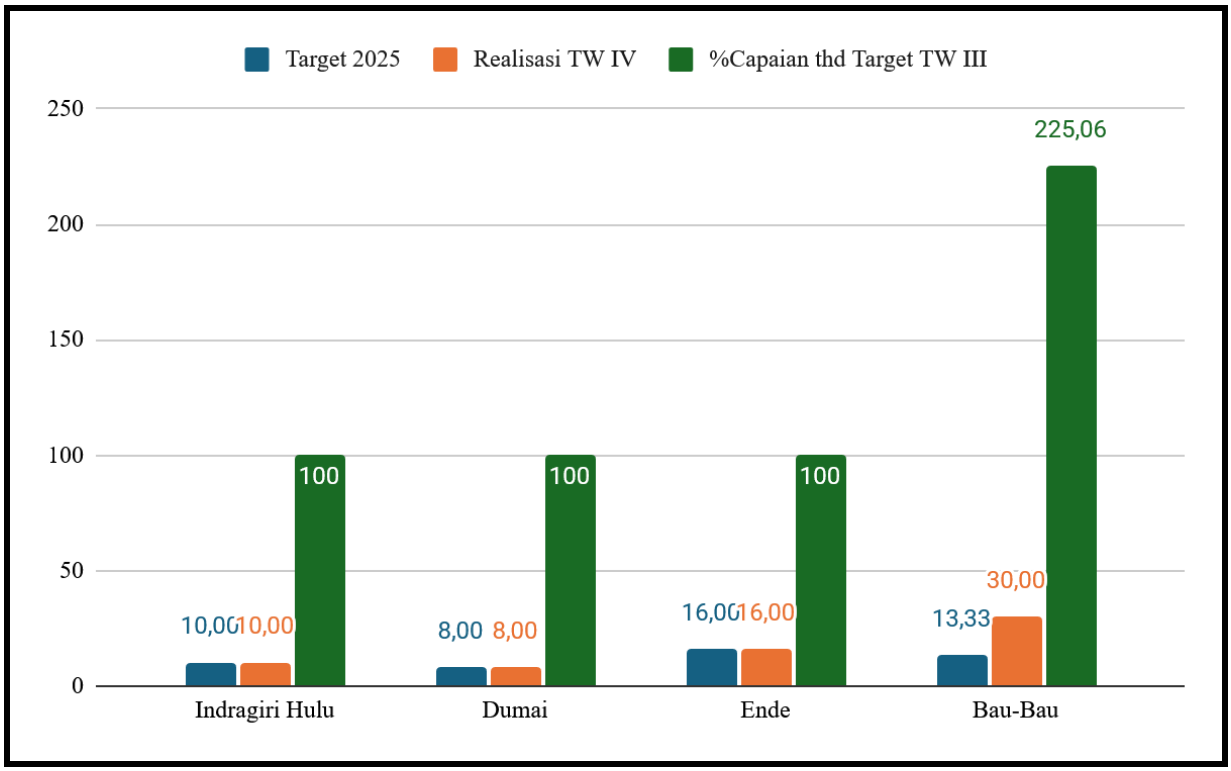
1. **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**
   Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET Tahun 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan	10,00	10,00	100	Baik 

Perbandingan Target Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan yakni 10,00 dengan realisasi sebesar 10,00 sehingga capaian yang diperoleh pada Tahun 2025 sebesar 100 % dengan kriteria Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang baik Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Kosmetik yang Baik (CPKB), dan/atau Izin Penerapan CPPOB Pangan Olahan" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Indragiri Hulu, Dumai, dan Ende masing-masing mencapai realisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan penilaian, capaian pada rentang 90–100% termasuk dalam kategori "Baik", sehingga ketiga UPT tersebut dinilai telah memenuhi target kinerja secara optimal.

Sementara itu, UPT Bau-Bau mencatatkan capaian sebesar 225,06% dari target yang ditetapkan. Mengingat capaian melebihi 110%, maka berdasarkan ketentuan penilaian, hasil tersebut tidak dapat disimpulkan kategorinya, meskipun secara kuantitatif menunjukkan realisasi yang jauh melampaui target. Secara umum, kinerja pada indikator ini telah menunjukkan pemenuhan target oleh sebagian besar UPT, dengan capaian yang berada pada kategori "Baik".

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR	REALISASI TAHUN	CAPAIAN TERHADAP	KRITERIA CAPAIAN

		RENSTRA	2025	TARGET AKHIR RENSTRA (%)	
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	86,67	10,00	11,54%	Perlu Upaya Keras 

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh pada tahun 2025 adalah 10,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 86,67%, maka capaian yang diperoleh yaitu 11,54% dan termasuk kategori perlu upaya keras, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir renstra dapat tercapai.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

Dari capaian indikator kinerja ini diperoleh capaian Baik' sampai dengan akhir tahun 2025 dari Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IPCPPOB pangan olahan. Tahapan pendampingan sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dimulai dari penetapan target UMKM dan Pelaksanaan Kegiatan KIE/Sosialisasi kepada pelaku usaha, dan sudah dilaksanakan desk IP CPPOB dan CPOTB serta kegiatan fasilitasi atau pendampingan langsung kepada pelaku usaha.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	UMKM yang dibina tidak bekomitmen saat dilakukan pembinaan dalam pemenuhan standar	Melakukan Monitoring Pendampingan, Membuat Surat Komitmen Pelaku Usaha	Meningkatkan dan menggalang komitmen UMKM yang dibina	Sudah terlaksana	Y	0-17	UMKM yang dibina tidak bekomitmen saat dilakukan pembinaan dalam pemenuhan standar
2		Keterbatasan dalam penguasaan semua aplikasi registrasi BPOM dan Pelayanan Terpadu	1. Sertifikat pelatihan 2. Data kompetensi petugas	Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi fasilitator dan desiminasi kepada petugas	Sudah terlaksana	Y	SDM-07	Keterbatasan dalam penguasaan semua aplikasi registrasi BPOM dan Pelayanan Terpadu

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Upaya perbaikan kinerja telah dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu ke depan untuk mencapai target kinerja Pendampingan UMKM:

a. Secara berkala mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi Petugas /fasilitator
b. Fasilitator melaksanakan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha secara optimal baik melalui kegiatan pendampingan secara langsung /tatap muka maupun pendampingan secara online/daring serta petugas melakukan follow up secara berkala kepada pelaku usaha sehingga kendala-kendala dapat segera diselesaikan oleh pelaku usaha.

3.1.5. CAPAIAN SASARAN KEGIATAN V

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BPOM di Payakumbuh diwujudkan melalui indikator kinerja utama yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Indragiri Hulu. Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut :

3.1.5.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Indragiri Hulu

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahapan penyidikan meliputi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap I), Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P21), dan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap II). Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

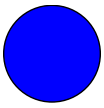
d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Perhitungan capaian berdasarkan formulasi sebagai berikut: Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%.

3.1.6.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95,00	100,00	105,26	Sangat Baik 

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).
2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
   a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
   b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM di Indragiri Hulu memiliki target pada tahun 2025 sebesar 95,00% dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian terhadap target sebesar 105,26% dengan kategori “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

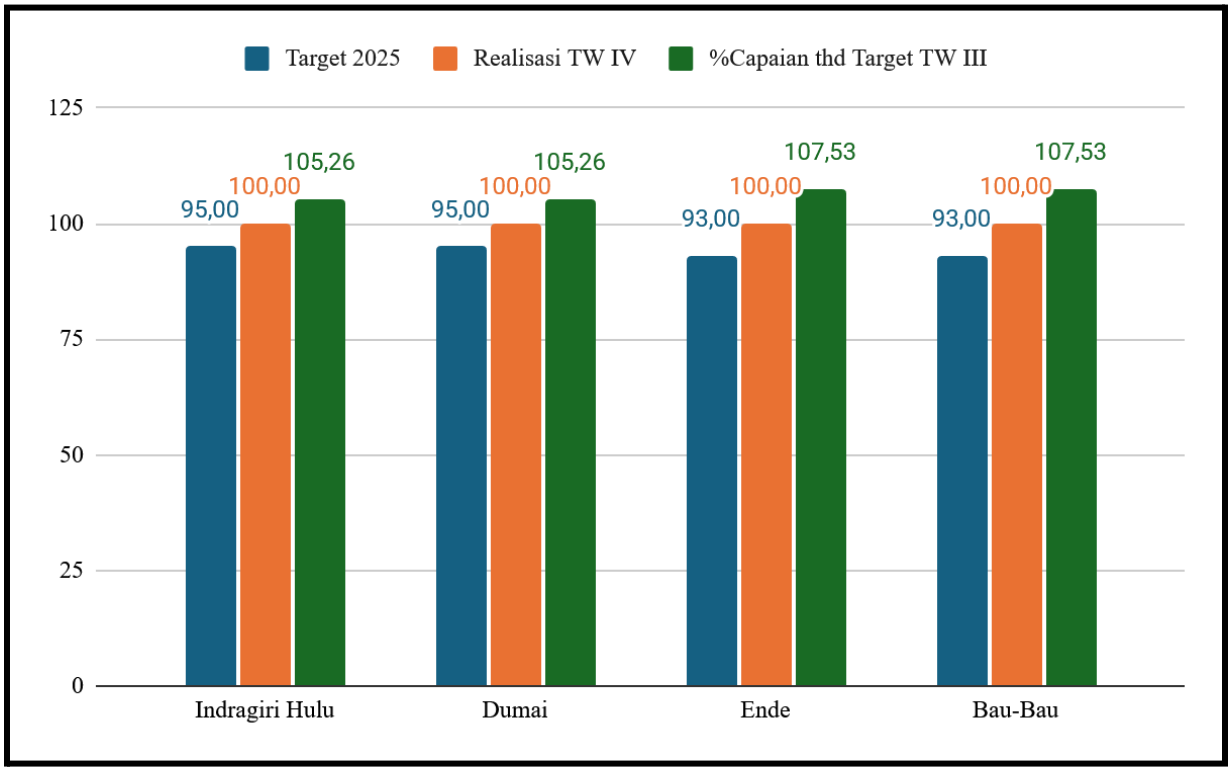
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN

1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	99%	100%	101,01%	Melampaui Target

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 adalah 90%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 94%, maka capaian yang diperoleh yaitu 84,6% dan termasuk kategori akan tercapai, sehingga perlu dilakukan perencanaan strategi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih matang pada tahun-tahun berikutnya agar target akhir renstra dapat tercapai.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan” Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh UPT mencapai realisasi sebesar 100%. Secara persentase capaian terhadap target, UPT Ende dan Bau-Bau mencatatkan capaian tertinggi masing-masing sebesar 107,53%, diikuti oleh UPT Indragiri Hulu dan Dumai dengan capaian sebesar 105,26%. Seluruh capaian berada pada rentang 100–110%, sehingga berdasarkan ketentuan penilaian termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja pada indikator ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi penindakan dan penyidikan yang optimal di masing-masing wilayah kerja UPT.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tersangka Melarikan Diri	Surat Penangguhan Penahanan	dilakukan penangguhan penahanan	Sudah dilaksanakan	Y	H-01	Tersangka Melarikan Diri
2		Kurang terjaminnya keselamatan petugas penyidikan	Membuat Surat Permohonan Bantuan Personel dalam rangka bantuan penindakan dan penyidikan	Meminta pendampingan kepada Polres untuk menjamin keamanan dan keselamatan petugas	Sudah dilaksanakan	Y	K3-03	Kurang terjaminnya keselamatan petugas penyidikan
3		- terdapat benturan kepentingan antara petugas	Membuat Pakta Integritas	1. melakukan penandatanganan Pakta Integritas 2.	Sudah dilaksanakan	Y	R-01	- terdapat benturan kepentingan antara

		dan masyarakat		Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi				petugas dan masyarakat
4		PPNS Balai POM Indragiri Hulu tidak dapat melakukan penyidikan	Membuat Surat Permohonan pelatihan PPNS dan Surat Permintaan Bantuan tenaga PPNS	1. mengusulkan pelatihan PPNS 2. meminta bantuan PPNS BBPOM Pekanbaru	Sudah dilaksanakan	Y	SDM-08	PPNS Balai POM Indragiri Hulu tidak dapat melakukan penyidikan
5		Hilang atau Rusaknya Barang Bukti / Barang Temuan di Gudang Barang Bukti/Barang Temuan Balai POM di Indragiri Hulu	CCTV dan SK Pengelola Barang Bukti/Barang Temuan	Terdapat CCTV didalam Gudang dan mengunci gudang, kemudian kunci gudang dipegang oleh ketua Pengelola Barang Bukti/Barang Temuan	Sudah dilaksanakan	Y	H-02	Hilang atau Rusaknya Barang Bukti / Barang Temuan di Gudang Barang Bukti/Barang Temuan Balai POM di Indragiri Hulu

Telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan, serta segala penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan telah dilaksanakan.

5. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Berikut kegiatan upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja):

1. Melakukan perencanaan untuk patroli siber tidak terbatas pada marketplace, tapi mulai patroli siber pada forum jual beli pada media sosial;
2. Mengikuti pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polri, maupun UPT lainnya di lingkungan Badan POM;
3. Memperkuat jejaring intelijen dan pertukaran informasi terkait adanya pelanggaran maupun tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan lintas sektor terkait seperti BNN, Bea Cukai dan Asperindo.

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform e-commerce dan hasil penelusuran pada open source lainnya. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi untuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan Inovasi Pulau Bangka.

3.1.6 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VI

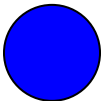
Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Indragiri Hulu

Kegiatan deteksi dini kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan usaha, kegiatan atau tindakan mengetahui, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah dugaan dan potensi kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mengantisipasi berbagai perkembangan situasi dan dapat ditangani secara profesional dan proporsional sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Deteksi dini dilakukan dengan menyusun laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling

Siber) dan Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT.

3.1.6.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

e. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,79	Sangat Baik 

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling).

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:

   6. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
   7. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM di Indragiri Hulu memiliki target pada tahun 2025 sebesar 90,00% dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar 97,92%. Capaian terhadap target sebesar 108,79% dengan kategori “Sangat Baik”.

f. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2024 belum ada IKU terkait Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, jadi belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

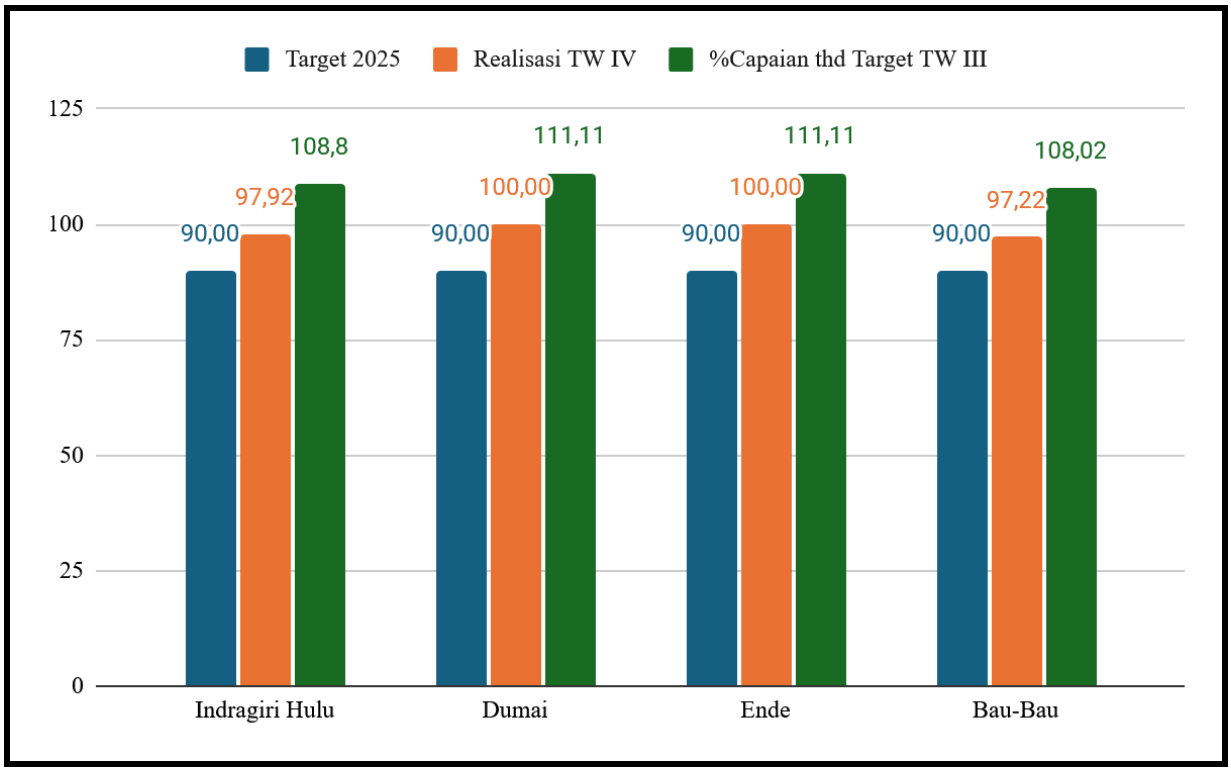
g. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94%	90%	104,17%	Melampui Target 

Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada tahun 2025 adalah 90%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 94%, maka capaian yang diperoleh yaitu 104,17% dan termasuk kategori Melampaui Target.

h. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar di Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Dumai dan UPT Ende memperoleh capaian tertinggi masing-masing sebesar 111,11%, sehingga berada di atas rentang 110% dan tidak dapat disimpulkan sesuai kriteria penilaian. Selanjutnya, UPT Indragiri Hulu mencapai capaian sebesar 108,80% dan UPT Bau-Bau sebesar 108,02%, yang keduanya berada pada rentang 100–110% dengan kriteria "Sangat Baik". Secara umum, kinerja penyelesaian laporan analisis kejahatan pada seluruh UPT menunjukkan pelaksanaan fungsi analisis dan pelaporan yang optimal, dengan mayoritas capaian berada pada kategori sangat baik.

i. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

						(Y/T)*		
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Analisis penelusuran siber (Patroli siber dan profiling siber) tidak terlaksana sesuai dengan timeline pelaporan	Kertas kerja penetapan target dan monitoring penelusuran siber.	Monitoring dan evaluasi pelaporan penelusuran siber setiap bulannya.	Sudah terlaksana	Y	SDM-09	Analisis penelusuran siber (Patroli siber dan profiling siber) tidak terlaksana sesuai dengan timeline pelaporan
2		Sebagian besar SDM belum mengikuti pendidikan atau pelatihan analisis cegah tangkal, dan UPT hanya memiliki satu orang analis yang telah mengikuti diklat terkait.	Laporan manual via srikandi/ email.	Komunikasi dengan PIC Laporan Siber BPOM pusat agar dapat melakukan perbaikan pada aplikasi atau melaporkan dengan laporan manual	Sudah terlaksana	Y	IT-01	Sebagian besar SDM belum mengikuti pendidikan atau pelatihan analisis cegah tangkal, dan UPT hanya memiliki satu orang analis yang telah mengikuti diklat terkait.
3		Laporan Analisis kejahatan tidak sesuai dengan ketentuan.	Dokumen rancangan kajian analisis	Menyusun rancangan kajian analisis	Sudah terlaksana	Y	0-18	Laporan Analisis kejahatan tidak sesuai dengan ketentuan.

Telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan, serta segala penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan telah dilaksanakan.

j. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan atau program kerja tim kerja penindakan di tahun 2025 dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan capaian kinerja. Secara rutin telah dilakukan pemenuhan laporan Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) secara tepat waktu dan sesuai pedoman yang ditetapkan.

Kegiatan penelusuran siber yang dilaksanakan mengacu pada data pemetaan kerawanan kejahatan dari tahun sebelumnya dan hasil kegiatan intelijen menggunakan berbagai platform media sosial, platform e-commerce dan hasil penelusuran pada open source lainnya. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan deteksi dini dibutuhkan jejaring intelijen dan pertukaran informasi untuk mengidentifikasi masalah dugaan, potensi kejahatan dan tindak pidana kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan lintas sektor terkait melalui kegiatan penggalangan lintas sektor seperti BINDA, BNN, Bea Cukai, Polri, Asperindo serta lintas sektor lainnya dengan Inovasi Pulau Bangka.

3.1.7 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN VII

LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Capaian Sasaran Kinerja layanan publik UPT yang prima di wilayah kerja Balai POM di Indragiri Hulu diukur dengan indikator kinerja sebagaimana pada tabel berikut:

NO.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	NILAI PENCAPAIAN INDIKATOR	KRITERIA CAPAIAN	
1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	4,67	115,31	Tidak Dapat Disimpulkan	

3.1.7.1 Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian/Lembaga berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- Profesionalitas SDM (25%);
- Sarana Prasarana (18%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Nilai indeks pelayanan publik dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria Capaian	
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	4,67	115,31%	Tidak Dapat Disimpulkan	

Target Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 adalah 4,05 dengan realisasi sebesar 4,67 sehingga perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 atau persentase capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Indragiri Hulu adalah 115,31 % dengan kriteria capaian sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target akhir renstra

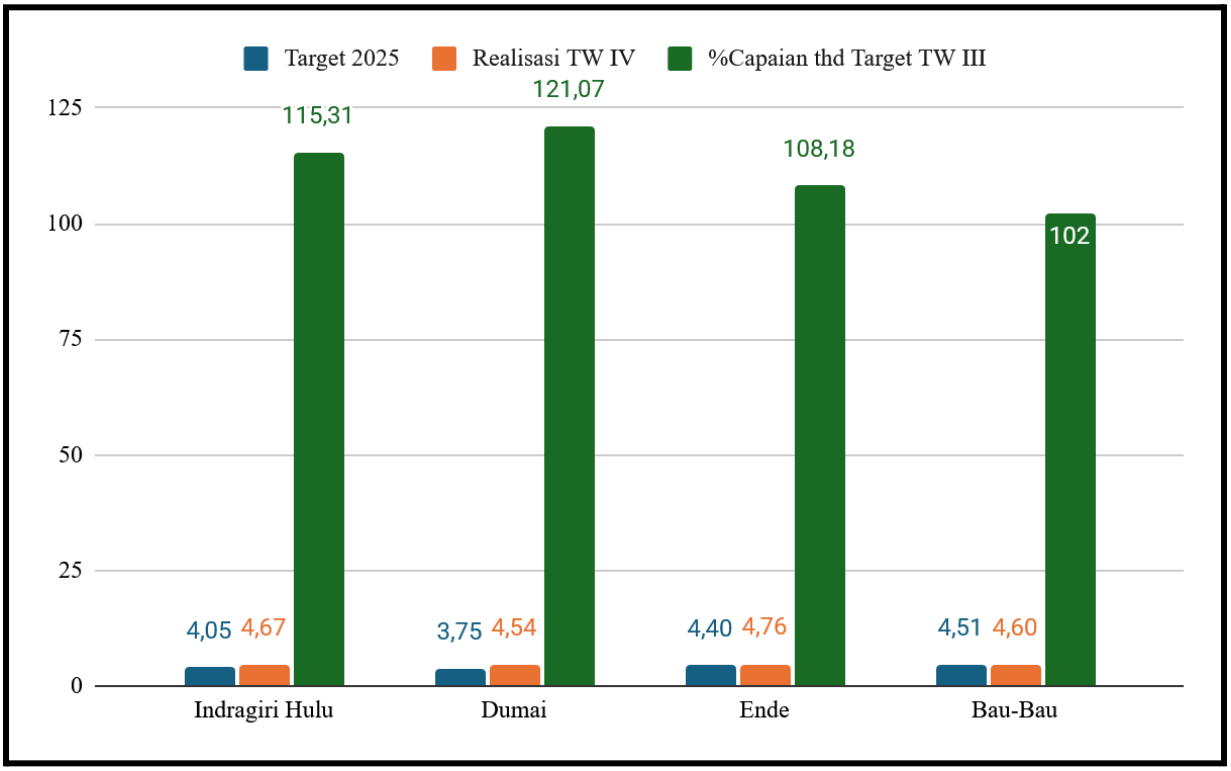
NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA (%)	KRITERIA CAPAIAN

1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,51	4,67	103,55%	Melampuai Target

Realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Indragiri Hulu tahun 2025 adalah 4,67 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 4,51 maka capaian yang diperoleh yaitu 103,55% dan termasuk kategori Melampaui Target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT Lain

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Indragiri Hulu pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenisnya yaitu Balai POM di Dumai, Balai POM di Ende, dan Balai POM di Bau-Bau dapat digambarkan dalam grafik berikut :



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) “Indeks Pelayanan Publik UPT” Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Dumai memperoleh capaian tertinggi sebesar 121,07%, diikuti oleh UPT Indragiri Hulu sebesar 115,31%. Kedua capaian tersebut berada di atas 110%, sehingga sesuai ketentuan tidak dapat disimpulkan kategorinya. Selanjutnya, UPT Ende mencapai 108,18% dan UPT Bau-Bau sebesar

102,00%, yang keduanya berada pada rentang 100–110% dengan kriteria “Sangat Baik”. Secara umum, kinerja pelayanan publik pada seluruh UPT menunjukkan hasil yang sangat optimal, dengan mayoritas capaian berada pada kategori sangat baik dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepannya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Indeks Pelayanan Publik UPT	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik	Daftar GAP pemenuhan kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kelengkapan sarana prasarana pelayanan publik	Sudah Terlaksana	Y	0-19	Kurangnya sarana prasarana pelayanan publik

Keberhasilan penyempurnaan kinerja Tingkat Efektifitas Indeks Pelayanan Publik ini sangat dipengaruhi oleh pemenuhan semua aspek penilaian indeks pelayanan publik serta dilakukan evaluasi dari hasil penilaian sebelumnya agar dapat dilengkapi pada tahun

5. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Efektivitas Indeks Pelayanan Publik ini sangat dipengaruhi oleh:

a. Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik yang ada di Balai POM di Indragiri Hulu.
b. Adanya Inovasi pelayanan publik yang perlu dikembangkan untuk mempermudah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

3.1.8 CAPAIAN SASARAN KEGIATAN IX

Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Keberhasilan capaian sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai AKIP UPT BPOM dengan capaian kinerja sebesar 99,54% (Baik)
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan capaian kinerja sebesar 100% (Baik)
- Indeks Manajemen Risiko dengan capaian kinerja sebesar 96,93% (Baik)
- Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT sebesar 100,00% (Baik)

3.1.8.2 Nilai AKIP UPT BPOM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM; dan
c. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja,pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja.
Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 dikategorikan BB (Sangat Baik) yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

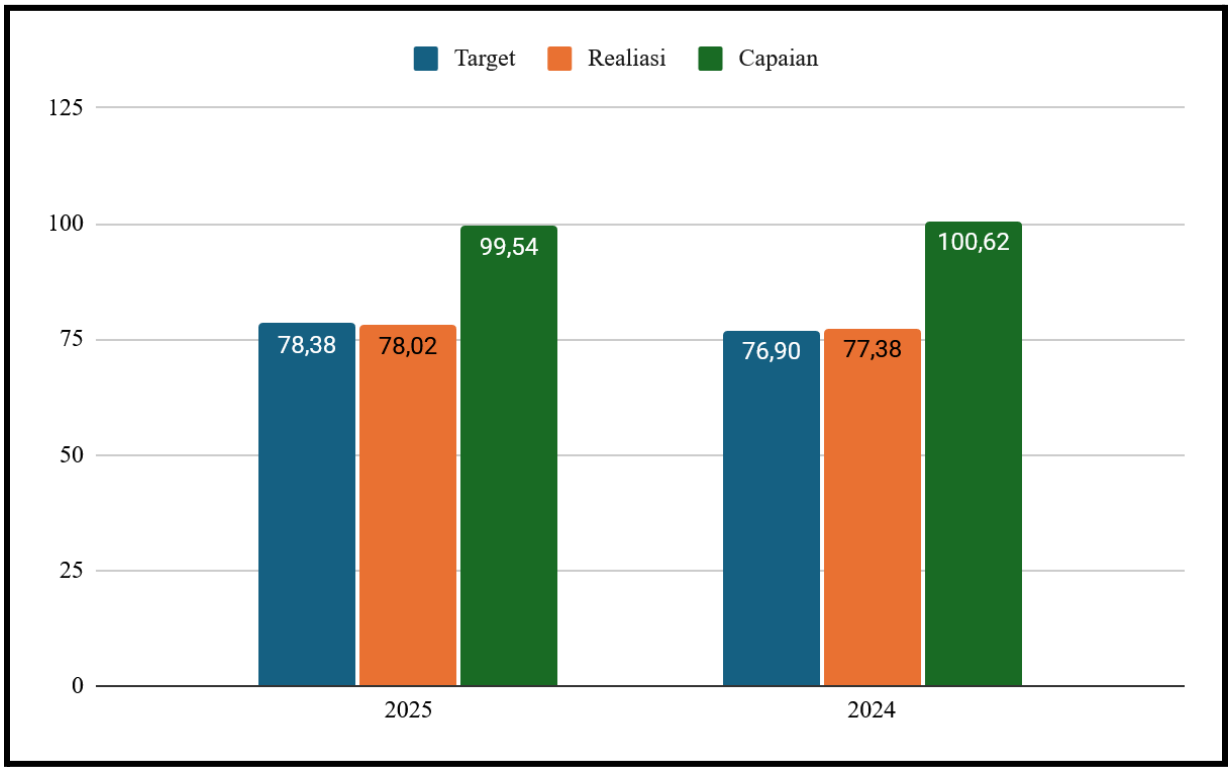
No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,76	17,76
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,28	18,48
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,24	9,84
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	14,80	14,80
5.	Capaian Kinerja	20	18,30	17,14
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**77,38**	**78,02**
Predikat			**BB**	**BB**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	78,38	78,02	99,54	Baik 

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Nilai AKIP Balai POM di Indragiri Hulu dicapai nilai sebesar 78,02 dari target 75,00, dengan persentase capaian sebesar 99,59%. Capaian tersebut termasuk dalam kategori “Baik”, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh masih belum optimal.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya



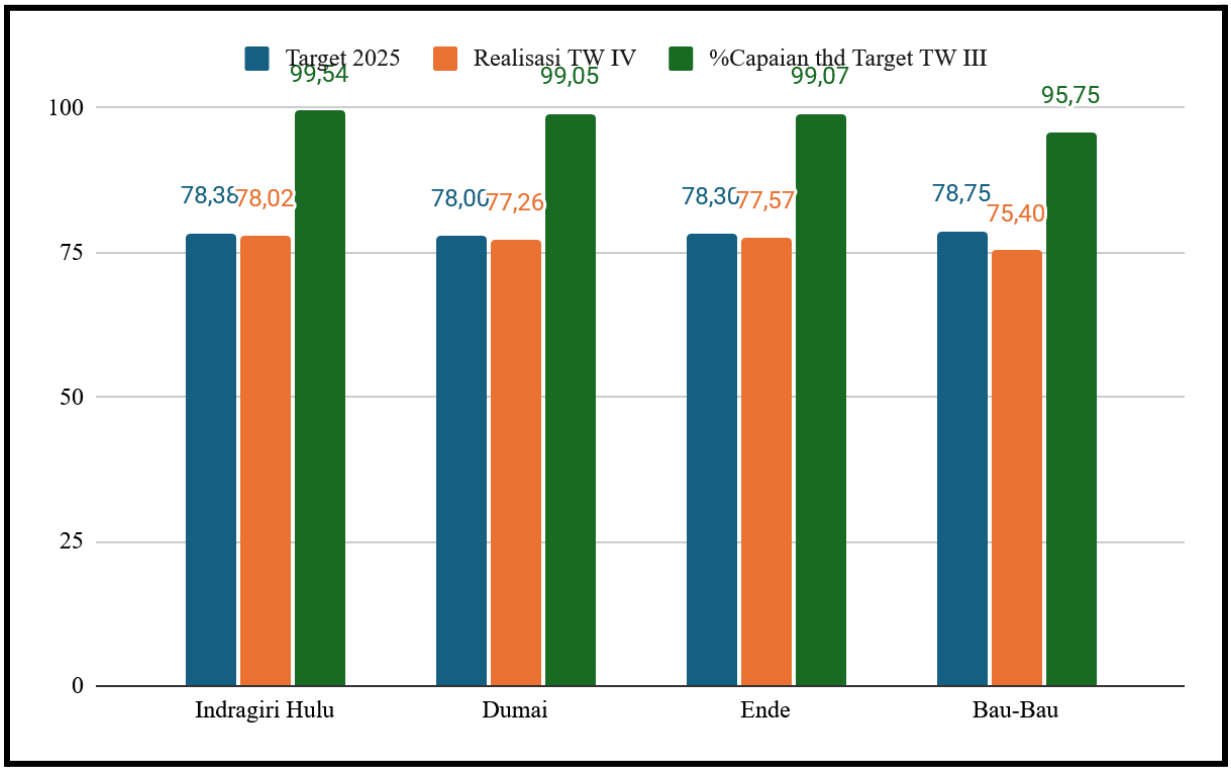
Capaian Nilai AKIP Balai POM di Indragiri Hulu pada Tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan Tahun 2024. Pada Tahun 2024, dari target 76,90 terealisasi sebesar 77,38 dengan capaian 100,62%, sehingga target dapat terpenuhi. Sementara itu, pada Tahun 2025 dengan target yang lebih tinggi yaitu 78,38, realisasi mencapai 78,02 dengan capaian sebesar 99,54%. Meskipun nilai realisasi Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2024, peningkatan target yang ditetapkan menyebabkan persentase capaian menjadi sedikit lebih rendah dan belum dapat mencapai target.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	80,03	78,02	97,49%	Akan Tercapai

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2029, untuk Indikator Nilai AKIP UPT BPOM ditetapkan target akhir sebesar 80,03. Sampai dengan Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu telah merealisasikan nilai sebesar 78,02 atau mencapai 97,49% terhadap target akhir Renstra tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa progres implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah berjalan dengan baik dan berada dalam kategori "Akan Tercapai". Dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra hingga Tahun 2029, diperlukan upaya penguatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan agar target akhir Renstra dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Nilai AKIP UPT" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Indragiri Hulu memperoleh capaian tertinggi sebesar 99,54%, diikuti oleh UPT Ende sebesar 99,07% dan UPT Dumai sebesar 99,05%, sedangkan capaian terendah diperoleh UPT Bau-Bau sebesar 95,75%. Seluruh capaian berada pada rentang 90–100%, sehingga berdasarkan ketentuan penilaian termasuk dalam kriteria "Baik". Secara keseluruhan, kinerja AKIP pada keempat UPT telah menunjukkan tingkat akuntabilitas yang

optimal dan konsisten dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan untuk mencapai kategori “Sangat Baik” pada periode selanjutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai AKIP UPT BPOM	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum menjamin terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, efisien	1. Nota Dinas 2. Daftar Hadir 3. Notulen 4. Kertas Kerja Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja	1. Melakukan sosialisasi pedoman penyelenggaran SAKIP dan Laporan Hasil Evaluasi AKIP unit kerja tahun n-1 untuk perbaikan dan peningkatan nilai AKIP tahun n+1 2. Melakukan monev AKIP setiap bulannya	Tahun 2026	Y	S-02	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum menjamin terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, efisien

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
   Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian Nilai AKIP Balai POM di Indragiri Hulu antara lain:

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai AKIP ditentukan oleh adanya perencanaan kinerja (bobotnya = 24), pengukuran kinerja (bobotnya = 24), pelaporan kinerja (bobotnya = 12), monitoring dan evaluasi kinerja (bobotnya = 20) yang baik serta adanya peningkatan pencapaian indikator kinerja dari tahun sebelumnya (bobotnya = 20).

Sebagai upaya untuk pencapaian target indikator NIlai AKIP pada periode penilaian pada periode berikutnya, langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain:

a. Penyusunan dokumen pendukung penyelenggaraan SAKIP yang lengkap dan terdokumentasi sehingga memudahkan penilaian kinerja dan verifikasi data
b. Komitmen pegawai di loka POM di Kabupaten Bungo dalam melaksanakan implementasi sakip sehingga laporan/data yang dikirimkan tepat waktu dan melaksanakan dengan maksimal target yang akan dicapai di setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya
c. 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala baik secara internal maupun lintas unit kerja

d. Membuat perencanaan pengembangan kompetensi personil Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait implementasi SAKIP
e. Mereviu SOP Monitoring dan Evaluasi

3.1.9.3 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1) Revisi DIPA (bobot 10%)

2) Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)

3) Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

4) Belanja Kontraktual (bobot 10%)

5) Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)

6) Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

7) Capaian Output (bobot 25%)

8) Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1) Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

2) Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan Dan Formula Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 adalah sebesar 91,78. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (EKA) sebesar 97,77 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96,21, yang dihitung dengan formula (EKA × 50%) + (IKPA × 50%). Dengan pembobotan masing-masing 50 persen, diperoleh NKA sebesar 6,99. Setelah dikonversi ke dalam skala penilaian 1–5, nilai tersebut setara dengan 5 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Rincian capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai POM di Indragiri Hulu Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	Konversi NKA
Balai POM di Indragiri Hulu	97,77	96,21	96,99	5

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100,00	Baik

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPOM Indragiri Hulu Tahun 2025 adalah sebesar 96,99. Setelah dikonversi ke dalam skala 1–5, nilai tersebut mencapai skor 5 sehingga telah memenuhi target kinerja dengan capaian 100%. Penilaian NKA terdiri atas dua komponen utama, yaitu

50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada Tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencapai 97,77, yang menunjukkan bahwa aspek perencanaan anggaran masih belum mencapai nilai optimal 100 dan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Sementara itu, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah memperoleh nilai 96,21.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, Balai POM di Indragiri Hulu memperoleh nilai sebesar 5 dari target 5, dengan persentase capaian sebesar 100,00% dan termasuk dalam kategori "Baik".

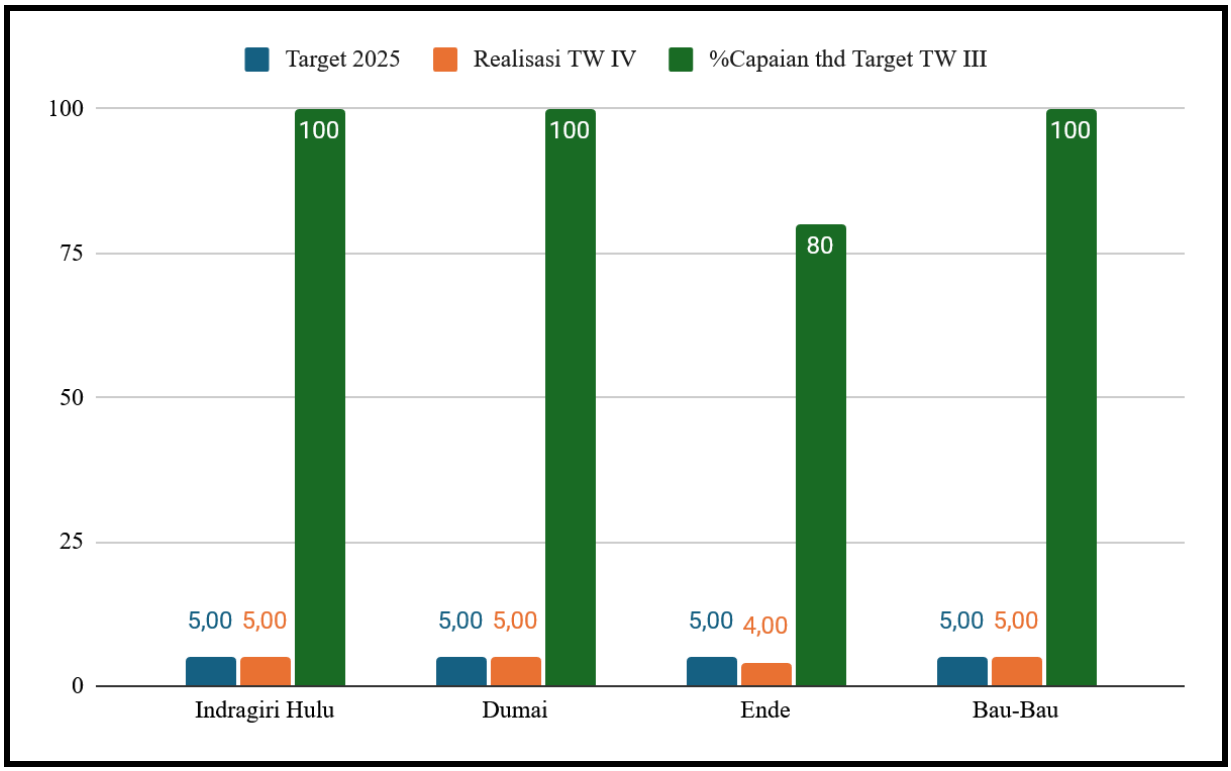
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Tercapai

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2029, untuk Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM ditetapkan target akhir sebesar 5. Sampai dengan Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu telah merealisasikan nilai sebesar 5 atau mencapai 100% terhadap target akhir Renstra tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa target akhir Renstra untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran telah terpenuhi pada Tahun 2025 dan termasuk dalam kategori "Tercapai". Dengan demikian, kinerja pengelolaan anggaran telah sesuai dengan sasaran jangka menengah yang ditetapkan, dan konsistensi capaian tersebut perlu dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain

Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran dilakukan antara Balai POM di Indragiri Hulu dengan beberapa UPT pembanding, yaitu Balai POM di Ende, Dumai, dan Bau-Bau. Kinerja keempat UPT tersebut disajikan pada grafik di berikut berdasarkan target, realisasi, dan persentase capaian.



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Nilai Kinerja Anggaran UPT" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Indragiri Hulu, Dumai, dan Bau-Bau masing-masing mencapai realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan, sehingga termasuk dalam kriteria "Baik" (rentang 90–100%). Sementara itu, UPT Ende memperoleh capaian sebesar 80% dan berada pada kriteria "Cukup". Dengan demikian, capaian tertinggi diraih secara bersama oleh UPT Indragiri Hulu, Dumai, dan Bau-Bau dengan nilai 100%, sedangkan capaian terendah diperoleh UPT Ende sebesar 80%. Secara umum, kinerja anggaran pada sebagian besar UPT telah menunjukkan pengelolaan yang optimal dan sesuai target yang ditetapkan pada Tahun 2025.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan .

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	1.1 Ketidakpedulian pelaksana dan pengelola anggaran dalam memahami aturan dan ketentuan dalam	1. Surat Pernyataan Benturan Kepentingan 2. Ikhtisar LHKPN 3. Pedoman pelaksanaan anggaran berupa Standar Biaya	1. Pelaporan conflict of interest pada sangintegritas.pom.go.id setiap triwulan 2. Pelaporan hasil	-	Y	Keu-01	Kecurangan yang disengaja dan merugikan keuangan negara

	pencairan anggaran 1.2 Pelaksana anggaran dan pelaku pengadaan barang/jasa dihadapkan dengan conflict of interest	Masukan (SBM) dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahunan (Juklak), serta layanan konsultasi SOLUSI 4. Evaluasi hasil audit PIPK oleh APIP	kekayaan dan aset pegawai pada LHKPN setiap tahun 3. Audit Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)				
	1.1 Pemahaman koordinator dalam pemenuhan kegiatan dan anggaran tidak akurat 1.2 Ketidakcermatan koordinator dalam menyusun dokumen penganggaran 2.1 Ketidakpedulian pelaksana anggaran dalam memahami aturan yang berlaku dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan 2.2 Ketidakpatuhan pelaksana anggaran dalam penyerahan dokumen pertanggungjawaban keuangan kepada PP/PPK 2.3 Keterbatasan waktu PP/PPK dalam menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan	1. DIPA dan POK yang disahkan 2. Aplikasi keuangan seperti OM-SPAN, SAKTI 3. Plan of Action (PoA) Keuangan dan Fisik	1. Mengikuti desk Bimtek Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran RKA-K/L n+1 oleh koordinator bersama APIP dan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM 2. Menyusun Plan of Action (PoA) Keuangan dan Fisik 3. Melakukan Monev setiap Bulan 4. Revisi anggaran tahun berjalan 5. Menjadwalkan waktu tertentu bagi PP/PPK untuk menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan	-	Y	S-03	Perencanaan RKA-K/L n+1 dan pelaksanaan DIPA tahun berjalan tidak matang dan tidak sesuai perencanaan
	1. Ketidakpatuhan petugas pengelola persediaan 2. Ketidakpedulian pemegang aset dalam menjaga aset dan Pemeliharaan aset tidak sesuai jadwal pemeliharaan ataupun pemeliharaan tidak sesuai dengan ketentuan 3. Ketidakpatuhan petugas pengelola aset dalam pencatatan aset pada aplikasi dan dalam pembaruan Daftar Barang Ruangan (DBR)	1. Jadwal pemeliharaan aset 2. Update DBR 3. Laporan Keuangan	1. Menjadwalkan waktu tertentu bagi petugas pengelola aset dan persediaan untuk pengelolaan dan pembaruan data aset dan persediaan 2. Menginformasikan tanggung jawab pengguna aset 3. Menganggarkan biaya pemeliharaan aset 4. Sosialisasi pengelolaan Aset dan BMN	-	Y	A-02	Kesalahan pencatatan persediaan, Kerusakan aset, Aset tidak mampu telusur dan kehilangan nilai aset

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

a) Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 96,99 menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran telah mendukung pencapaian pernyataan kinerja dengan kategori sangat baik.

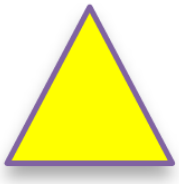
3.1.9.4 Indeks Manajemen Risiko

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	2,93	2,84	96,93	Baik 

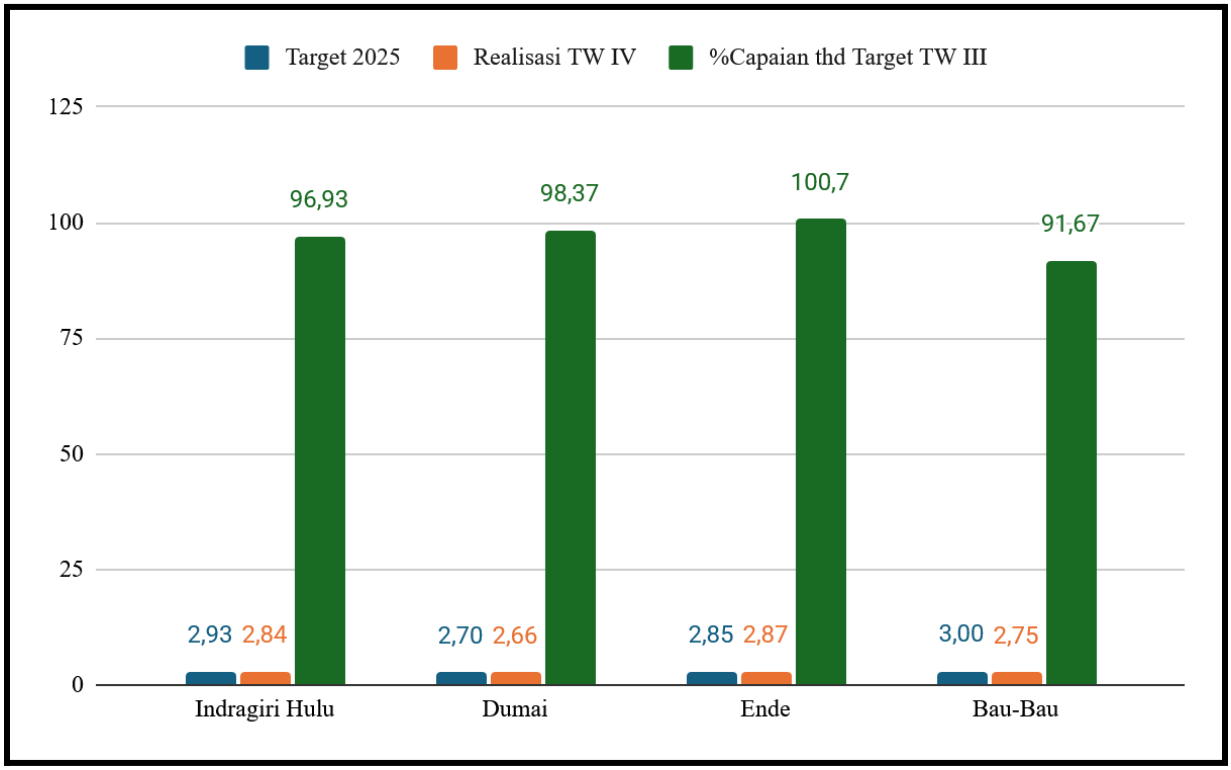
Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu merealisasikan nilai Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,84 dari target 2,93, dengan persentase capaian sebesar 98,93%. Capaian tersebut termasuk dalam kategori "Baik".

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra	Kategori
Indeks Manajemen Risiko	3,00	2,84	94,67%	Akan Tercapai 

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target akhir Renstra Tahun 2029, untuk Indikator Indeks Manajemen Risiko ditetapkan target akhir sebesar 3,00. Sampai dengan Tahun 2025, Balai POM di Indragiri Hulu telah merealisasikan nilai sebesar 2,84 atau mencapai 94,67% terhadap target akhir Renstra tersebut. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko telah menunjukkan progres yang baik dan berada dalam kategori "Akan Tercapai". Dalam kurun waktu pelaksanaan Renstra hingga Tahun 2029, perlu dilakukan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko secara bertahap dan berkesinambungan agar target akhir Renstra dapat terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Balai POM di Indragiri Hulu dengan UPT lain



Realisasi dan capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) "Indeks Manajemen Risiko UPT" Tahun 2025 menunjukkan bahwa UPT Ende memperoleh capaian tertinggi sebesar 100,70% dan termasuk dalam kriteria "Sangat Baik" (rentang 100–110%). Selanjutnya, UPT Dumai mencapai 98,37%, UPT Indragiri Hulu sebesar 96,93%, dan UPT Bau-Bau sebesar 91,67%, yang seluruhnya berada pada kriteria "Baik" (rentang 90–100%). Dengan demikian, capaian terendah diperoleh UPT Bau-Bau, namun tetap dalam kategori "Baik". Secara umum, kinerja Indeks Manajemen Risiko pada seluruh UPT telah menunjukkan pengelolaan risiko yang efektif dan berada pada kategori baik hingga sangat baik sesuai dengan ketentuan penilaian yang berlaku.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko

Indeks Manajemen Risiko	kesalahpahaman pegawai dalam penetapan risiko	daftar risiko	melakukan pembahasan daftar risiko secara berkesinambungan	-	Y	PYK/TU/04	SDM-10

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Indragiri Hulu antara lain:

a) Telah melakukan pelaporan manajemen risiko pada aplikasi SAPAAPIP, namun tidak tepat waktu pada Semester I TA 2025.
b) Telah mengidentifikasi risiko pada seluruh sasaran strategis, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko-risiko yang telah terjadi di masa lalu berdasarkan capaian kinerja periode sebelumnya yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi.
c) Telah terdapat rencana tindak pengendalian (RTP) untuk risiko residual dengan level risiko ≥16, namun deskripsi tindakan mitigasi sama dengan aktivitas pengendalian saat ini (existing control)
d) Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko
e) Indikator Kinerja "Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM" telah dilakukan cascading kepada seluruh tim manajemen representatif, akan tetapi indikator tersebut belum seluruhnya disematkan kepada auditor internal Balai POM di Indragiri Hulu.

Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya.

Pemanfaatan Informasi Kinerja dari laporan kinerja tahun 2025 antara lain

1. Dengan Laporan Kinerja ini dapat diketahui dari 8 (delapan) sasaran kinerja yang didukung oleh 28 Indikator Kinerja Utama sampai dengan Balai POM di Indragiri Hulu telah melaksanakan 8 (delapan) Sasaran Kinerja dengan 27(dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan di awal tahun dengan nilai kinerja organisasi mencapai Nilai Kinerja Organisasi 93,76% dengan predikat **Baik.**
2. Pada Laporan Kinerja disampaikan rekomendasi perbaikan, usulan rencana aksi dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Balai POM di Indragiri Hulu.
3. Laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan secara internal oleh Balai POM di Indragiri Hulu maupun oleh eksternal. Secara internal informasi pada laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan oleh kelompok substansi pengampu indeks kinerja untuk dapat meningkatkan capaian kinerja,penerima manfaat eksternal dalam hal ini adalah Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.
4. Laporan kinerja juga menampilkan nilai kinerja anggaran yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

3.4. Realisasi Anggaran

A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Indragiri Hulu memperoleh anggaran sebesar Rp15.883.385.000 (SP DIPA- 063.01.2.690484/2025)/12 Desember 2025 / awal 15.462.600.000 SP DIPA- 063.01.2.690484/2025 untuk melaksanakan program pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja yang mencakup tiga Kabupaten/Kota di Riau. Namun, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta surat edaran dari Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025, dilakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional melalui mekanisme blokir dan efisiensi. Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu mengalami revisi, di mana alokasi pembangunan gedung laboratorium direalokasikan sehingga pagu anggaran menjadi Rp2.462.226.000.

Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-24/M/SDK/KW/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang Persetujuan Permohonan Relaksasi Pemanfaatan Efisiensi

Anggaran (Blokir) Badan POM TA 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.05.03.2.10.25.634 tanggal 23 Oktober 2025 perihal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025, dilakukan pembukaan blokir terhadap RO Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT, sehingga total pagu anggaran Balai POM di Indragiri Hulu menjadi Rp3.511.214.000

Realisasi anggaran Balai POM di Indragiri Hulu hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025 mencapai Rp3.495.468.109 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu, Seratus Sembilan Rupiah), atau sebesar 99,55% dari total pagu anggaran setelah revisi. Berdasarkan jenis belanja, realisasi anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp1.243.426.121, belanja barang sebesar Rp1.869.329.527, dan belanja modal sebesar Rp382.712.461.

B. Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

Realisasi Anggaran Tahun 2025 berdasarkan per Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	%Capaian Input		
			ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN TW IV
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	59.073.927	58.554.925	99,12%
1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	58.286.164	60.281.302	103,42%
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	8.326.595	8.611.615	103,42%
1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	8.326.595	8.611.615	103,42%
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15.182.041	14.715.986	96,93%
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15.182.041	14.715.986	96,93%
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	15.182.041	14.715.986	96,93%
1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.224.049	84.025.641	98,59%
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	42.612.024	42.012.821	98,59%

1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	15.182.041	14.715.986	96,93%
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	59.073.927	58.554.925	99,12%
1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	42.612.024	42.012.821	98,59%
1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	93.970.732	93.696.350	99,71%
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	8.326.595	8.611.615	103,42%
2-1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	510.000	510.000	100,00%
4-1	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	112.224.003	38.727.528	34,51%
4-2		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	78.136.000	11.923.000	15,26%
4-3		Jumlah desa pangan aman	152.139.636	29.303.600	19,26%
4-4		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	96.668.000	6.695.000	6,93%

5-1	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	36.326.940	12.947.300	35,64%
6-1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	108.876.006	92.695.935	85,14%
7-1	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	89.018.231	8.807.664	9,89%
8-1	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	53.123.485	53.670.091	101,03%
9-2	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	172.596.403	165.071.770	95,64%
9-3		Nilai Kinerja Anggaran UPT	172.596.403	165.071.770	95,64%
9-4		Indeks Manajemen Risiko UPT	147.939.774	141.490.089	95,64%
9-5		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	14.107.218.067	2.244.716.793	15,91%
Total Capaian PK			15.853.933.741	3.495.468.109	22,05%

C. Efisiensi dan Efektivitas atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja per Sasaran

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\textbf{IE} = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}} \qquad \textbf{IE} = \frac{100\ \%}{100\ \%} = \textbf{1}$$

Di level Pusat (Eselon II) dan UPT, capaian outputnya adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan sedangkan inputnya merupakan persentase realisasi anggaran masing-masing sasaran kegiatan.

$$\textbf{SE} = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}} \times 100\%$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\textbf{TE} = \frac{\text{IE - SE}}{\text{SE}}$$

Definisi Operasional perhitungan capaian indikator Tingkat Efisiensi (TE) dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indragiri Hulu Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	OUTPUT			INPUT			Efisiensi		
			T	R	%	T	R	%	Indeks Efisien (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Capaian Efisiensi
1-1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,50	99,15	115,96 %	59.073.927	58.554.925	99,12%	1,17	0,17	100% (efisien)
1-3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84,00	89,26	106,26 %	58.286.164	60.281.302	103,42 %	1,03	0,03	100% (efisien)
1-4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100,00	100,00	100,00 %	8.326.595	8.611.615	103,42 %	0,97	-0,03	Tidak Efisien
1-5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89 %	8.326.595	8.611.615	103,42 %	1,06	0,06	100% (efisien)
1-6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75,00	95,21	126,95 %	15.182.041	14.715.986	96,93%	1,31	0,31	95% (efisien)
1-7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	100,00 %	15.182.041	14.715.986	96,93%	1,03	0,03	100% (efisien)
1-8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,00	100,00	112,36 %	15.182.041	14.715.986	96,93%	1,16	0,16	100% (efisien)
1-9		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,75	100,00	104,44 %	85.224.049	84.025.641	98,59%	1,06	0,06	100% (efisien)
1-10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,81	109,68 %	42.612.024	42.012.821	98,59%	1,11	0,11	100% (efisien)

1-11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,88	109,28 %	15.182.041	14.715.986	96,93%	1,13	0,13	100% (efisien)
1-12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80,00	100,00	125,00 %	59.073.927	58.554.925	99,12%	1,26	0,26	95% (efisien)
1-13		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	105,60	105,60 %	42.612.024	42.012.821	98,59%	1,07	0,07	100% (efisien)
1-14		Nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	13,00	24,48	188,31 %	93.970.732	93.696.350	99,71%	1,89	0,89	88% (efisien)
1-15		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	33,33	28,60	85,81%	8.326.595	8.611.615	103,42 %	0,83	-0,17	Tidak Efisien
2-1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50,00	100,00	200,00 %	510.000	510.000	100,00 %	2,00	1,00	88% (efisien)
4-1	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,19	87,25	101,23 %	112.224.003	38.727.528	34,51%	2,93	1,93	75% (tidak efisien)
4-2		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1,00	1,00	100,00 %	78.136.000	11.923.000	15,26%	6,55	5,55	75% (tidak efisien)
4-3		Jumlah desa pangan aman	1,00	1,00	100,00 %	152.139.636	29.303.600	19,26%	5,19	4,19	75% (tidak efisien)
4-4		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00 %	96.668.000	6.695.000	6,93%	14,44	13,44	75% (tidak efisien)

5-1	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos. yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	10,00	10,00	100,00 %	36.326. 940	12.947. 300	35,64%	2,81	1,81	75% (tidak efisien)
6-1	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	95,00	100,00	105,26 %	108.876 .006	92.695. 935	85,14%	1,24	0,24	95% (efisien)
7-1	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	90,00	97,92	108,80 %	89.018. 231	8.807.6 64	9,89%	11,00	10,00	75% (tidak efisien)
8-1	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,05	4,67	115,31 %	53.123. 485	53.670. 091	101,03 %	1,14	0,14	100% (efisien)
9-2	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT	78,38	78,02	99,54%	172.596 .403	165.071 .770	95,64%	1,04	0,04	100% (efisien)
9-3		Nilai Kinerja Anggaran UPT	5,00	5,00	100,00 %	172.596 .403	165.071 .770	95,64%	1,05	0,05	100% (efisien)
9-4		Indeks Manajemen Risiko UPT	2,93	2,84	96,93%	147.939 .774	141.490 .089	95,64%	1,01	0,01	100% (efisien)

9-5		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT	100,00	100,00	100,00 %	14.107.218.067	2.244.716.793	15,91%	6,28	5,28	75% (tidak efisien)
Total Capaian PK						15.853.933.741	3.495.468.109	22,05%	4,72	3,72	75% (tidak efisien)

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi (TE) penggunaan anggaran Tahun 2025 terhadap 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan total 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja di Balai POM di Indragiri Hulu, diketahui bahwa sebanyak 19 (sembilan belas) indikator kinerja berada pada kategori efisien, yang menunjukkan adanya kesesuaian antara capaian output dengan realisasi anggaran yang digunakan. Indikator-indikator tersebut pada umumnya memiliki tingkat capaian kinerja ≥100% dengan realisasi anggaran yang proporsional, sehingga menghasilkan Indeks Efisiensi (IE) di atas 1 dan Tingkat Efisiensi (TE) positif.

Sementara itu, terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang masih berada pada kategori tidak efisien, antara lain pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Tingkat efektivitas KIE, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase UMKM yang didampingi, Persentase laporan analisis kejahatan yang diselesaikan, serta Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi. Kondisi tidak efisien tersebut umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara capaian output dan proporsi penggunaan anggaran, baik karena realisasi anggaran relatif rendah dibandingkan pagu maupun karena capaian output belum optimal terhadap target yang ditetapkan.

Secara agregat, total realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp3.495.468.109 dari total pagu Rp15.853.933.741 (22,05%), dengan hasil perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 3,72 dan capaian efisiensi pada kategori 75% (tidak efisien). Dengan demikian, meskipun sebagian besar indikator kinerja telah menunjukkan capaian yang efisien secara individual, secara keseluruhan pelaksanaan penggunaan anggaran Tahun 2025 masih memerlukan optimalisasi agar selaras antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output kinerja.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pada periode akhir tahun 2025 ini, BPOM di Indragiri Hulu memperoleh persentase capaian kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi sebesar 93,76 % dengan Predikat **Baik**
2. Pada awal tahun 2025 ditetapkan 8 (sembilan) sasaran kinerja. Dalam pelaksanaannya, sasaran kinerja penguatan laboratorium dilebur ke dalam sasaran peningkatan efektivitas pengawasan guna menyelaraskan fokus. Dari 8 (delapan) sasaran kinerja didapatkan rincian pencapaian sebagai berikut:
   - 2 (satu) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya tidak dapat disimpulkan
   - 4 (empat) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya sangat baik
   - 2 (Dua) sasaran kegiatan kriteria pencapaiannya baik
3. Realisasi serapan anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp3.495.468.109 (Tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah), atau sebesar 22,05%% dari total pagu anggaran setelah revisi.
4. Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Tahun 2025 diketahui bahwa sebanyak 19 indikator kinerja berada pada kategori efisien,

4.2 Kendala

Sebanyak 26 (dua puluh enam) dari 28 (dua puluh delapan) IKSK Tahun 2025 pada Balai POM di Indragiri Hulu telah mencapai target kinerja (≥100%), yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah terealisasi secara optimal sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target 100%, yaitu Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan capaian 85,81% dan Indeks Manajemen Risiko UPT dengan capaian 96,93%. Meskipun demikian, capaian Indeks Manajemen Risiko masih berada pada kategori “Baik”. Secara keseluruhan, capaian IKSK Tahun 2025 mencerminkan kinerja yang efektif dalam mendukung tata kelola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

Ditinjau dari aspek efisiensi penggunaan anggaran, berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE), sebanyak 19 (sembilan belas) indikator berada pada kategori efisien, sedangkan 9 (sembilan) indikator berada pada kategori tidak efisien, antara lain pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Tingkat efektivitas KIE, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase UMKM yang didampingi, Persentase laporan analisis kejahatan yang diselesaikan, serta Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi.

Kondisi tidak efisien tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara proporsi capaian output dan realisasi anggaran, khususnya pada indikator dengan realisasi anggaran yang relatif rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Secara agregat, total realisasi anggaran sebesar Rp3.495.468.109 dari total pagu Rp15.853.933.741 (22,05%) menghasilkan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 3,72 dengan capaian efisiensi 75% (tidak efisien), sehingga masih diperlukan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

4.3 Rekomendasi

1. Meningkatkan ketepatan perencanaan dan penyerapan anggaran melalui pengendalian pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur dan berbasis prioritas kinerja.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja serta efisiensi anggaran secara periodik untuk memastikan kesesuaian antara output dan input.
3. Memperkuat koordinasi dengan unit kerja pengampu di pusat serta meningkatkan integrasi program lintas sektor guna mendukung pencapaian target kinerja secara lebih efektif dan efisien.

LAMPIRAN
PK 2025
RAPK 2025
SK IKU BPOM Indragiri Hulu tahun 2025